



Pemerintah
Kabupaten Lamandau



Rancangan Awal

**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamandau**

Tahun 2025 - 2029



Pemerintah Kabupaten Lamandau

Rancangan Awal
**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)**
Kabupaten Lamandau
Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	8
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamandau 2025-2045	10
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	11
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	13
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	14
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja, dan APBD	14
1.4 Maksud dan Tujuan	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	20
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	20
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	20
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	23
2.1.3 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	29
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	36
2.1.5 Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	42
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	46
2.1.7 Demografi	49
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	63
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	63
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	74
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	75
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	80
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	81
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	83
2.3 Aspek Daya Saing	89
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	89
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	90

2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	95
2.3.4	Transformasi Digital	97
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	97
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	99
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	105
2.4	Aspek Pelayanan Umum	107
2.4.1	Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	107
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tanggung, dan Demokrasi Substansial	110
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	113
2.4.4	Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	115
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	115
2.5.1	Realisasi APBD Tahun 2019-2023	115
2.5.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	153
2.6	Permasalahan dan Isu strategis Daerah	175
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	175
2.6.2	Isu Strategis	181
2.6.3	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Lamandau	212
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	221
3.1	Visi dan Misi	221
3.1.1	Visi Daerah	221
3.1.2	Misi Daerah	224
3.2	Tujuan dan Sasaran	235
3.3	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	237
3.3.1	Tahapan Pembangunan RPJMD	237
3.3.2	Arah Kebijakan	239
3.3.3	Program Prioritas Daerah	242
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH		281
4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	281
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	340
4.2.1	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	340
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)	341
BAB V	PENUTUP	359

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045 pada tahap periodisasi pertama tahun 2025-2029	11
Tabel 1. 2 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029	12
Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau	20
Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan Lereng di Kabupaten Lamandau	23
Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Lamandau	24
Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lamandau	25
Tabel 2. 5 Kondisi Klimatologi Kabupaten Lamandau	26
Tabel 2. 6 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Lamandau	30
Tabel 2. 7 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Lamandau	31
Tabel 2. 8 Daya Dukung Air di Kabupaten Lamandau	33
Tabel 2. 9 Proyeksi Daya Dukung Air	34
Tabel 2. 10 Proyeksi Daya Dukung Air pada Tiap Kecamatan	35
Tabel 2. 11 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	37
Tabel 2. 12 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2024	38
Tabel 2. 13 Infrastruktur Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	39
Tabel 2. 14 Indikator Persampahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023	45
Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau Berdasarkan Sex Rasio Tahun 2020-2024	52
Tabel 2. 16 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	54
Tabel 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2025 - 2029	57
Tabel 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029 (ribu jiwa)	59
Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)	64
Tabel 2. 20 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lamandau dan Kalimantan Tengah Tahun 2023	86
Tabel 2. 21 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	95
Tabel 2. 22 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang menurut Lapangan Usaha	96

Tabel 2. 23 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	98
Tabel 2. 24 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan	100
Tabel 2. 25 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2024	102
Tabel 2. 26 Infrastruktur Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	103
Tabel 2. 27 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2023	107
Tabel 2. 28 Kinerja Komponen IRB Kabupaten Lamandau	108
Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2023	115
Tabel 2. 30 Realisasi APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023.....	117
Tabel 2. 31 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023.....	118
Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	121
Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar) .	123
Tabel 2. 34 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	124
Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	126
Tabel 2. 36 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	127
Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	130
Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	131
Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	132
Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	135
Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	136
Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	137
Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	138
Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	139

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	143
Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	144
Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	146
Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	147
Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)	149
Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	150
Tabel 2. 51 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)	151
Tabel 2. 52 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)	152
Tabel 2. 53 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)	152
Tabel 2. 54 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029.....	155
Tabel 2. 55 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	164
Tabel 2. 56 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	170
Tabel 2. 57 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	174
Tabel 2. 58 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamandau.....	175
Tabel 2. 59 Rangkuman Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	209
Tabel 2. 60 Matriks Isu Strategis Kabupaten Lamandau	213
Tabel 3. 1 Penyandingan Visi dan Misi RPJMD Lamandau, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN Tahun 2025-2029	233
Tabel 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	236
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	239
Tabel 3. 4 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	243

Tabel 3. 5 Penandingan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 900.1.15.5/3406 Tahun 2024.....	271
Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	282
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	340
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamandau	342

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antardokumen Perencanaan.....	9
Gambar 2. 1 Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Lamandau	21
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Lamandau	22
Gambar 2. 3 Grafik Luas Wilayah menurut Curah Hujan di Kabupaten Lamandau.....	26
Gambar 2. 4 Grafik Luas Wilayah menurut Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau.....	27
Gambar 2. 5 Grafik Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Lamandau	28
Gambar 2. 6 Grafik Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Lamandau	29
Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Lamandau	30
Gambar 2. 8 Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lamandau	32
Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau	34
Gambar 2. 10 Peta Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau Tahun 2029	36
Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	37
Gambar 2. 12 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum	40
Gambar 2. 13 Sumber Air di Kampung Transmigrasi Kahingai	41
Gambar 2. 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau	42
Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau 2018-2023.....	43
Gambar 2. 16 Luasan RTH di Kabupaten Lamandau 2018-2023	44
Gambar 2. 17 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau	46
Gambar 2. 18 Luas Wilayah menurut Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau	47
Gambar 2. 19 Luas Wilayah Menurut Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau Tahun 2023.....	48
Gambar 2. 20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	50
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2024.....	51
Gambar 2. 22 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045	56
Gambar 2. 23 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029 (ribu jiwa).....	62

Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%).....	63
Gambar 2. 25 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	66
Gambar 2. 26 Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024.....	67
Gambar 2. 27 Rasio Gini Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020,2024.....	68
Gambar 2. 28 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	69
Gambar 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	70
Gambar 2. 30 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024.....	71
Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	73
Gambar 2. 32 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024	74
Gambar 2. 33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024.....	76
Gambar 2. 34 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	77
Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.....	79
Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	83
Gambar 2. 37 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023	84
Gambar 2. 38 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023	88
Gambar 2. 39 Angka Ketergantungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024.....	90
Gambar 2. 40 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	91
Gambar 2. 41 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	93
Gambar 2. 42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lamandau Tahun 2022-2024.....	94
Gambar 2. 43 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi	101

Gambar 2. 44 Indeks Desa Membangun Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024	104
Gambar 2. 45 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau.....	105
Gambar 2. 46 Tingkat Inflasi Kabupaten Lamandau dan Kalimantan Tengah	106
Gambar 2. 47 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2021-2024	110
Gambar 2. 48 Jumlah Laporan Kejahatan	111
Gambar 2. 49 Indeks Daya Saing Daerah per Kapita Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2010-2023.....	114
Gambar 2. 50 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)	120
Gambar 2. 51 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2019-2023 (Persen)	122
Gambar 2. 52 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (Persen)	134
Gambar 2. 53 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 (Persen).....	140
Gambar 2. 54 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2023.....	142
Gambar 2. 55 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023	145
Gambar 2. 56 Proyeksi Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Lamandau 2025-2029.....	157
Gambar 2. 57 Proyeksi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau 2025-2029.....	159
Gambar 2. 58 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Lamandau 2025-2029.....	167
Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	232
Gambar 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029.....	238

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Pembangunan Daerah merupakan upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara umum, proses perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi tiga periodisasi yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Lamandau menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Lebih dari itu, RPJMD sebagai instrument untuk menilai kinerja Kepala Daerah sampai akhir periode kepemimpinannya. Muaranya dokumen ini dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menuju visi dan misi yang dicita-citakan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lamandau.

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Lamandau disajikan dalam lima bab meliputi bab Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Penutup. Dalam penyusunan dokumen RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan, serta berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, KLHS, RPJMN, serta dokumen sektoral terkait.

Adapun pendekatan perencanaan yang digunakan yakni berorientasi pada proses dan hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi proses terdiri dari 4 empat pendekatan yakni (1) Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama DPRD; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Sedangkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu (1) pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; (2) pendekatan

integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah; (3) pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang efektif merupakan salah satu faktor utama untuk mengatasi berbagai permasalahan, memaksimalkan potensi yang tersedia, dan menanggapi isu-isu strategis daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

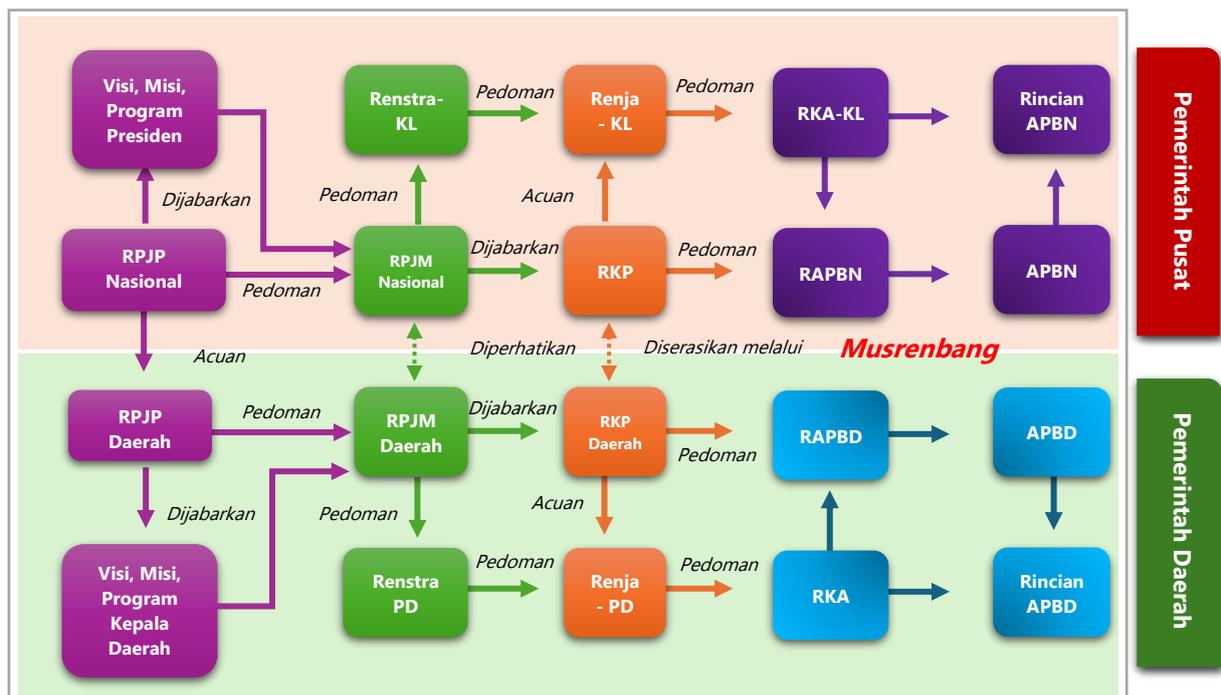
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau **Nomor ...** Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun ... Nomor ...).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut juga memberikan arah yang jelas tentang keterkaitan antar dokumen perencanaan. Keterkaitan

yang dimandatkan di dalam regulasi tersebut meliputi keterkaitan antar jangka waktu perencanaan maupun antara perencanaan pusat dan daerah. Tidak kalah penting, sistem perencanaan tidak hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi juga adanya peran masyarakat. Urgensi keterkaitan antar perencanaan ini semakin jelas dengan merujuk pada tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan antara dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Hubungan Antardokumen Perencanaan

Dokumen RPJMD dengan demikian harus memiliki keterkaitan dan membangun sinergi antar perencanaan berjangka maupun dengan perencanaan pemerintah pusat dan provinsi. Penyusunan dokumen perencanaan pada tahun ini memiliki momentum sebagai modalitas bagi sinergi antardokumen, karena

antara perencanaan pusat dan daerah memiliki awal periode yang sama. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamandau 2025-2045

Penyusunan RPJMD 2025-2029 mengkaji berbagai muatan substantif dari RPJPD, yang selanjutnya akan dijabarkan lebih detil ke dalam dokumen RPJMD utuh. RPJPD Kabupaten Lamandau telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang, yaitu "**Lamandau Maju, Harmonis, Elok, Berkelanjutan, Adaptif Terdepan**". Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau dicapai melalui delapan misi yaitu mewujudkan transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera; mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang adaptif; memantapkan kondusivitas dan stabilitas daerah; memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas; mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Adapun arah kebijakan periode pertama RPJPD Kabupaten Lamandau memiliki tema "**peningkatan fondasi transformasi pembangunan**". Pada tahap pertama tersebut perencanaan pembangunan difokuskan pada hal-hal yang bersifat fundamental diantaranya pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar lainnya untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut penjabaran arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045 pada tahap periodisasi pertama tahun 2025-2029:

Tabel 1. 1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045 pada tahap periodisasi pertama tahun 2025-2029

Misi RPJPD Kabupaten Lamandau	Periode I (2025-2029): Peningkatan fondasi transformasi pembangunan
(1)	(2)
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing	Peningkatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya ekonomi
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang adaptif	Penguatan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi dan sistem manajemen ASN yang handal
Misi 4: Memantapkan kondusivitas dan stabilitas daerah	Peningkatan kondusivitas wilayah dan stabilitas ekonomi daerah
Misi 5: Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Penguatan fondasi sosial budaya dan ekologi yang tangguh
Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas	Peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan
Misi 7: Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan dukungan sarana dan prasarana dasar wilayah yang berkualitas
Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Penguatan sinkronisasi dan sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah

Sumber: RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau memiliki kesesuaian waktu dengan penyusunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. Adapun muatan yang diacu pada dokumen RPJMN diantaranya keselarasan isu strategis dan arah kebijakan

kewilayahan, khususnya untuk Pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tantangan pembangunan pada dokumen RPJMN diantaranya rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, pergeseran struktur kelas masyarakat, kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif, krisis lingkungan, geopolitik dan geoekonomi, dan Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Tema pembangunan jangka menengah untuk Pulau Kalimantan yakni sebagai “**superhub ekonomi Nusantara**”. Tema tersebut kemudian didukung indikasi intervensi untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Indikasi Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
1	<p>Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral • Pengembangan industri hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan output: riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler, dengan output: fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT (<i>renewable energy</i>) dalam rangka efisiensi sumberdaya industri
2	<p>Penguatan infrastruktur konektivitas (jalan, darat, laut, udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut dengan output: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk Bandara Murung Raya dan Bandara Kuala Kurun • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistic dengan output: pembangunan jalan koridor logistik, dan pembangunan jembatan koridor logistik khususnya penuntasan <i>Missing Link</i> Jalan Lintas Tengah Kalteng-Kalbar-Tumbang Samba

No	Highlight Indikasi Intervensi
3	<p>Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi prasarana pendidikan, dengan output: pembangunan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan • Pelatihan vokasi disektor strategis dengan output: pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> di Provinsi Kalimantan Tengah disertai fasilitasi keikutsertaan diklat dan pendidikan kecakapan wirausaha • Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan pelatihan vokasi dengan output: peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri • Penguatan pendidikan menengah vokasi dengan output: pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi pusat keunggulan, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (<i>teaching factory</i>)
4	<p>Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil dengan output: pengembangan tambungan air dan prasarana air baku • Pengembangan dan pengeolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal dengan output: pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal

Sumber: Lampiran IV, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD menjadi instrumen penting bagi penyalarsan antara rencana pembangunan jangka menengah dengan rencana tata ruang wilayah. Aspek di dalam RTRW yang perlu dipedomani antara lain rumusan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah, serta indikasi program. Penyesuaian ini dalam rangka membangun sinergi antara pembangunan makro dengan peruntukkan tata ruang wilayah. Adanya sinergi ini diharapkan pembangunan yang berjalan dapat selaras antara orientasi ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Periodesasi RTRW Kabupaten Lamandau meskipun tidak sama persis dengan periode RPJMD, tetapi masih memiliki irisan waktu yang cukup lama. RTRW Kabupaten Lamandau tahun 2024-2044 memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang berdaya saing dengan mengintegrasikan sektor pertanian, pariwisata, dan permukiman yang berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD disertai dengan penyusunan KLHS RPJMD dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dan dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi di dalam KLHS akan diintegrasikan dan dielaborasikan dengan permasalahan pembangunan daerah, sehingga memunculkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau lima tahun ke depan. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, integrasi dokumen KLHS di dalam RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja, dan APBD

Salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJMD memiliki peran penting dalam menyinergikan antara perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat

Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Berikutnya, ketika telah ditetapkan, RPJMD dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan. Proses penjabaran yang selaras antara RPJMD dengan RKPD dan Renja menjadi modal penting bagi keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran, sehingga terwujud penganggaran yang berorientasi kinerja.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lamandau.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;

6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lamandau; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.

Aspek geografi dan demografi memuat terkait posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta demografi. Aspek kesejahteraan memuat terkait kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Aspek daya saing memuat terkait daya saing sumber daya manusia; iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro. Aspek pelayanan umum memuat terkait regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; hukum berkadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan; kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Gambaran keuangan daerah memuat terkait realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang bersifat dominan serta identifikasi isu strategis daerah sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini

juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Deskripsi terkait aspek geografi dan demografi ditujukan untuk menggambarkan karakteristik eksisting secara fisik maupun dinamika sosial budaya penduduk di Kabupaten Lamandau. Aspek geografi mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi memuat jumlah, struktur, dan distribusi penduduk. Berikut disajikan deskripsi dari setiap komponen tersebut.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah memberikan penjelasan terkait dengan posisi strategis daerah, potensi kondisi fisik dan sumber daya alam, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan di Kabupaten Lamandau.

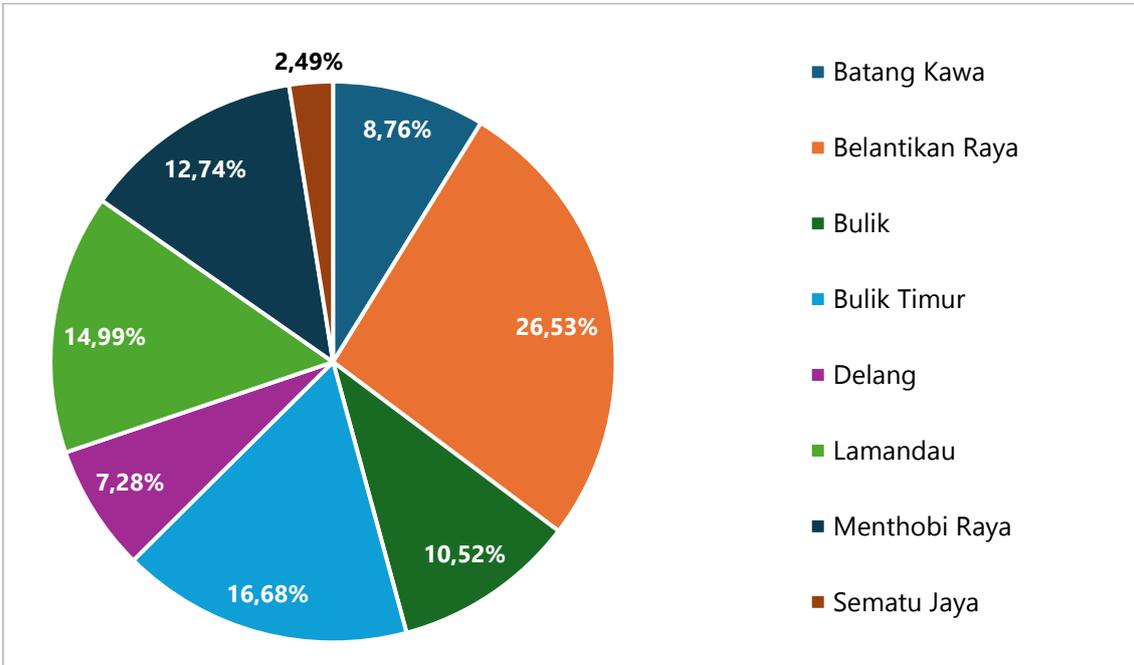
Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau memiliki luasan sebesar 763.239,43 Ha yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Rincian luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Batang Kawa	66.870,14
2	Belantikan Raya	202.503,09
3	Bulik	80.266,34
4	Bulik Timur	127.341,52
5	Delang	55.568,08
6	Lamandau	114.392,17
7	Menthobi Raya	97.258,18

No	Kecamatan	Luas (Ha)
8	Sematu Jaya	19.039,37
Luas Kabupaten Lamandau		763.239,43

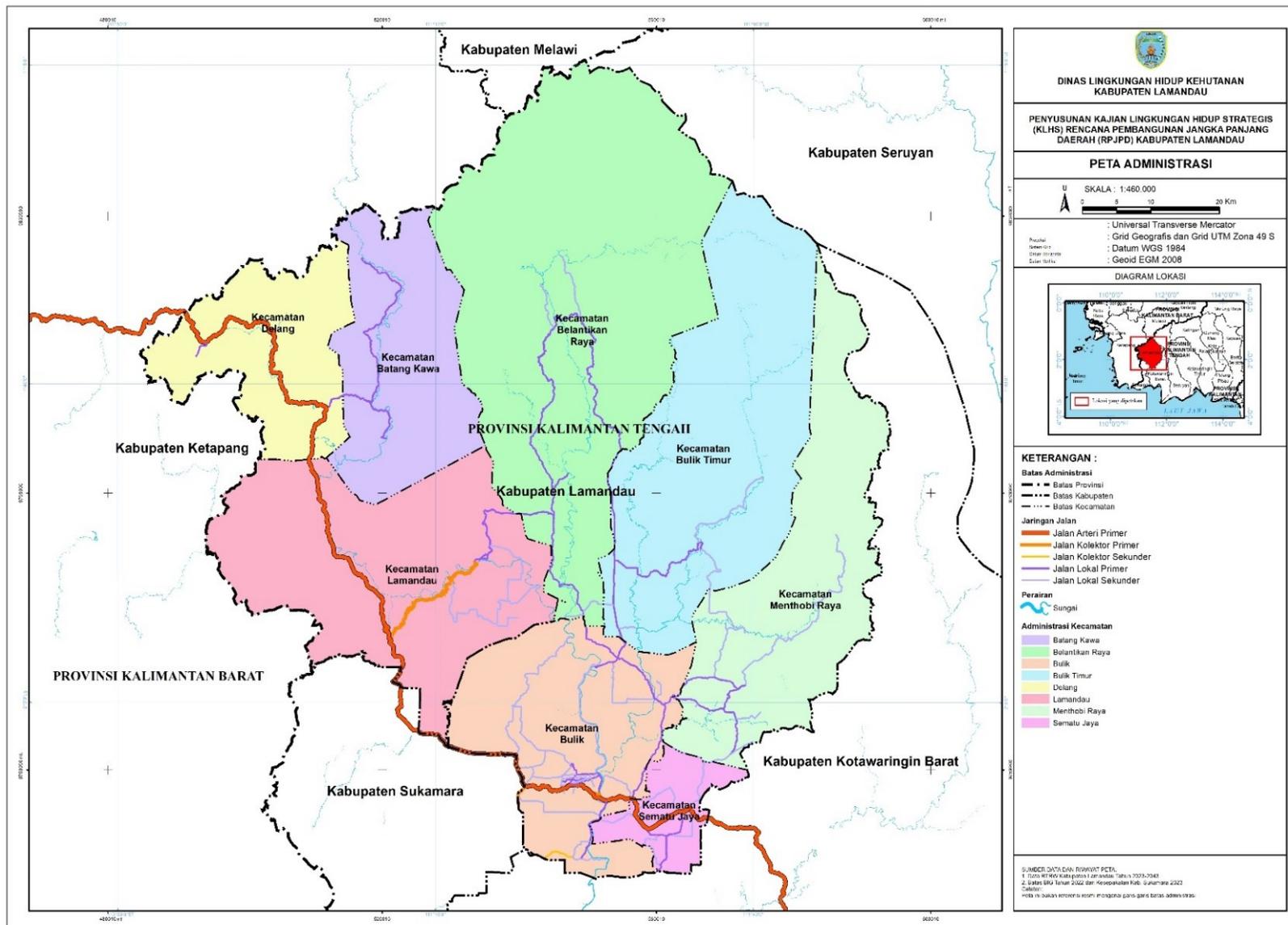
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau, 2024



Gambar 2. 1 Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Lamandau

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau, 2024

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan luasan terbesar yaitu Kecamatan Belantikan Raya yaitu seluas 202.503,09 Ha atau 26,53% dari total luas Kabupaten Lamandau, sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu Kecamatan Sematu Jaya dengan luasan sebesar 19.039,37 Ha atau sebesar 2,49% dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau.



Gambar 2.2
Peta Administrasi
Kabupaten Lamandau

Sumber: KLHS RPJPD
Kabupaten Lamandau,
2024

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Topografi

Kemiringan lereng pada Kabupaten Lamandau beraneka ragam mulai dari <2% hingga >60%. Berikut merupakan tabel luas wilayah menurut kemiringan lereng di Kabupaten Lamandau.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan Lereng di Kabupaten Lamandau

No	Kemiringan (%)	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	< 2 %	20.291,81
2	2-15 %	420.956,89
3	15-25 %	127.551,39
4	25-40 %	111.969,23
5	> 40%	82.470,10
Kabupaten Lamandau		763.239,43

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Lamandau

Data kemiringan lereng menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamandau memiliki kemiringan lereng 2-15% dengan luasan sebesar 420.956,89 Ha, sedangkan hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki kemiringan lereng <2% yaitu seluas 20.291,81 Ha.

2.1.2.2 Hidrologi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola aliran sungai (*drainage pattern*) pada suatu daerah antara lain adalah topografi, morfologi, dan kondisi geologi di daerah tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran dan profil pola aliran sungai di Kabupaten Lamandau diperlukan deskripsi mengenai aspek-aspek tersebut. Litologi Kabupaten Lamandau disusun oleh batuan beku baik plutonik dan vulkanik tua yang menembus batuan metamorf. Oleh sebab itu, batuan di daerah tersebut bersifat keras dan impermeabel dan berpengaruh pada limpasan air permukaan yang kemudian menjadi sungai-sungai permukaan. Selain itu, Kabupaten Lamandau juga memiliki banyak struktur berupa sesar-sesar dan kekar-kekar. Kondisi tersebut menghasilkan sungai-sungai utama yang

mengalir di cekungan-cekungan (basin) antara lain adalah Sungai Kenambai, Sungai Palikodan, Sungai Bulik, dan Sungai Lamandau. Sungai yang terdapat di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Sungai di Kabupaten Lamandau

Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata	
			Kedalaman (m)	Lebar (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Sungai Bulik	45	45	5	30
Sungai Lamandau	65	65	6	65
Sungai Belantikan	52	52	4	23
Sungai Matu	21	21	3,5	8
Sungai Batangkawa	65	65	6	25
Sungai Delang	57	40	5	18
Sungai Kungkung	20		2	4

Sumber: RPPLH Kabupaten Lamandau, 2018

Melihat pola aliran sungai pada citra, diketahui bahwa terdapat beberapa tipe pola aliran di Kabupaten Lamandau. Pola aliran tersebut antara lain adalah Pola Deranged, Pola Parallel, dan Pola Dendritik. Pola Deranged merupakan pola yang terbentuk secara tidak teratur dan didominasi oleh aliran sungai pendek. Di Kabupaten Lamandau, pola ini berkembang pada anak-anak sungai (*tributtaries*) yang mengalir ke sungai-sungai utama. Pola tersebut dijumpai secara merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau.

Pola paralel-rektangular ditandai dengan anak sungai utama yang sejajar atau hampir sejajar dan mengalir ke sungai utama serta arah anak sungai yang tegak lurus satu sama lain. Secara teoritik, pola aliran ini berkembang pada daerah yang secara kuat dikontrol oleh struktur pada lereng-lereng seperti di blok punggungan sesar, pegunungan/perbukitan antiklinal, dan sesar-sesar yang sejajar. Pola ini di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada daerah perbukitan di sisi utara yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Bulik Timur, Mentohi Raya, dan Belantikan Raya.

Pola berikutnya yang terdapat di Kabupaten Lamandau adalah Pola Dendritik. Pola ini menyerupai sistem perakaran di tumbuhan dan berkembang pada dataran dengan batuan yang seragam atau homogen. Di Kabupaten Lamandau pola ini umum berkembang dan dapat ditemui pada daerah di sisi selatan yang secara administratif meliputi Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya. Kabupaten Lamandau terdiri dari tujuh Daerah Aliran Sungai (DAS). Luasan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lamandau

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
(1)	(2)
Bulik	9.000
Lamandau	13.000
Belantikan	10.400
Matu	4.200
Batang Kawa	13.000
Delang	11.400
Kungkung	4.000

Sumber: RPPLH Kabupaten Lamandau, 2018

Berdasarkan data luasan DAS tersebut dapat diketahui DAS terbesar di Kabupaten Lamandau adalah DAS Lamandau dengan DAS Batangkawa dengan luasan mencapai 13 ribu hektar dan masing-masing mencakup 20% dari luas total keseluruhan Kabupaten Lamandau. Sementara itu DAS terkecil adalah DAS Kungkung dengan luasan hanya 4.000 hektar atau hanya mencakup 6% dari luas keseluruhan Kabupaten Lamandau.

2.1.2.3 Klimatologi

Kabupaten Lamandau terletak di dekat garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan serta musim kemarau. Karena iklim tropis tersebut, variabel-variabel yang berkaitan dengan klimatologi seperti temperatur, kelembaban, dan curah hujan memiliki kategori tinggi hingga sangat tinggi. Letaknya yang dekat dengan khatulistiwa membuat penyinaran matahari juga tinggi dengan penyinaran sepanjang tahun. Kondisi

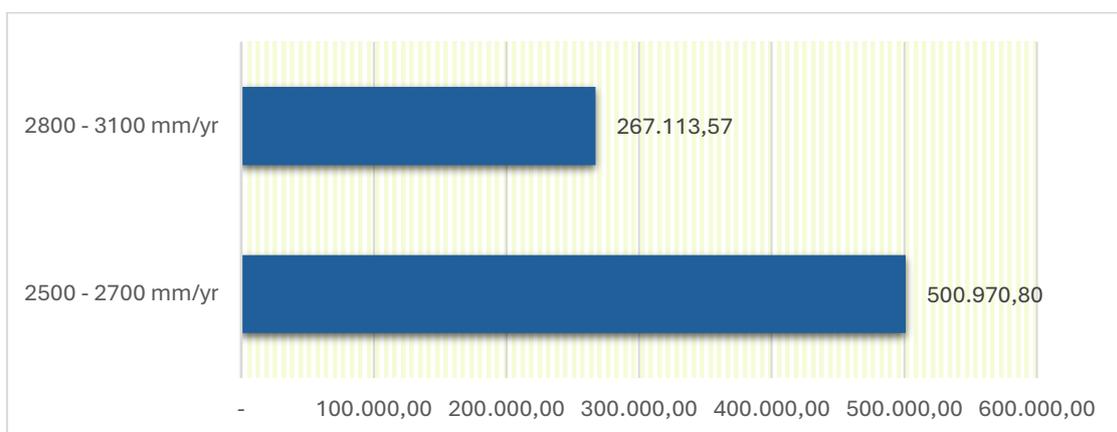
Iklimologi Kabupaten Lamandau selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Kondisi Klimatologi Kabupaten Lamandau

Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan per Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	26,50	84,80	235,70	19
Februari	26,70	84,80	162,60	21
Maret	26,30	86,90	331,20	27
April	27,00	86,30	245,90	24
Mei	27,80	83,50	173,50	17
Juni	27,40	83,00	178,60	13
Juli	26,80	83,40	164,40	13
Agustus	27,00	78,80	61,00	8
September	27,20	77,40	97,30	10
Oktober	27,50	80,90	211,50	15
November	27,50	84,00	218,60	20
Desember	27,30	83,40	216,30	26

Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2024

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Grafik curah hujan di bawah ini mengklasifikasikan curah hujan per tahun, Kabupaten Lamandau memiliki curah hujan 2500-2700 mm/tahun dan 2800-3100 mm/tahun.



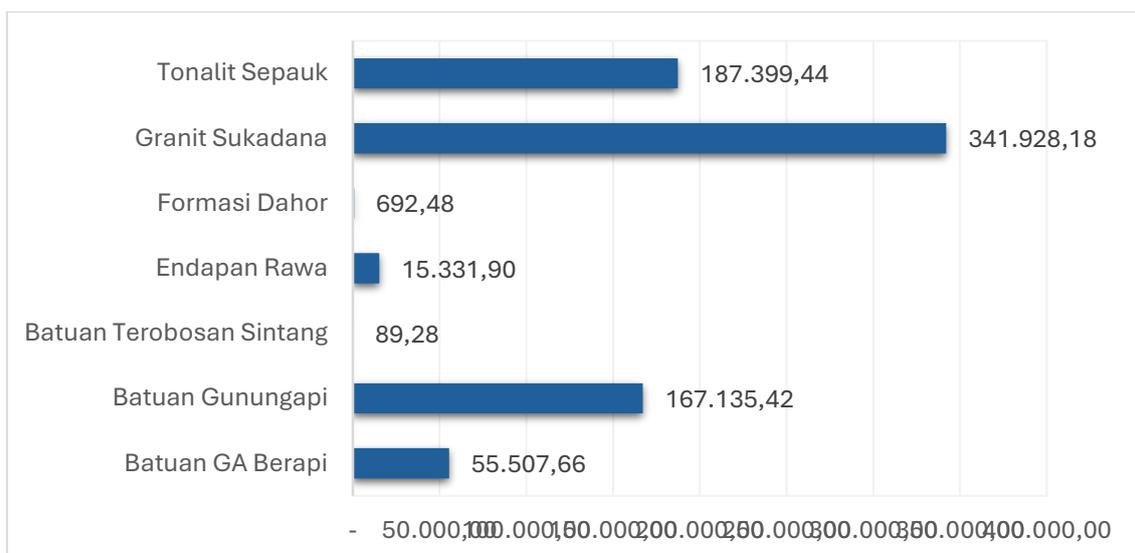
Gambar 2. 3 Grafik Luas Wilayah menurut Curah Hujan di Kabupaten Lamandau

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lamandau, 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamandau memiliki curah hujan 2500 - 2700 mm/tahun dengan luasan sebesar 500.970,80 Ha, sedangkan hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki curah hujan 2800 - 3100 mm/tahun yaitu seluas 267.113,57 Ha. Rata-rata temperatur Kabupaten Lamandau selama tahun 2023 adalah 27,08°C. Dalam satu tahun tidak terjadi perbedaan yang fluktuatif dan cenderung stabil pada kisaran angka 27°C. Angka tersebut merupakan temperatur yang umum ada di daerah dengan iklim tropis. Sedangkan rata-rata kelembaban udara tiap bulannya berkisar di 80-87%. Tren data kelembaban udara berjalan mengikuti curah hujan yang ada di Kabupaten Lamandau. Pada bulan Agustus dan September ketika curah hujan turun, kelembaban juga ikut turun. Dengan demikian, kelembaban udara di Kabupaten Lamandau sangat dipengaruhi oleh curah hujan.

2.1.2.4 Geologi

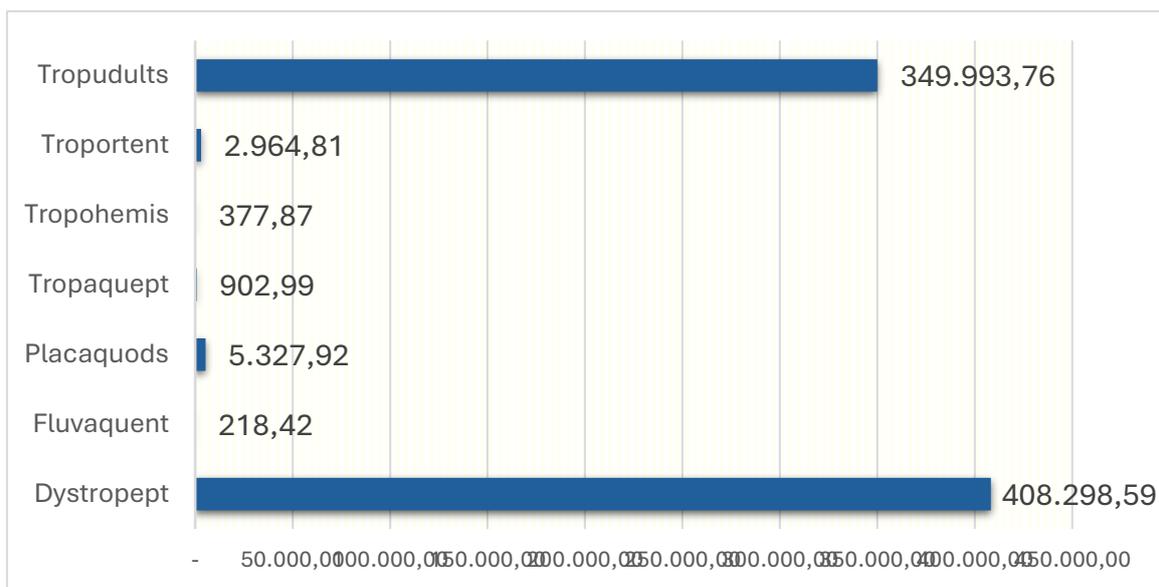
Kabupaten Lamandau terbentuk dari beberapa jenis geologi, di antaranya yaitu batuan GA berapi, batuan gunung api, batuan terobosan sintang, endapan rawa, formasi dahor, granit sukadana, dan tonalit sepauk. Berikut merupakan jenis geologi yang terdapat di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 4 Grafik Luas Wilayah menurut Jenis Geologi di Kabupaten Lamandau

Sumber: Kebijakan Satu Peta Tematik Tahun 2018 (Olah Data, 2023)

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamandau terbentuk dari granit sukadana seluas 341.928,18 Ha dan hanya sebagian kecil wilayah yang terbentuk dari batuan terobosan sintang yaitu seluas 89,28 Ha. Terdapat beberapa jenis tanah di Kabupaten Lamandau, yaitu tropudults, troportent, tropohemis, tropaquept, placaquods, fluvaquent, dan dystropept. Berikut merupakan grafik luas wilayah menurut jenis tanah di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 5 Grafik Luas Wilayah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Lamandau

Sumber: Data RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Olah Data, 2024)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jenis tanah yang paling mendominasi di Kabupaten Lamandau yaitu dystropept seluas 408.298,59 Ha, sedangkan jenis tanah yang paling jarang ditemui yaitu jenis tanah fluvaquent seluas 218,42 Ha.

2.1.2.5 Penggunaan Lahan

Terdapat berbagai jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Lamandau, di antaranya: transmigrasi, tanah terbuka, pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, pertambangan, perkebunan, pemukiman, hutan tanaman, hutan rawa sekunder, hutan lahan kering sekunder, hutan lahan kering primer, belukar rawa, belukar, dan badan air. Berikut merupakan grafik luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 6 Grafik Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Lamandau

Sumber: Olah Data, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa jenis penggunaan lahan yang mendominasi Kabupaten Lamandau yaitu hutan lahan kering sekunder seluas 368.285,97 Ha, sedangkan penggunaan lahan dengan luasan terkecil yaitu badan air seluas 417,97 Ha.

2.1.3 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

2.1.3.1 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk setempat dalam mencapai swasembada beras. Perhitungan daya dukung pertanian menggunakan produktivitas lahan. Terdapat beberapa variabel yang dijadikan pertimbangan dalam perhitungan yakni:

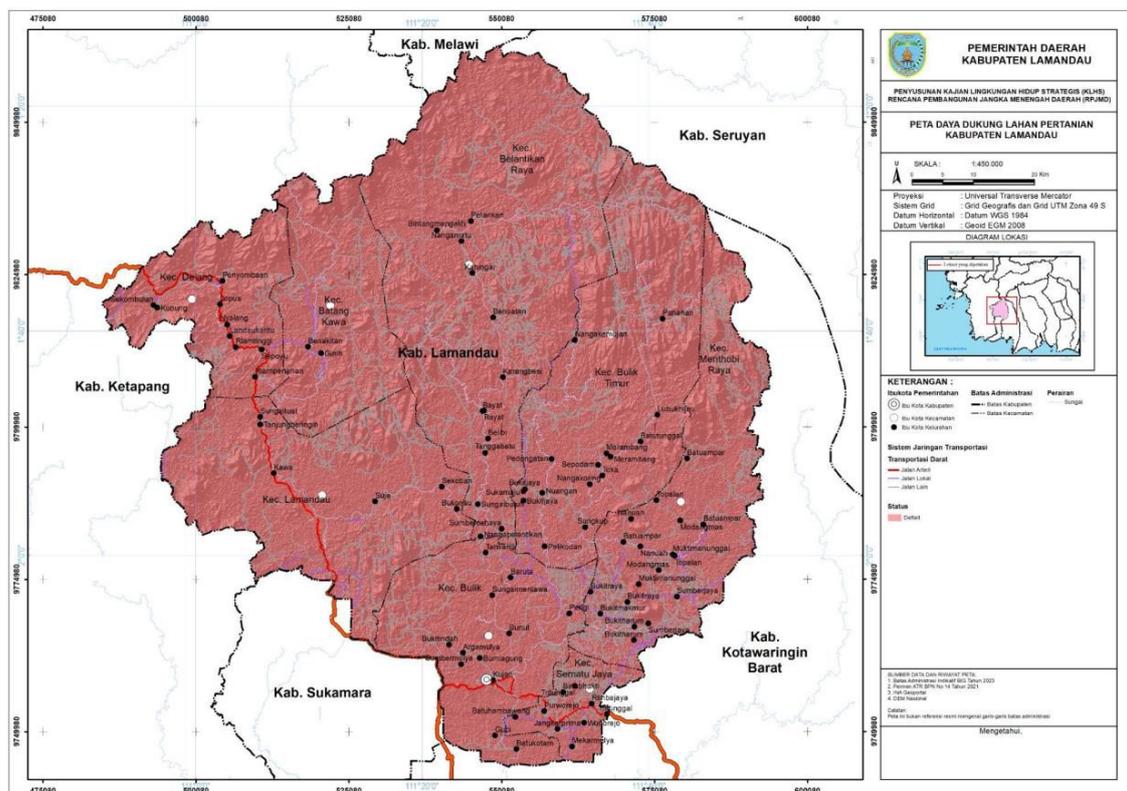
1. Luas Lahan Panen (hektar)
2. Jumlah Penduduk (jiwa)
3. Kebutuhan fisik minimum (kg/kapita/tahun)
4. Produksi rata-rata per hektar (kg/ha)

Tabel 2. 6 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Daya Dukung Pertanian	
		Defisit	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Batang Kawa	66870,14	66870,14
2	Belantikan Raya	202503,09	202503,09
3	Bulik	82286,92	82286,92
4	Bulik Timur	127341,52	127341,52
5	Delang	55568,08	55568,08
6	Lamandau	117217,05	117217,05
7	Menthobi Raya	97258,18	97258,18
8	Sematu Jaya	19039,37	19039,37
Kabupaten Lamandau		768084,36	768084,36

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa seluruh daya dukung pertanian di Kabupaten Lamandau defisit. Hal ini sejalan dengan adanya isu alih fungsi komoditas pertanian menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 7 Peta Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Lamandau

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

2.1.3.2 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung permukiman merupakan kemampuan suatu daerah dalam penyediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak (Kurniawan, 2007). Perhitungan daya dukung permukiman menggunakan dasar luasan penggunaan lahan. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan yakni:

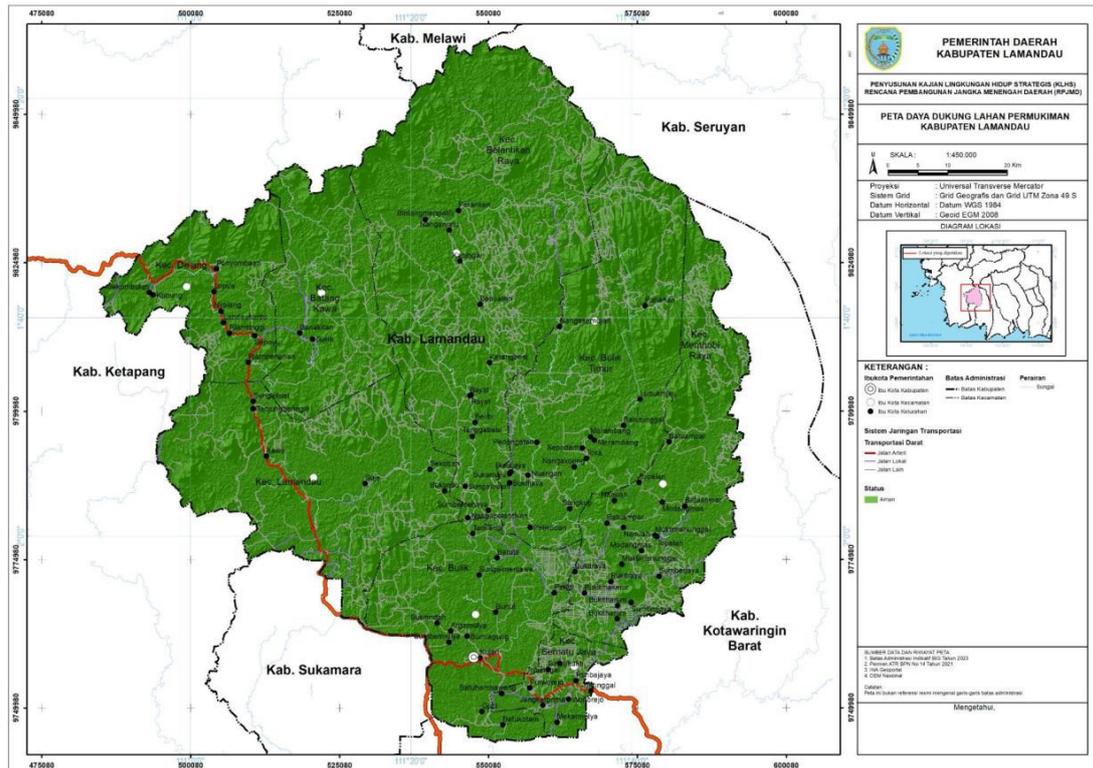
- Luas lahan layak untuk permukiman (m²)
- Jumlah penduduk (jiwa)

Tabel 2. 7 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Daya Dukung Permukiman	
		Aman	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Batang Kawa	66870,14	66870,14
2	Belantikan Raya	202503,09	202503,09
3	Bulik	82286,92	82286,92
4	Bulik Timur	127341,52	127341,52
5	Delang	55568,08	55568,08
6	Lamandau	117217,05	117217,05
7	Menthobi Raya	97258,18	97258,18
8	Sematu Jaya	19039,37	19039,37
Kabupaten Lamandau		768084,36	768084,36

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

Hasil analisis daya dukung lahan permukiman menunjukkan bahwa pada akhir tahun perencanaan, daya dukung permukiman di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau tergolong aman hingga tahun 2044, yang artinya masih dapat menyediakan lahan permukiman secara horizontal dan masih dapat menampung penduduk hingga tahun 2044.



Gambar 2. 8 Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Lamandau

Sumber: *KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029*

2.1.3.3 Daya Dukung Air

Perhitungan daya dukung air dengan membandingkan ketersediaan (SA) dan kebutuhan air (DA). Ketersediaan (supply) air dihitung menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional dengan formula.

Rumus Ketersediaan Air

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$C = \frac{\sum (c_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$R = \frac{\sum R_i}{m}$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

R = rata-rata curah hujan tahunan (mm/ tahunan)

Rumus Kebutuhan Air

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

DA = Total kebutuhan air (m³ / tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak (1600 m³ air / tahun)

Rumus Daya Dukung Air

$$DDA = SA / DA$$

Keterangan:

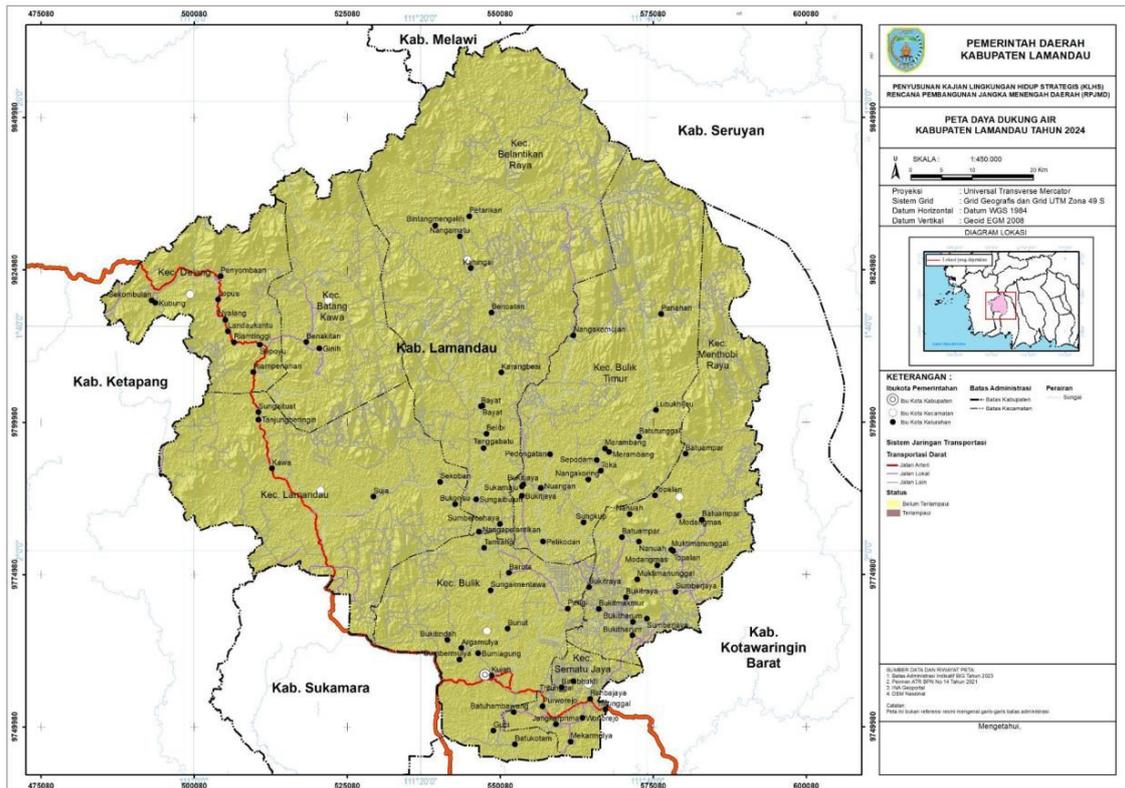
- 1) DDA < 1 = Daya dukung air terlampaui atau buruk
- 2) DDA 1-3 = Daya dukung air aman bersyarat atau sedang
- 3) DDA > 3 = Daya dukung air aman atau baik

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air terlampaui yakni Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Mentohi Raya. Namun apabila dilihat dari luasnya, luasan dari daerah yang memiliki daya dukung air terlampaui masih cukup kecil dibandingkan luasan wilayah kecamatan.

Tabel 2. 8 Daya Dukung Air di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Total Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batang Kawa	66869,93	0,21	66870,14
2	Belantikan Raya	202503,09		202503,09
3	Bulik	82286,14	0,78	82286,92
4	Bulik Timur	127341,56		127341,56
5	Delang	55567,49	0,59	55568,08
6	Lamandau	117215,50	1,55	117217,05
7	Mentohi Raya	97258,04	0,11	97258,15
8	Sematu Jaya	19039,37		19039,37
Kabupaten Lamandau		768081,12	3,24	768084,36

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029



Gambar 2. 9 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

2.1.3.4 Proyeksi Daya Dukung Air

Selain kondisi daya dukung air pada kondisi eksisting, kondisi daya dukung air semasa dan akhir dari RPJMD perlu dilakukan analisis untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi. Hasil dari proyeksi daya dukung air disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Proyeksi Daya Dukung Air

Tahun	Proyeksi Daya Dukung Air			
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	Persentase Sudah Terlampaui (%)	Keterangan Sudah Terlampaui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2024	768081,12	3,24	0,000%	
2025	768080,16	4,21	0,001%	Meningkat
2026	768076,89	7,47	0,001%	Meningkat
2027	768073,56	10,80	0,001%	Meningkat
2028	767695,73	388,63	0,051%	Meningkat
2029	767693,27	391,09	0,051%	Meningkat

Tahun	Proyeksi Daya Dukung Air			
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	Persentase Sudah Terlampaui (%)	Keterangan Sudah Terlampaui
Perubahan 2024-2029	-387,85	387,85		

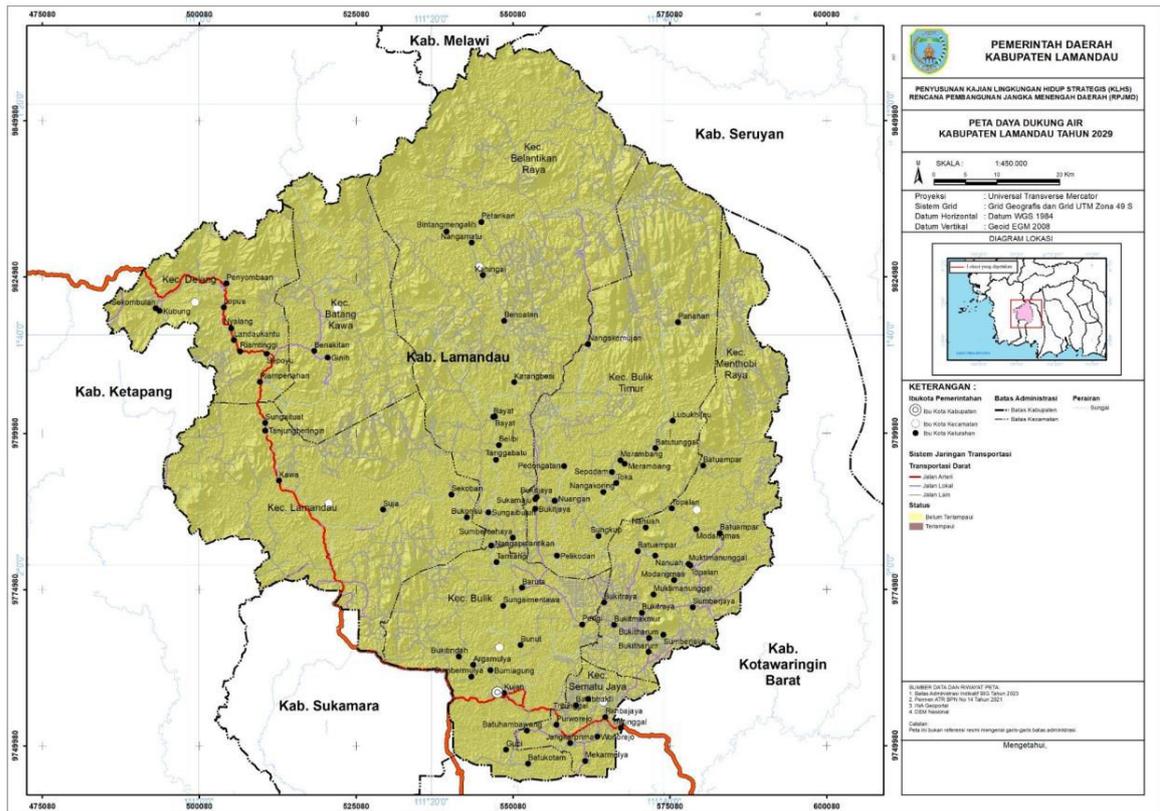
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

Hasil dari proyeksi menunjukkan adanya tren klasifikasi sudah terlampaui yang meningkat. Apabila dilakukan identifikasi pada tiap kecamatannya, kecamatan dengan daya dukung air terlampaui terbesar adalah di Kecamatan Belantikan Raya dan Bulik Timur. Apabila akumulasi total daya dukung air terlampaui pada tahun 2029 adalah sebesar 0,05% dari luasan lahan Kabupaten Lamandau. Detail proyeksi daya dukung air pada tiap kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Proyeksi Daya Dukung Air pada Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Terlampaui 2024	Terlampaui 2029	Peningkatan (ha)	Distribusi Perubahan (%)	Persentase Terlampaui 2029 terhadap Luas Wilayah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Batang Kawa	0,21	0,74	0,52	0,14%	0,00%
2	Belantikan Raya		143,22	143,22	36,93%	0,07%
3	Bulik	0,78	7,27	6,49	1,67%	0,01%
4	Bulik Timur		134,42	134,42	34,66%	0,11%
5	Delang	0,59	2,63	2,04	0,52%	0,00%
6	Lamandau	1,55	75,33	73,78	19,02%	0,07%
7	Menthobi Raya	0,11	27,48	27,37	7,06%	0,03%
8	Sematu Jaya			0,00	0,00%	0,00%
Kabupaten Lamandau		3,24	391,09	387,85	100,00%	0,05%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029



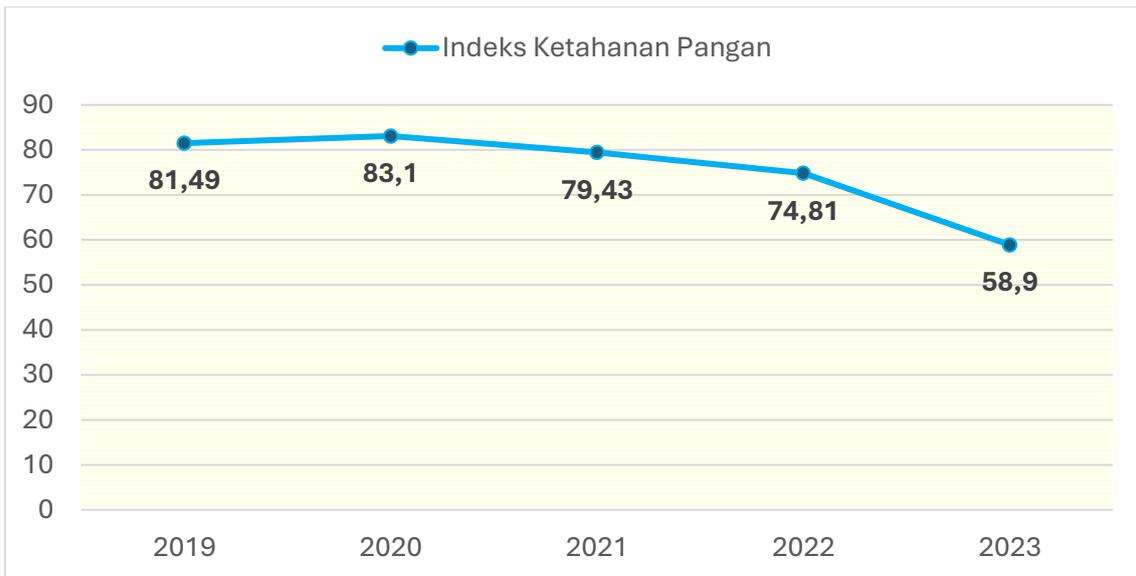
Gambar 2. 10 Peta Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Lamandau Tahun 2029

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kinerja penyelenggaraan pangan di Kabupaten Lamandau dilihat dari indeks ketahanan pangan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau mengalami tren pertumbuhan fluktuatif cenderung turun selama tahun 2019 hingga data termutakhir tahun 2023. Penurunan paling drastis terjadi tahun 2022 ke 2023 sebesar 15,91. Kondisi ini didukung oleh capaian beberapa indikator komponen indeks ketahanan pangan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks ketersediaan	84,89	87,37	73,91	61,33	5,97
Indeks keterjangkauan	92,43	92,07	93,02	92,72	90,19
Indeks pemanfaatan	70,74	73,18	73,38	71,49	75,13
Ketersediaan pangan utama (ton)	8.355	10.462	11.154	11.564	10.883
Skor PPH Ketersediaan	92,38	92,61	94,34	95,53	96,12
Skor PPH Konsumsi	91,4	92,0	91,2	91,20	91,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

Kondisi penurunan indeks ketahanan pangan salah satunya disebabkan oleh penurunan indeks ketersediaan pada tahun 2023 yang menurun drastis sebesar 55,36 poin. Secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih lemahnya akses data

dan informasi harga, jumlah penduduk rawan pangan dan daerah rawan bencana masih besar, keterjangkauan pangan masyarakat belum merata, dan sumber daya manusia bersertifikat keamanan pangan masih sangat kurang dan belum merata.

2.1.4.2 Akses Listrik

Listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk energi yang lain seperti energi mekanik, energi panas, energi cahaya, energi suara, dan berbagai bentuk energi yang lain yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat. Akses listrik di Kabupaten Lamandau masih belum merata. Kondisi ini dapat dilihat melalui rasio elektrifikasi Kabupaten Lamandau tahun 2024 yakni sebesar 73,88 persen, sekitar 9.433 rumah tangga masih belum dapat menikmati listrik.

Tabel 2. 12 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2024

Kecamatan	Rasio Elektrifikasi PLN (%)	Rasio Elektrifikasi Non PLN (%)	Rasio Elektrifikasi (%)	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
Bulik	94,27	0	94,27	92,86
Sematu Jaya	86,75	0	86,75	100
Delang	53,06	0	53,06	63,64
Lamandau	33,83	7,31	41,13	63,64
Belantikan Raya	44,60	8,77	53,37	69,23
Menthobi Raya	76,87	0	76,87	81,82
Bulik Timur	47,69	4,49	52,18	66,67
Batang Kawa	0	7,72	7,72	11,11
Total	71,81	2,07	73,88	69,66

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, 2024

Layanan listrik di Kabupaten Lamandau bersumber dari layanan listrik PLN dan Non PLN. Akses listrik PLN mencapai 71,81 persen atau sekitar 25.9321 rumah tangga telah mengakses listrik PLN. Akses listrik di Kabupaten Lamandau didukung dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Namun demikian, beberapa pembangkit tenaga listrik berupa PLTS dan PLTMH banyak yang mengalami kerusakan.

Tabel 2. 13 Infrastruktur Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau

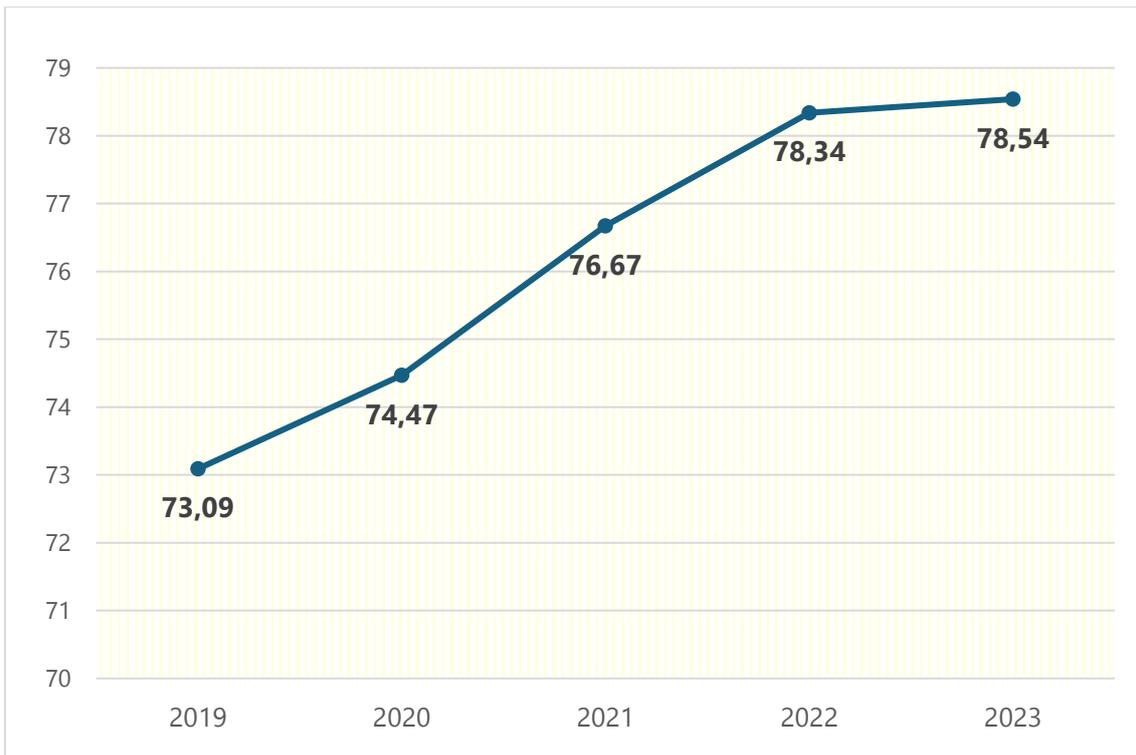
No.,	Jenis Pembangkit	Jumlah	Lokasi
1.	PLTD	8	Delang, Menthobi Raya, Bulik, Lamandau
2.	PLTS	5	Belantikan Raya, Bulik Timur, Menthobi Raya
3.	PLTMH	2	Belantikan Raya, Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2024-2044

Rencana pengembangan pembangkit listrik di Kabupaten Lamandau juga diarahkan pada pengembangan pembangkit listrik tenaga bioenergi melalui pemanfaatan limbah cair kelapa sawit (POME). Rencana pengembangan ini diarahkan pada Desa Belibi di Kecamatan Belantikan Raya, Kelurahan Nanga Bulik di Kecamatan Bulik, Desa Bakonsu di Kecamatan Lamandau, dan Desa Bukit Harum di Kecamatan Menthobi Raya.

2.1.4.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Air minum dapat dikatakan layak jika air minum rumah tangga tersebut telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan tetapi telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kondisi akses masyarakat terhadap air minum layak dapat ditunjukkan melalui indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak.



Gambar 2. 12 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum

Sumber Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pertanian, 2024

Persentase akses rumah tangga terhadap air minum di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2019 hingga 2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,36 persen per tahun. Akses air minum berupa jaringan perpipaan PDAM hanya dapat diakses di Nanga Bulik, Kujan, Sematu Jaya, Batu Hambawang, dan Purwareja. Akses air minum lainnya memanfaatkan perpipaan gravitasi dan sumur gali.



Gambar 2. 13 Sumber Air di Kampung Transmigrasi Kahingai

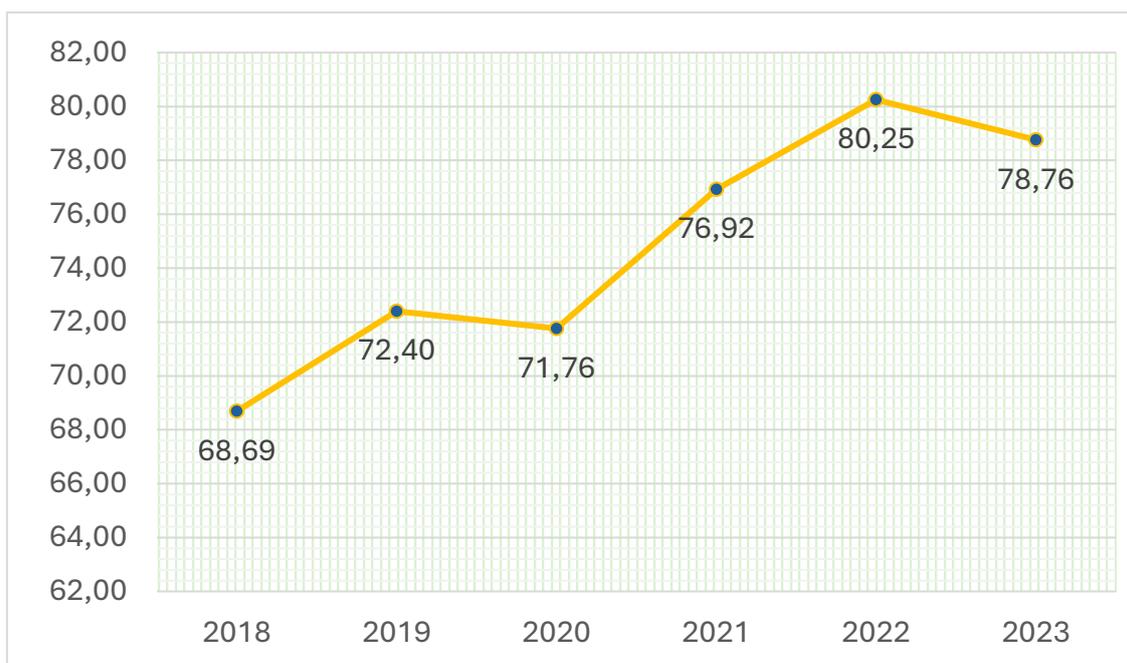
Sumber: Dokumentasi, 2024

Kabupaten Lamandau masih memerlukan penambahan SPAM dengan kebutuhan rata-rata sebesar 421 lt/detik atau kebutuhan maksimum per hari 496 lt/detik (RTRW Kabupaten Lamandau 2024-2044). Untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Lamandau hingga tahun 2029 dibutuhkan penambahan prasarana air bersih berupa SPAM. Penyediaan air minum di Kabupaten Lamandau di masa yang akan datang tidak hanya diarahkan kepada air minum layak melainkan juga air minum aman. Akses terhadap air minum aman

pada tahun 2023 baru mencapai 35,74 persen. Akses terhadap air minum layak dan aman di Kabupaten Lamandau masih perlu untuk ditingkatkan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lamandau dapat digambarkan melalui data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Komponen dalam IKLH terdiri dari indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Berikut adalah data mengenai indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lamandau.

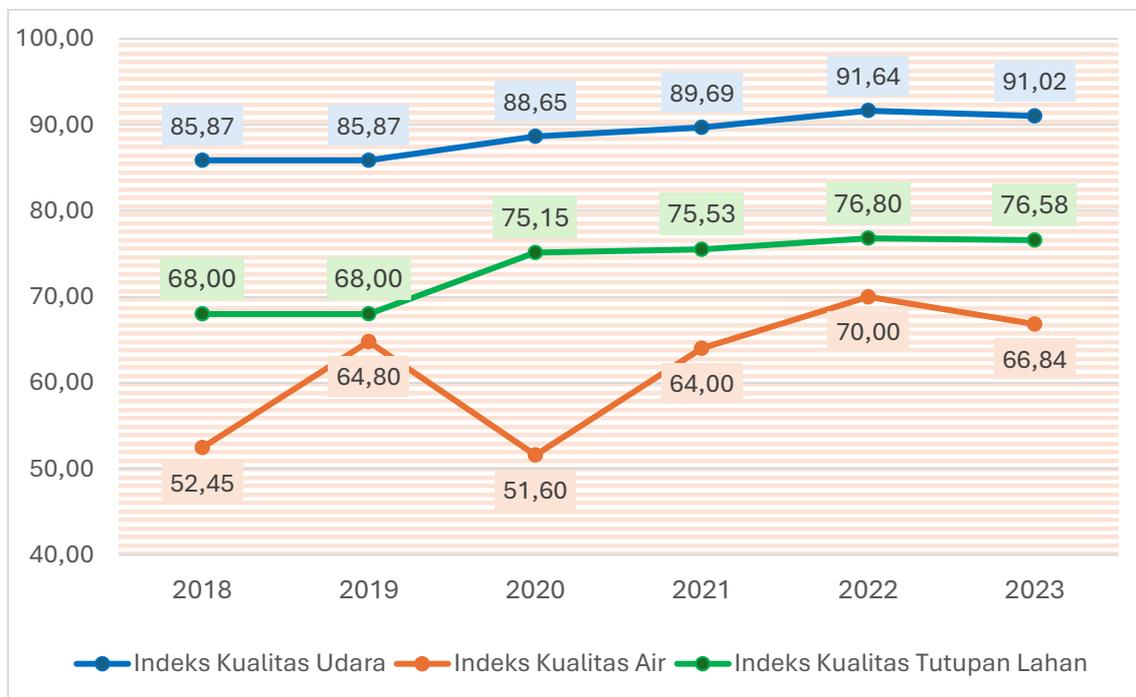


Gambar 2. 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Tren IKLH Kabupaten Lamandau cenderung mengalami peningkatan selama 2018-2023. Namun demikian, IKLH mengalami penurunan pada tahun 2023 tetapi masih dalam kategori BAIK. Capaian IKLH Lamandau menempati peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. IKLH Kabupaten

Lamandau dipengaruhi oleh kualitas udara, air dan tutupan lahan. Kebakaran dan pencemaran sungai menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 15 Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lamandau 2018-2023

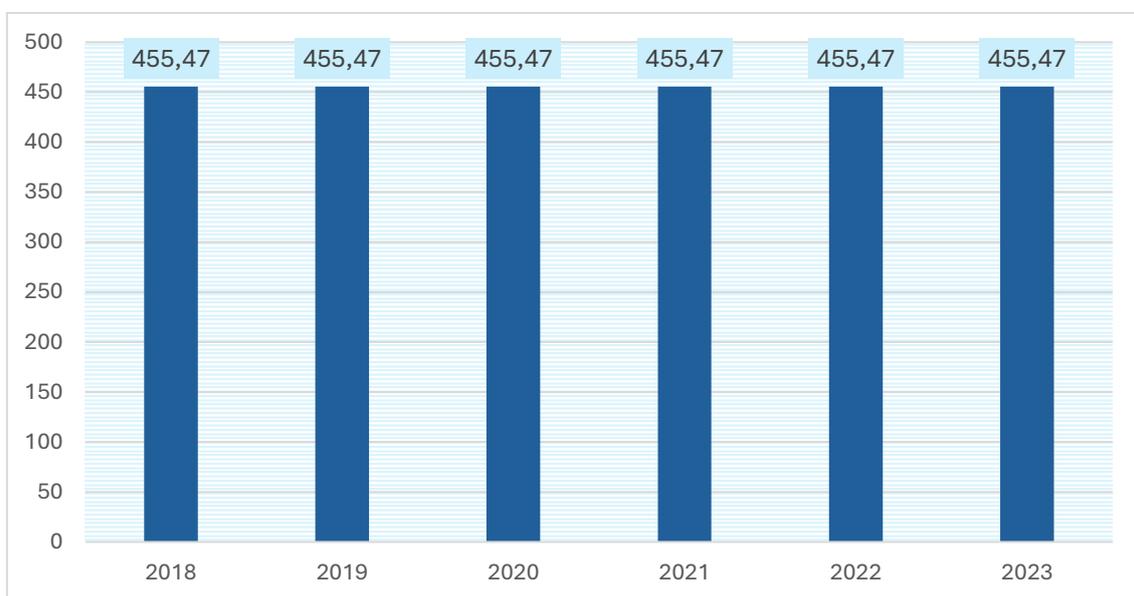
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Secara umum, Indeks Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 hingga 2023. Adapun Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi. Lebih dari itu, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Lamandau memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dua komponen pembentuk IKLH yang lain. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen sumber daya air serta pencemaran sungai.

Kualitas tutupan lahan juga dipengaruhi oleh luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan ruang terbuka hijau di setiap daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

RTH dapat bersifat publik maupun privat, yang keberadaannya minimal sebesar 30% dari total luas kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal sebesar 20%, dan RTH privat minimal 10%. RTH di Kabupaten Lamandau selama tahun 2018 hingga 2023 mempunyai luasan yang tetap. Data RTH di Kabupaten Lamandau disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2. 16 Luasan RTH di Kabupaten Lamandau 2018-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Luasan RTH tersebut perlu dilakukan upaya pendataan agar dapat mengakomodir ketercapaian kebutuhan RTH kabupaten sesuai regulasi. Luasan RTH tersebut tentunya perlu untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ketersediannya, dengan harapan dapat membantu menjadi zona resapan air, sebagai peneduh dan juga menjaga iklim mikro serta sirkulasi udara di Kabupaten Lamandau.

Selain RTH, kondisi lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh pengelolaan persampahan yang baik. Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu

maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengumpulan sampah dari fasilitas umum, pengangkutan sampah, dan penanganan sampah. Berikut disajikan data capaian indikator persampahan.

Tabel 2. 14 Indikator Persampahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Volume Sampah (per tahun)	14.243	14.891	15.150	15.201	15.250
Volume Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dikurangi	1.964	2.886	2.627	2.875	2.923
Volume Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ditangani	8.760	10.319	10.730	11.614	12.167
Jumlah Bank Sampah	0	0	1	1	1
Persentase Cakupan Pelayanan Sampah	69%	71%	74%	77%	79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Volume timbulan sampah di Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan. Namun demikian, upaya pengurangan sampah masih belum optimal, yakni hanya mencapai 19,16 persen pada tahun 2023. Pola operasional penanganan sampah Kabupaten Lamandau masih bertumpu pada penanganan sampah berdasarkan volume sampah yang naik setiap tahun. Pola tersebut belum sampai kepada pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di TPS. Bank sampah menjadi salah satu upaya agar pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau dapat terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada tahun 2021 sudah terdapat 1 bank sampah, namun belum ada kenaikan hingga tahun 2023. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang masih terbatas, berimplikasi terhadap masih belum optimalnya capaian tersebut. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah

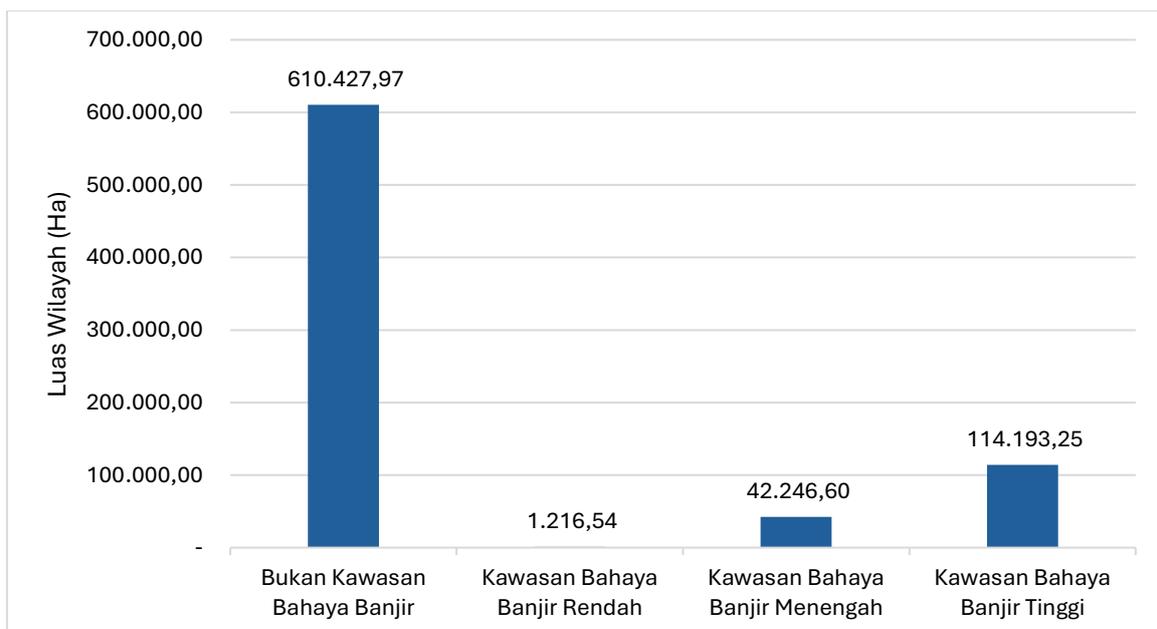
juga diindikasikan menjadi penyebab lain. Inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah perlu dikembangkan, guna mencegah dan mengurangi dampak negatif sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi. Kabupaten Lamandau memiliki beberapa bahaya bencana, di antaranya: banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan.

2.1.6.1 Bahaya Bencana Banjir

Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 4 kawasan bahaya bencana banjir, yaitu bukan kawasan bahaya banjir, kawasan bahaya bencana banjir rendah, kawasan bahaya banjir menengah, dan kawasan bahaya banjir tinggi.



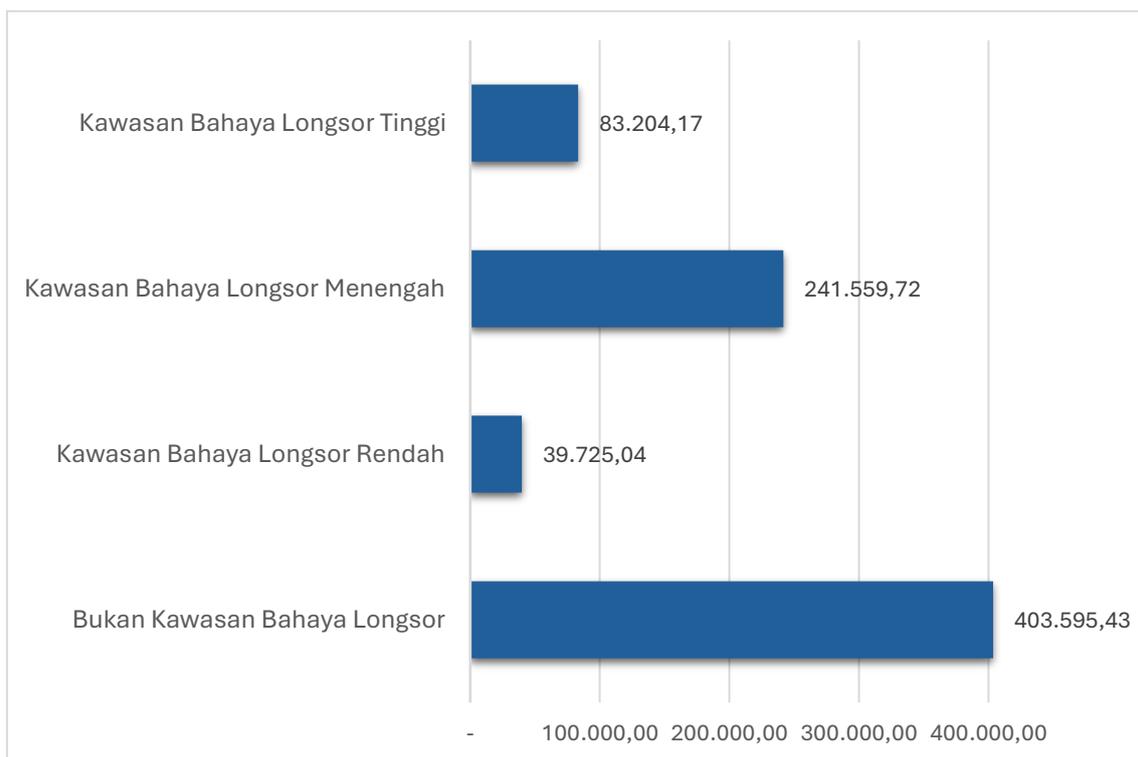
Gambar 2. 17 Grafik Luas Wilayah menurut Bahaya Bencana Banjir Kabupaten Lamandau

Sumber: Olah Data, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lamandau merupakan bukan kawasan bahaya bencana banjir tinggi seluas 610.427,97 Ha, sedangkan wilayah yang merupakan kawasan bahaya bencana banjir tinggi seluas 114.193,25 Ha. Meskipun luasan kawasan bahaya banjir tergolong rendah, tetap harus diantisipasi dengan mitigasi bencana yang lebih tepat sasaran. Kawasan bahaya banjir tinggi meliputi daerah di sepanjang Sungai Lamandau yang rawan luapan air sungai ketika hujan dengan intensitas tinggi.

2.1.6.2 Bahaya Bencana Tanah Longsor

Bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu bukan kawasan bahaya bencana tanah longsor, kawasan bahaya bencana tanah longsor rendah, kawasan bahaya bencana tanah longsor menengah, dan kawasan bahaya bencana tanah longsor tinggi.



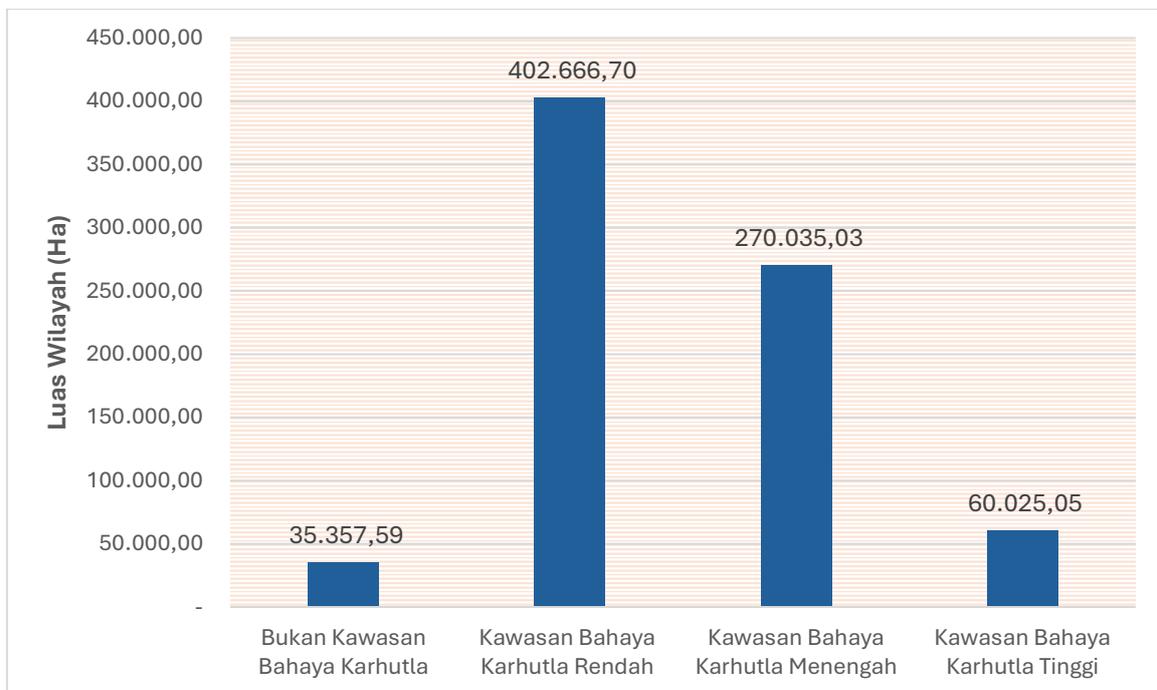
Gambar 2. 18 Luas Wilayah menurut Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lamandau

Sumber: Olah Data, 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lamandau bukan merupakan kawasan bahaya tanah longsor seluas 403.595,43 Ha, sedangkan wilayah yang merupakan kawasan bahaya tanah longsor terluas pada kategori menengah yaitu seluas 241.559,72 Ha.

2.1.6.3 Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu bukan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan, kawasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan rendah, kawasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan menengah, dan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi.



Gambar 2. 19 Luas Wilayah Menurut Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Sumber: Olah Data, 2023

Grafik bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lamandau merupakan kawasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan rendah seluas 402.666,7 Ha, sedangkan hanya sebagian kecil wilayah yang merupakan bukan kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan seluas 35.357,59 Ha. Persoalan ini mengindikasikan

masih perlu ditingkatkannya penanganan karhutla melalui serangkaian adaptasi dan mitigasi yang terpadu mulai dari penguatan regulasi hingga pencegahan dan pendampingan.

2.1.7 Demografi

Aspek demografi di Kabupaten Lamandau bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Lamandau. Demografi di Kabupaten Lamandau mencakup data terkait jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Data eksisting terkait demografi akan menjadi dasar pada proyeksi kependudukan selama lima tahun kedepan di Kabupaten Lamandau.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan data yang menunjukkan jumlah masyarakat yang bermukim pada suatu daerah. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi, sehingga tren jumlah penduduk akan berubah seiring waktu. Sedangkan, laju pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk yang cepat bisa menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, serta sumber daya alam dan lingkungan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang lambat juga memengaruhi struktur usia penduduk yang berpotensi menimbulkan masalah dalam sistem tenaga kerja.



Gambar 2. 20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

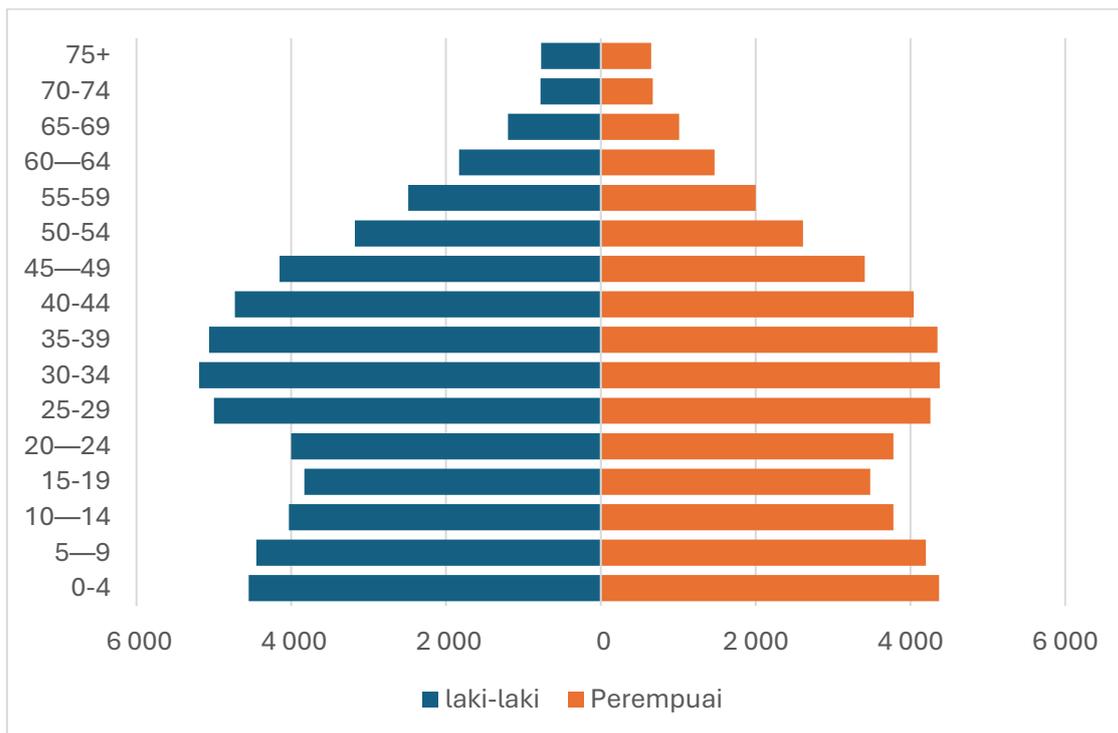
Sumber : BPS dalam angka Kabupaten Lamandau, 2025

Jumlah penduduk kabupaten Lamandau tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Lamandau justru mengalami penurunan. Meskipun jumlah penduduk mengalami peningkatan namun laju pertumbuhan penduduk justru mengalami penurunan setelah puncaknya pada tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berkurangnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti migrasi, tingkat kelahiran yang menurun, dan program-program pengendalian kelahiran mulai memberikan dampak yang signifikan, serta migrasi keluar daerah yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.1.7.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengelompokan dapat berdasarkan pada kondisi geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat melalui kelompok usia dan

jenis kelamin dan mengindikasikan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, bonus demografi, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah. Komposisi penduduk di Kabupaten Lamandau berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2024

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, 2025

Piramida penduduk di Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 tergolong dalam kategori stasioner yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil. Jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau yang masuk dalam kategori usia produktif sebesar 70,63 persen atau sebanyak 73.240 jiwa, terdiri dari 33.780 penduduk perempuan dan 39.460 penduduk laki-laki. Penduduk yang berada dalam usia non produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 24,47 persen, sedangkan kelompok usia non produktif lansia hanya 4,90 persen dari total keseluruhan. Piramida penduduk tersebut menunjukkan

bahwa Kabupaten Lamandau sedang dalam fase bonus demografi. Bonus demografi menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Lamandau, namun bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Lamandau ke depannya.

Rasio penduduk juga merupakan salah satu alat untuk melihat komposisi penduduk di suatu wilayah. Rasio penduduk di Kabupaten Lamandau bisa dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan jumlah penduduk dapat dilihat melalui data *sex ratio* yang menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. *Sex Ratio* dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan *Sex Ratio* dengan data awal tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau Berdasarkan Sex Rasio Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	54.115	47.883	101.998	113,02
2021	55.226	48.896	104.122	112,95
2022	56.741	50.350	107.091	112,69
2023	58.260	51.872	110.132	112,31
2024	55.230	48.440	103.680	114,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, 2025

Angka *sex ratio* di Kabupaten Lamandau secara kontinyu mengalami tren yang menurun pada rentang tahun 2020 hingga 2023, namun pada tahun 2024 *sex rasio* Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan pada angka 114. Penurunan angka *sex ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2023, yakni selisih 0,38 poin dibandingkan data *sex ratio* pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Angka *sex ratio* yang mencapai 114,00 pada tahun 2024 menunjukkan adanya 114 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kabupaten Lamandau. Semakin rendah angka *sex ratio* di suatu wilayah, maka semakin sedikit pula

jumlah laki-laki pada wilayah tersebut. Penurunan angka sex ratio yang semakin mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Lamandau. Penurunan angka *sex ratio* yang cukup tinggi memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kabupaten Lamandau, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah.

Selain struktur dan rasio penduduk, kepadatan penduduk juga digunakan untuk melihat komposisi penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Hasil dari perhitungan indikator tersebut adalah gambaran bentuk penyebaran dan merata tidaknya penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lamandau pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Bulik	802,66	39.731	49,5	40.593	50,57	42.382	52,8	43.705	54,45	40.890	53
Sematu Jaya	190,39	13.891	72,96	14.107	74,1	14.511	76,22	14.656	76,98	13.630	20
Menthobi Raya	970,39	12.668	13,05	12.735	13,12	13.039	13,44	13.263	13,67	12.510	20
Bulik Timur	1273,42	8.394	6,59	8.516	6,69	8.658	6,8	8.998	7,07	9.950	18
Lamandau	1143,92	10.041	8,78	10.667	9,32	11.145	9,74	11.652	10,19	10.040	7
Belantikan Raya	2025,03	8.156	4,03	8.225	4,06	8.209	4,05	8.498	4,2	7.930	9
Delang	555,68	6.102	10,98	6.183	11,13	6.073	10,93	6.231	11,21	5.960	8
Batangkawa	668,7	3.014	4,51	3.096	4,63	3.074	4,6	3.129	4,68	2.760	4
Kabupaten Lamandau	7.630,20	101.997	13,37	104.122	13,65	107.091	14,04	110.132	14,43	103.670	14

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lamandau mengalami tren yang meningkat pada rentang waktu 2020 hingga 2024. Penurunan kepadatan penduduk terjadi di Kecamatan Bulik, Lamandau, Delang, dan Batangkawa. Kecamatan Bulik merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, dimana kepadatannya mencapai 53 jiwa per kilometer persegi. Di sisi lain, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Batangkawan yang hanya mencapai 4 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan tingkat kepadatan tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah yang berbeda di setiap kecamatan.

Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau yang diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2023 adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak. Perda tersebut memberikan pedoman, pengakuan, dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Dayak di Kabupaten Lamandau. Masyarakat hukum adat Dayak terbagi kembali menjadi sub suku di bawahnya, seperti Masyarakat Adat Dayak Tomun yang menetap di Desa Kubung di Kecamatan Delang dan Desa Kinipan di Kecamatan Batangkawa.

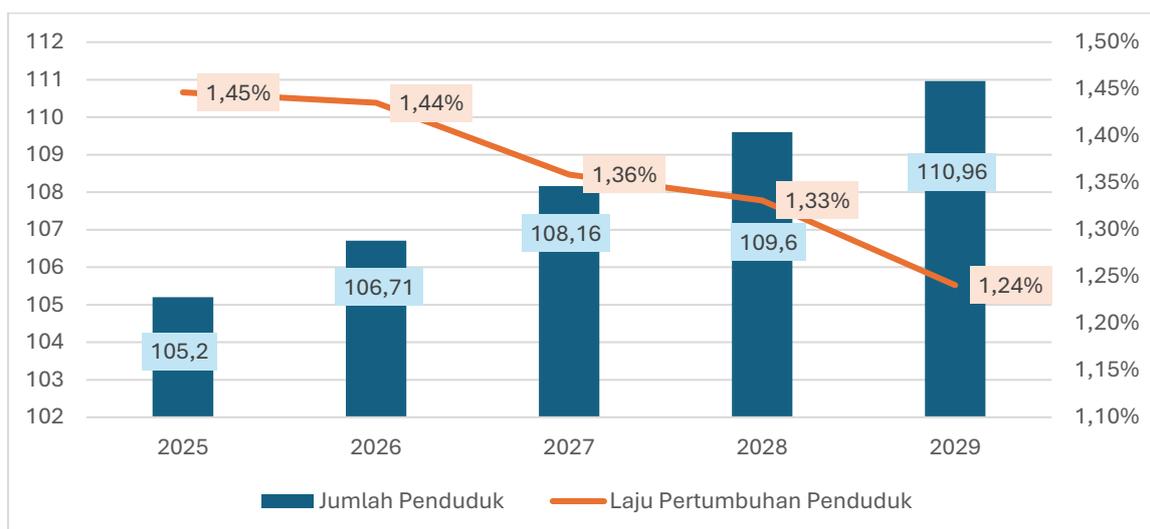
2.1.7.3 Proyeksi Demografi

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Lamandau. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk

mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Lamandau selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kabupaten Lamandau pada tahun 2025 hingga 2029.



Gambar 2. 22 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk namun mengalami penurunan dari segi laju pertumbuhan penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau diproyeksikan bertambah sebanyak 5,76 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dengan

rata-rata 1,36 persen pada tahun 2025-2029. Hasil proyeksi tersebut tetap mempertimbangkan *total fertility rate* (TFR) yang berada pada angka 2,17. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kabupaten Lamandau akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,17 mengindikasikan rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Lamandau melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamandau.

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten Lamandau memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2025-2029.

Tabel 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2025 - 2029

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Bulik	802,66	37.836	50,636	51,485	52,321	53,113	53,881
2	Sematu Jaya	190,39	13.256	75,780	76,562	77,356	78,122	78,889
3	Menthobi Raya	970,39	12.101	13,455	13,599	13,741	13,877	14,007
4	Bulik Timur	1.273,42	8.003	6,868	6,969	7,064	7,160	7,254
5	Lamandau	1.143,92	9.561	8,933	9,092	9,245	9,391	9,529
6	Belantikan Raya	2.025,03	7.752	4,167	4,223	4,278	4,332	4,386
7	Delang	555,68	5.810	11,769	11,877	11,989	12,095	12,203
8	Batangkawa	668,70	2.873	4,693	4,747	4,796	4,853	4,905
Kabupaten Lamandau		7.630,20	97.192	13,789	13,984	14,176	14,360	14,540

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lamandau terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari 8 kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, dan Kecamatan Mentohi Raya. Tingginya kepadatan penduduk di tiga kecamatan tersebut disebabkan oleh alasan yang berbeda, yakni Kecamatan Bulik sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, Kecamatan Sematu Jaya yang memiliki luas wilayah terkecil ketiga di Kabupaten Lamandau, dan Kecamatan Mentohi Raya yang didominasi oleh area perkebunan sehingga mengundang penduduk untuk bertempat tinggal berdekatan dengan area perkebunan. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Batangkawa.

Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena perkotaan selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kabupaten Lamandau. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan dapat diminimalisir di Kabupaten Lamandau.

2. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk berdasarkan umur krusial untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun atau dikategorikan pula sebagai penduduk yang berada pada usia kerja. Persentase penduduk usia produktif yang tinggi menuntut pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi dari penduduk usia produktif. Potensi yang dimiliki oleh penduduk kelompok usia produktif mampu mendatangkan kesejahteraan bagi wilayah terkait, namun apabila tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi permasalahan yang tidak kalah luar biasa. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia produktif pada rentang tahun 2025 hingga 2029 di Kabupaten Lamandau.

Tabel 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lamaundau Tahun 2025 – 2029 (ribu jiwa)

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	25,62	25,84	26,01	26,14	26,24
15-64	74,22	75,2	76,16	77,1	78
65+	5,36	5,67	5,99	6,36	6,72
Angka ketergantungan	41,74%	41,90%	42,02%	42,15%	42,26%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan sebanyak 74,22 ribu jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,27 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun

2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Lamandau. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 70,30 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada. Apabila kuantitas tidak sejalan dengan kualitas, maka dapat berpotensi menghadirkan permasalahan kependudukan dan turunannya di masa yang akan datang di Kabupaten Lamandau.

3. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan didefinisikan sebagai suatu indikator yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja di suatu wilayah. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk usia produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Angka ketergantungan Kabupaten Lamandau menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Angka ketergantungan pada tahun 2025, yaitu sebesar 41,74 persen dan meningkat menjadi 42,26 persen pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 42 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak

produktif pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 43 penduduk pada tahun 2029. Implikasi dari beban tanggungan yang terus bertambah adalah adanya potensi perlambatan kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif.

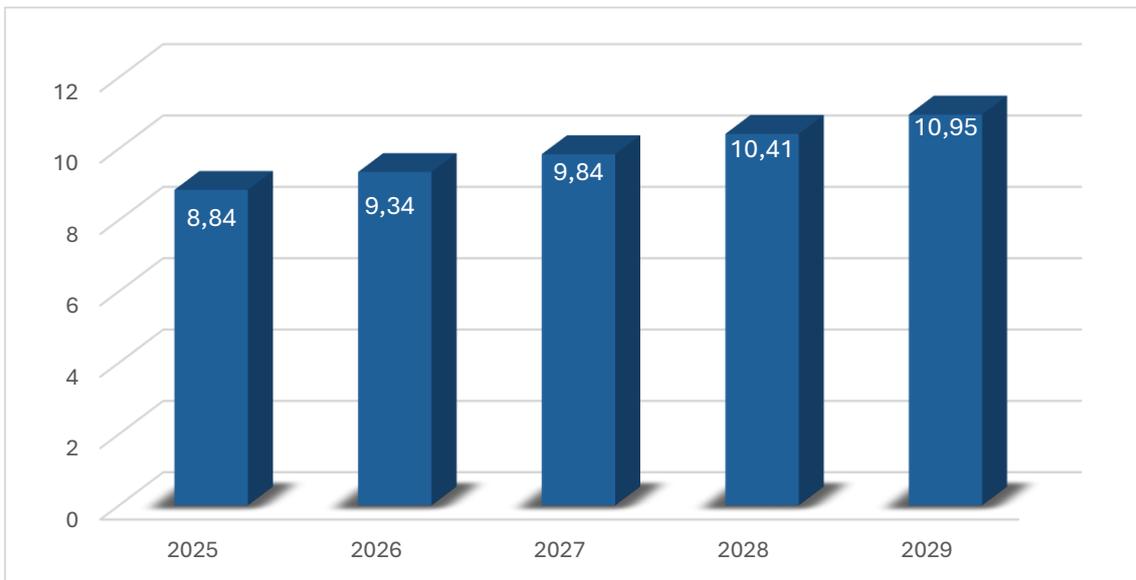
Meningkatnya angka ketergantungan di Kabupaten Lamandau disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif, yakni selisih 0,32 persen. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 25,62 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 26,24 ribu jiwa pada tahun 2029. Selain itu, jumlah penduduk usia non produktif 65 tahun ke atas juga mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Lamandau ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

4. Bonus Demografi

Bonus demografi dimaknai sebagai masa di mana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Proporsi tersebut dapat dilihat melalui hasil proyeksi komposisi penduduk di Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. Selain dari aspek komposisi penduduk, bonus demografi di Kabupaten Lamandau juga dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dimiliki. Kabupaten Lamandau dianggap mendapatkan bonus demografi apabila angka ketergantungannya di bawah 45 persen. Data hasil proyeksi komposisi penduduk dan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau sedang menghadapi fase bonus demografi. Kabupaten Lamandau harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal.

5. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Lamandau berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kabupaten Lamandau pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 23 Proyeksi Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029 (ribu jiwa)

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

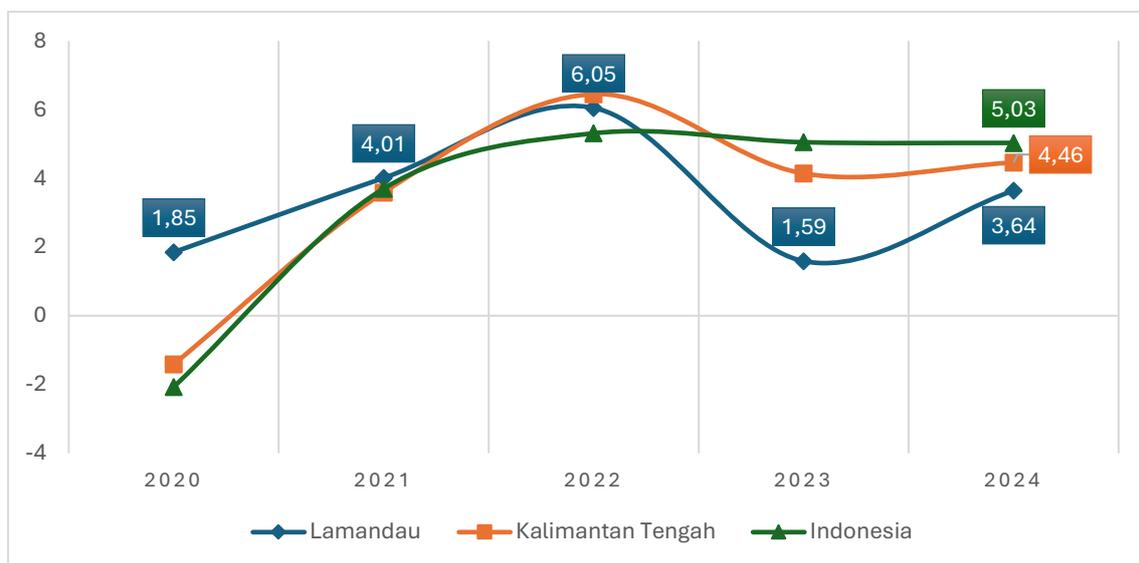
Pada tahun 2025 jumlah lansia sebanyak 8,84 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan hingga menjadi 10,95 ribu jiwa pada tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5,50 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau karena pemerintah harus memiliki kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk lansia, tidak hanya menyediakan perlindungan sosial yang memadai, namun juga memberikan dukungan untuk meningkatkan keberdayaan lansia.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas perekonomian di suatu daerah berjalan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun bersangkutan (t) terhadap tahun sebelumnya ($t-1$). Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka mengindikasikan pembangunan ekonomi yang semakin baik.



Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah dari BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang meningkat meskipun berfluktuasi pada tahun 2020-2024. Perekonomian Kabupaten Lamandau tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Perekonomian Kabupaten Lamandau rata-rata tumbuh 3,43 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah 3,45 persen, dan Indonesia 3,40 persen. Perekonomian Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan

Tengah sama-sama mengalami perlambatan pada tahun 2023 dan kembali menguat pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau tumbuh 3,64 persen pada tahun 2024 mendorong nilai PDRB ADHK daerah mencapai 4,43 triliun rupiah.

Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,50	5,24	5,36	6,10	0,46	4,13
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,32	0,75	0,31	-29,70	6,21	-5,75
C	Industri Pengolahan	5,52	7,26	12,92	8,34	-0,52	6,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	6,35	8,86	9,68	7,99	8,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,03	-0,13	8,02	14,87	18,72	9,90
F	Konstruksi	-10,15	7,49	8,24	7,75	8,10	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,06	2,71	7,24	7,86	6,34	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	5,33	2,85	5,50	4,44	6,72	4,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,66	2,08	6,92	7,04	6,44	3,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,60	13,22	9,85	4,34	6,33	8,27
K	Jasa Keuangan	8,84	9,64	5,75	5,99	3,56	6,76
L	Real Estate	4,94	1,72	2,20	4,75	3,67	3,46
M, N	Jasa Perusahaan	-0,92	2,09	4,09	9,60	5,53	4,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,77	-5,37	5,01	3,33	7,96	4,34
P	Jasa Pendidikan	8,12	-0,10	2,33	1,82	7,61	3,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,50	7,79	4,34	8,60	5,48	6,94
R,S, T,U	Jasa Lainnya	5,70	0,06	3,68	8,27	4,96	4,53
Produk Domestik Regional Bruto		1,85	4,01	6,05	1,59	3,64	3,43

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

Perekonomian Kabupaten Lamandau digerakkan oleh seluruh sektor dengan kontribusi yang bervariasi. Tiga sektor dengan kontribusi terbesar

terhadap perekonomian daerah yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Nilai tambah yang dihasilkan ketiga sektor tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau. Hal ini tercermin dari fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung mengikuti pergerakan laju pertumbuhan PDRB ketiga sektor tersebut.

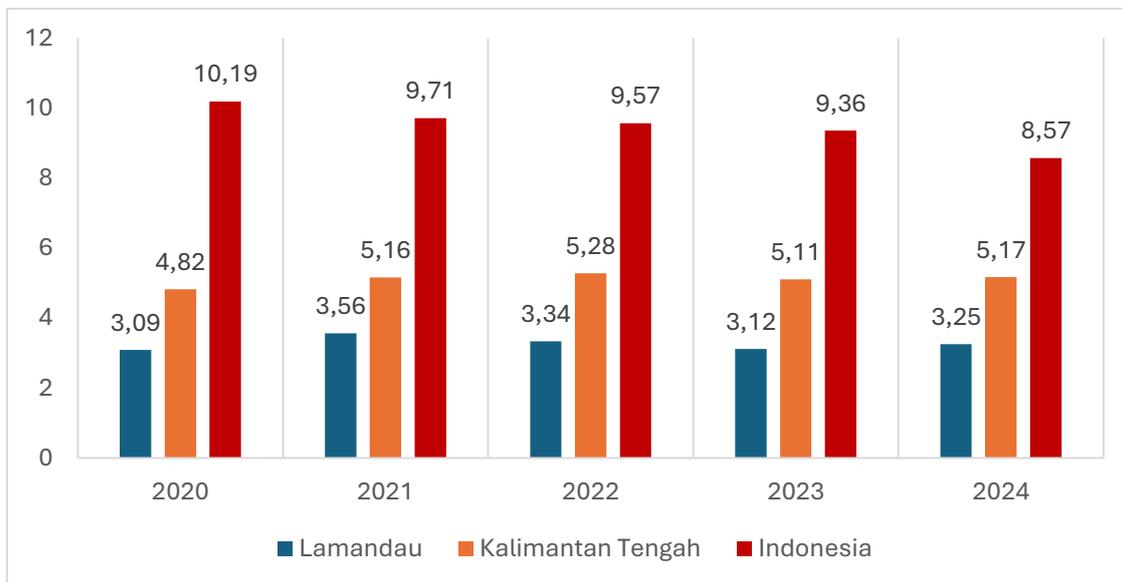
Pada tahun 2023, misalnya, kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi hingga 29,70 persen menyebabkan penurunan PDRB riil daerah sebesar 169,2 miliar rupiah. Meskipun sektor pertambangan berkontraksi cukup dalam, kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan yang tumbuh 6,10 persen dan 8,34 persen menahan pertumbuhan daerah tetap positif di angka 1,59 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2024 di mana sektor industri pengolahan kembali berkontraksi ke angka 0,52 persen dan kinerja sektor pertanian melambat ke angka 0,46 persen. Perekonomian Kabupaten Lamandau mampu tumbuh positif berkat kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 6,21 persen.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja sejumlah lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kabupaten Lamandau belum berjalan dengan optimal. Apabila hal ini dibiarkan tanpa intervensi maka perekonomian Kabupaten Lamandau berisiko mengalami guncangan di tengah ketidakpastian pasar global. Pembangunan ekonomi daerah perlu untuk diarahkan pada diversifikasi produk bernilai tambah tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal.

2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Tinggi rendahnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor tetapi secara garis besar

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan di mana pendapatan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain tingkat pendapatan, harga barang pokok juga turut mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.



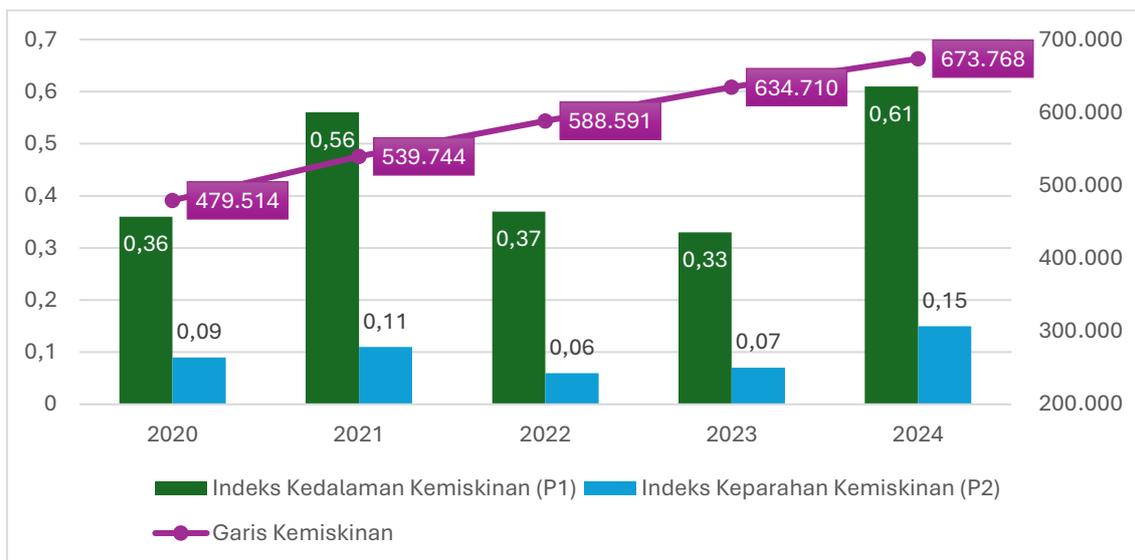
Gambar 2. 25 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional pada periode 2020-2024. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamandau lebih rendah 1,92 persen poin dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan 5,32 persen poin dibandingkan nasional. Kemiskinan di Kabupaten Lamandau merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah meskipun menunjukkan tren yang semakin naik dibandingkan tahun 2020. Tingkat kemiskinan Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen per tahun selama periode 2020-2024.

Kenaikan kemiskinan di Kabupaten Lamandau dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,90 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kenaikan harga yang cenderung tinggi tanpa diikuti dengan

kenaikan pendapatan yang sesuai dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini hidup di batas garis kemiskinan. Komposisi penduduk bekerja yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan bekerja sebagai buruh tani dan pekerja bebas menjadi salah satu faktor rendahnya pendapatan penduduk miskin.



Gambar 2. 26 Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Selain dilihat dari persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan Kabupaten Lamandau juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Lamandau menunjukkan kenaikan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan naik 0,25 poin dan indeks keparahan kemiskinan naik 0,06 poin dibandingkan tahun 2020. Kenaikan tersebut mengindikasikan kesempatan bagi penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin sulit dan kesenjangan antar penduduk miskin semakin besar.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Lamandau perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah, terlebih lagi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh

sektor primer yang bernilai tambah rendah serta latar belakang pendidikan penduduk yang sebagian besar masih berpendidikan rendah menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan agar kesejahteraan penduduk Kabupaten Lamandau meningkat.

2.2.1.3 Rasio Gini

Rasio gini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan. Rentang nilai dari rasio gini adalah 0 hingga 1 di mana semakin mendekati 1 maka mengindikasikan ketimpangan yang semakin tinggi sedangkan semakin mendekati 0 mengindikasikan ketimpangan yang semakin rendah atau pemerataan pendapatan yang sempurna. Berikut adalah rasio gini Kabupaten Lamandau dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia.



Gambar 2. 27 Rasio Gini Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020,2024

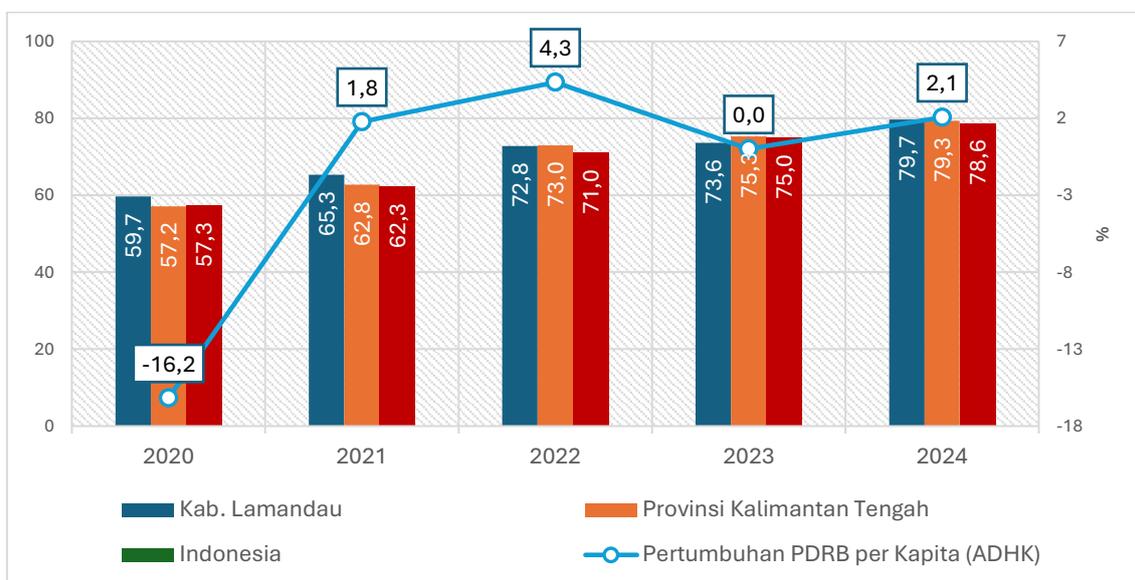
Sumber: BPS, 2024

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamandau cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia, meskipun sempat mengalami kenaikan dan menjadi lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Rasio gini Kabupaten Lamandau menunjukkan tren

yang menurun dengan penurunan sebesar 1,43 persen per tahun pada periode 2020-2024. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 16,52 persen dibandingkan tahun 2023.

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk. PDRB per kapita didapatkan dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk sehingga tinggi rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk. Berikut adalah PDRB per kapita Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 28 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

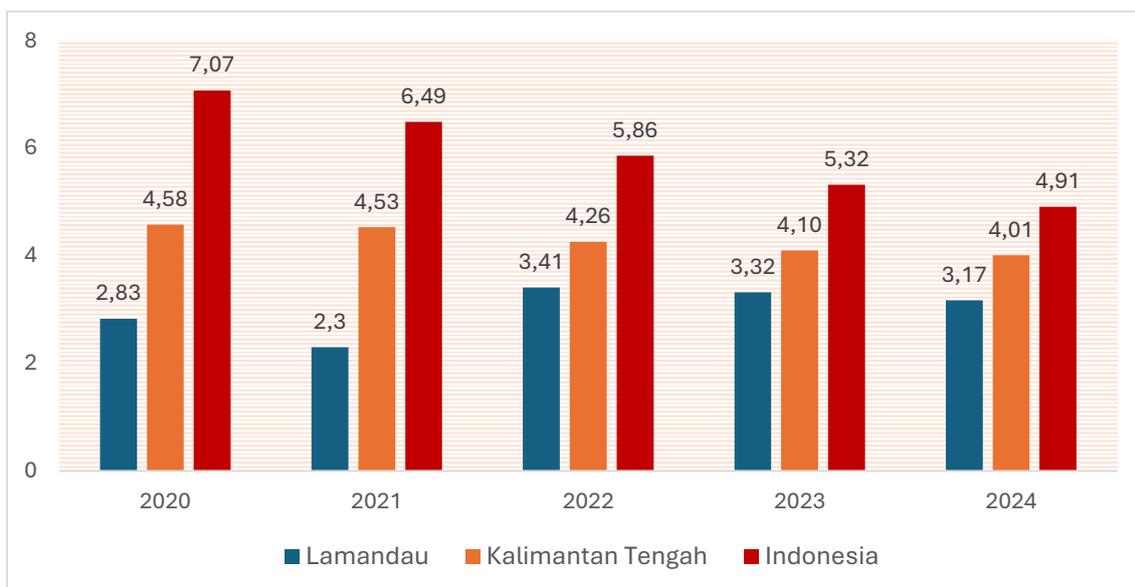
Sumber: Diolah dari BPS, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Lamandau terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 2,05 persen per tahun pada periode 2020-2024. PDRB per kapita Kabupaten Lamandau menyentuh angka 79,72 juta rupiah berdasar harga berlaku atau 42,74 juta rupiah berdasar harga konstan pada tahun 2024. Angka tersebut lebih tinggi 0,50 persen jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan 1,40 persen dibandingkan dengan nasional.

Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Lamandau secara umum mengikuti pergerakan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berfluktuasi mendorong pertumbuhan PDRB per kapita juga berfluktuasi karena pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamandau cenderung stagnan yaitu sebesar 1,52 persen per tahun. Fluktuasi pertumbuhan PDRB per kapita mengindikasikan produktivitas tiap penduduk dalam menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian Kabupaten Lamandau belum optimal.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan di suatu daerah adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT menggambarkan proporsi dari penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap total angkatan kerja. Berikut adalah kondisi TPT Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia.

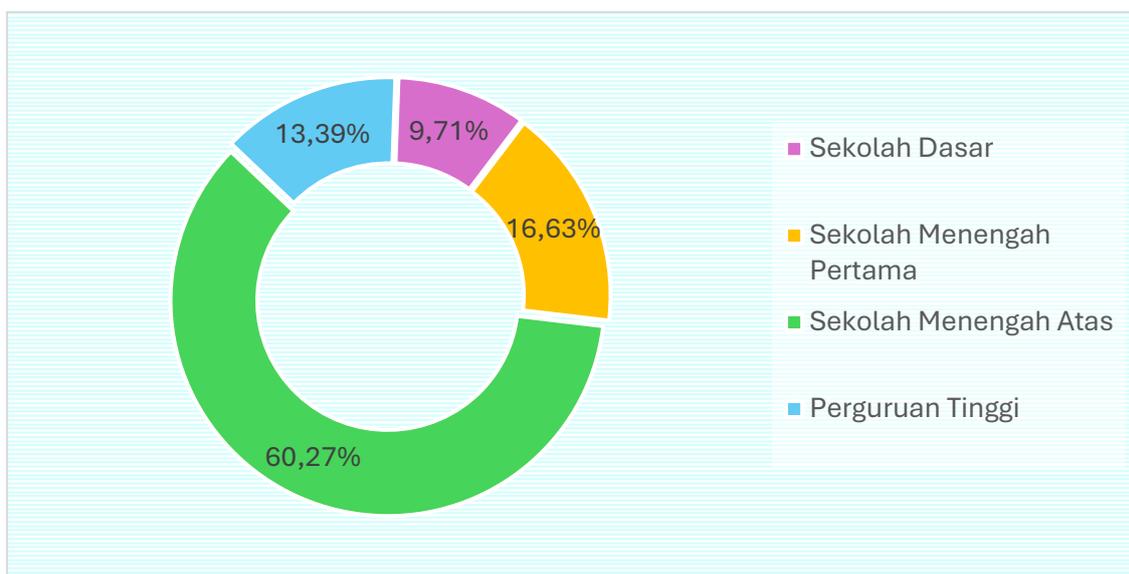


Gambar 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah dari BPS, 2025

Tingkat pengangguran di Kabupaten Lamandau secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Lamandau lebih rendah 0,8 persen poin dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan 1,7 persen poin dibandingkan nasional. TPT Kabupaten Lamandau menduduki peringkat keempat terendah se-kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Perekonomian Kabupaten Lamandau yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pengangguran. Apabila dilihat dari serapan tenaga kerja berdasarkan jenis lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga kerja sebesar 46,60 persen. Selain itu, penduduk di Kabupaten Lamandau juga menjalani usaha, baik menjalankan usaha sendiri maupun dibantu buruh/karyawan.



Gambar 2. 30 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024

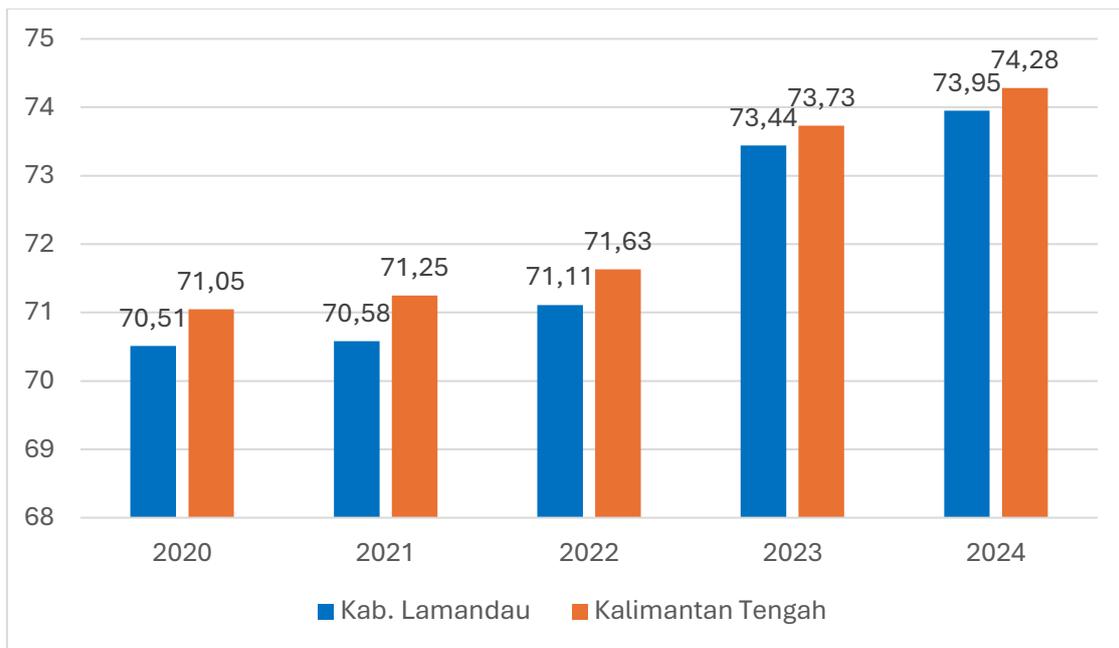
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Lamandau, 2025

Rendahnya TPT di Kabupaten Lamandau tetap menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun tingkat pengangguran menunjukkan penurunan, jumlah pengangguran mengalami kenaikan seiring dengan naiknya

jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan SMA mencapai 60,27 persen dari total pengangguran, sedangkan lulusan perguruan tinggi sebesar 13,39 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Lamandau belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor primer di mana kebutuhan akan tenaga kerja terdidik tidak sebesar di daerah yang bergerak di sektor sekunder dan tersier.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam tiga dimensi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk berdasarkan hasil pengukuran yang mencakup tiga parameter dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, lama pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Berikut merupakan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau selama tahun 2020-2024:



Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

IPM Kabupaten Lamandau mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 3,44 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap aspek layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Lamandau masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, upaya untuk melakukan pembangunan dan langkah perbaikan perlu untuk terus dilakukan.

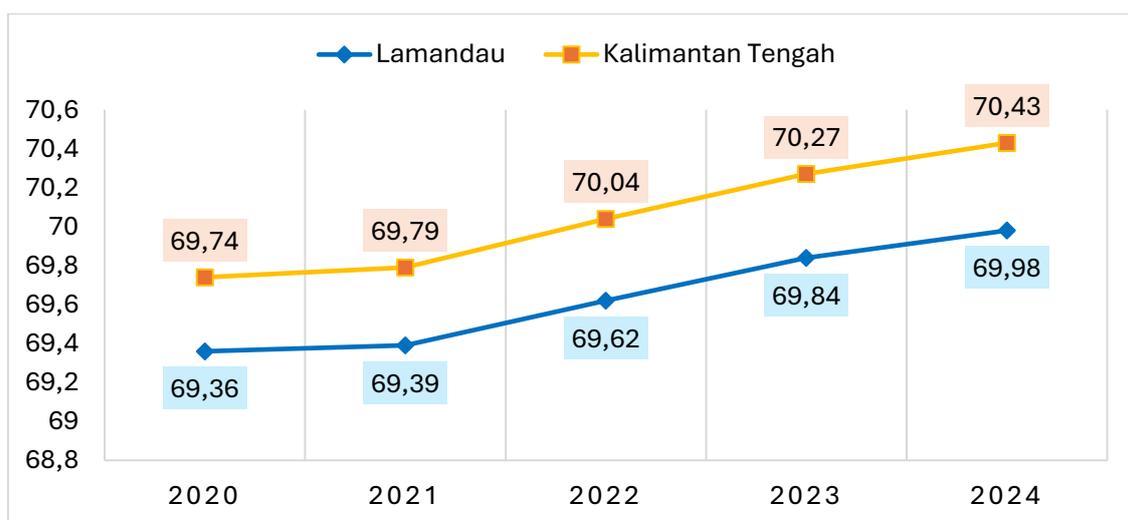
Beberapa faktor yang mendorong capaian positif pembangunan manusia di Kabupaten Lamandau antara lain adalah meningkatnya pemenuhan akses dan kualitas layanan pendidikan seperti pemenuhan dan pemerataan bangunan pendidikan, pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, pemberian beasiswa bagi pelajar serta beberapa program lain yang mendukung peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Lamandau. Selain itu, upaya pembangunan dalam bidang kesehatan turut

dilakukan khususnya dalam hal pemenuhan dan pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke seluruh wilayah di Kabupaten Lamandau. Hal lain yang juga turut berkontribusi terhadap capaian IPM Kabupaten Lamandau adalah cukup rendahnya angka pengangguran yang mengindikasikan kondisi sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 32 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lamandau menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut capaian UHH Kabupaten Lamandau meningkat sebesar 0,62 poin dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,22 persen per tahun. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamandau berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Lamandau sebesar 69,98. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 69,98 tahun.

Kenaikan UHH dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai. Dalam peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Lamandau berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan persentase kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98 persen pada tahun 2024.

Meskipun mengalami trend meningkat, capaian UHH Kabupaten Lamandau masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024, capaian UHH Kabupaten Lamandau 69,98 dan Provinsi Kalimantan Tengah 70,43, sehingga terdapat selisih 0,45 poin. Selain itu, selama lima tahun terakhir kenaikan, rata-rata kenaikan UHH Kabupaten Lamandau sebesar 0,22 persen dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,25 persen. Dengan demikian, pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamandau masih perlu dioptimalkan pada periode mendatang.

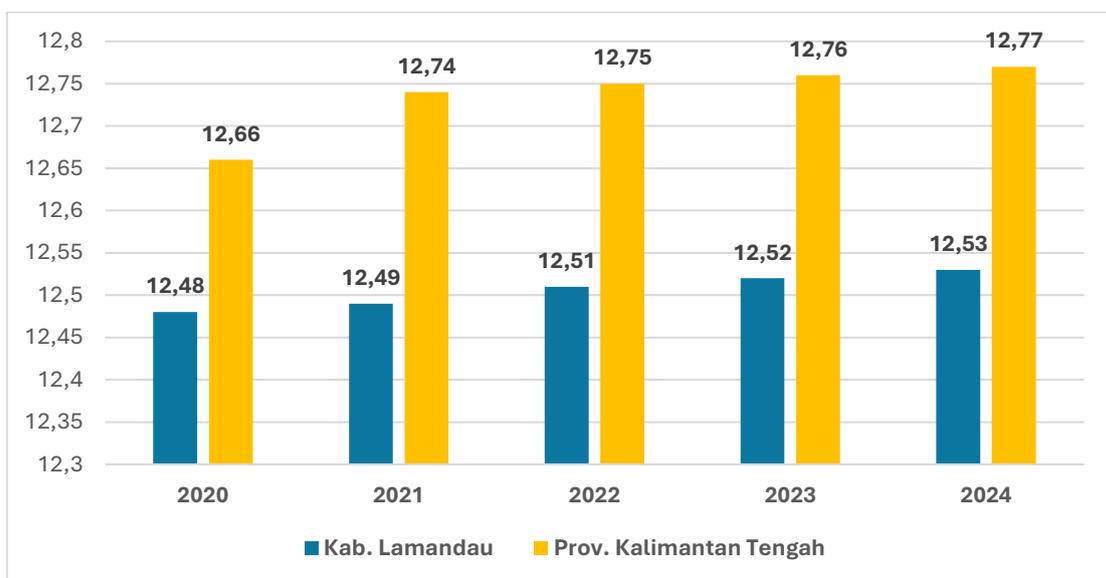
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan. Indeks pendidikan dihitung dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Secara

lebih rinci, berikut adalah capaian dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau selama periode 2019 hingga 2023.

2.2.3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lamandau Tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

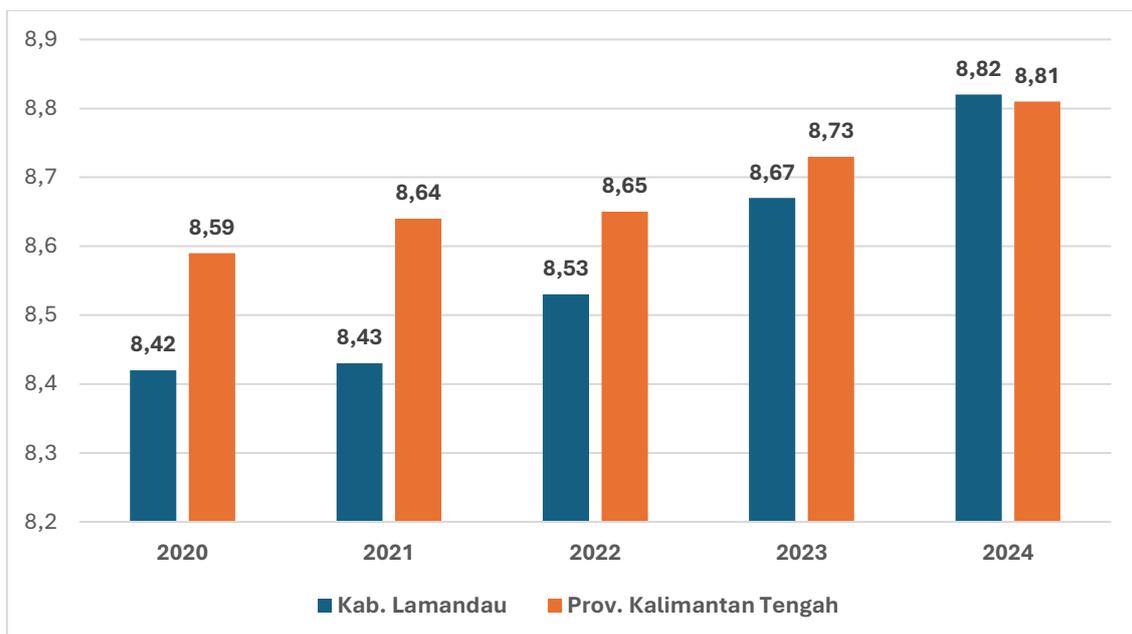
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Walaupun peningkatan yang terjadi cenderung lambat. Dalam periode lima tahun terakhir, capaian HLS Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Lamandau berada pada angka 12,53 tahun atau setara kelas 3 SMA. Walaupun mengalami tren yang positif, capaian HLS Kabupaten Lamandau masih berada di bawah rata-

rata HLS Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah berada pada angka 12,77 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA pada tahun 2024. Upaya untuk meningkatkan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Lamandau terutama dalam merespon perkembangan zaman yang secara tidak langsung akan membuat persaingan SDM semakin ketat.

2.2.3.2 Rata-rata lama Sekolah (RLS)

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Lamandau periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 34 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

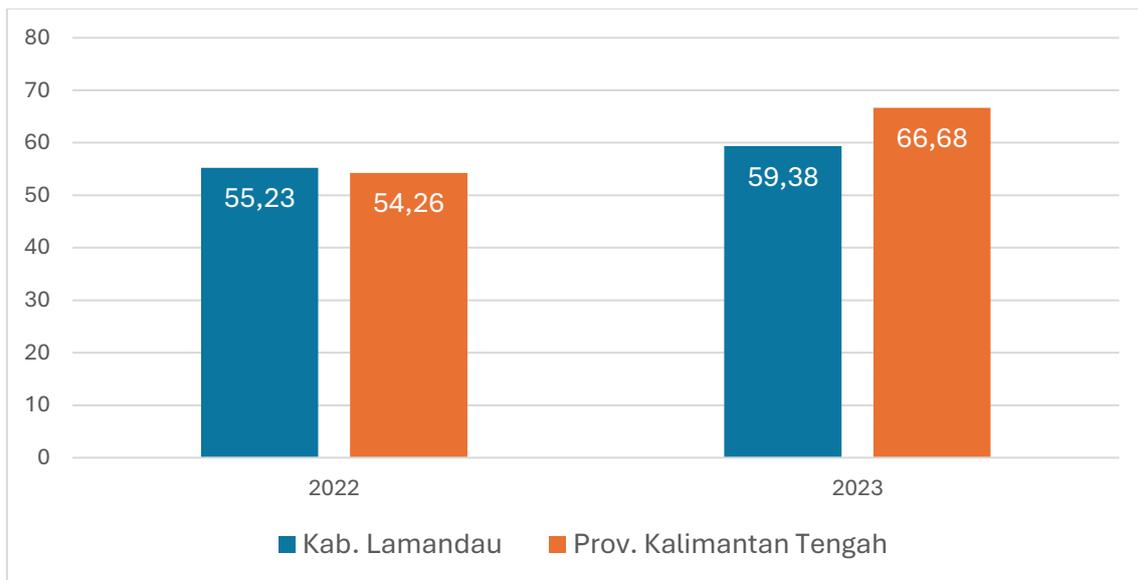
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lamandau mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 0,40

point. Pada tahun 2024 RLS Kabupaten Lamandau telah berada pada angka 8,82. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Lamandau dapat merasakan pendidikan formal selama 8,82 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Upaya peningkatan RLS menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Lamandau.

2.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan literasi di suatu wilayah. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup akses terhadap bahan bacaan, keterampilan berpikir kritis, serta partisipasi aktif dalam kegiatan literasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan literasi menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat diharapkan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dengan tingkat literasi yang baik. Oleh karena itu, IPLM menjadi indikator penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi secara inklusif dan berkelanjutan.

IPLM diukur melalui beberapa aspek utama, seperti ketersediaan bahan bacaan, akses terhadap fasilitas literasi, dukungan kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. IPLM tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi literasi saat ini, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk merancang program literasi yang lebih efektif. Berikut capaian IPLM Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Satu Data Indonesia, 2023

IPLM terdiri dari 7 komponen yakni pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam KIE, dan jumlah anggota perpustakaan. Capaian

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Lamandau cenderung meningkat pada periode 2022-2023. Namun pada tahun 2023, capaian IPLM Kabupaten Lamandau lebih rendah 7,3 poin dibanding Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, kedua capaian tersebut sama-sama masuk pada kategori sedang yakni termasuk dalam rentang 50-79,9 poin. Terdapat 4 dari tujuh komponen IPLM Kabupaten Lamandau yang cukup baik yakni komponen pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam KIE, dan jumlah anggota perpustakaan. 3 komponen lainnya masih di bawah rata-rata provinsi yakni ketercukupan koleksi perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari dan perpustakaan ber-SNP. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi masyarakat

ke depan perlu difokuskan pada ketiga elemen tersebut dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan aspek yang sudah baik.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif adalah kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan bencana. Pendekatan ini menghubungkan sistem perlindungan sosial dengan strategi kesiapsiagaan dan respons terhadap perubahan, seperti krisis ekonomi, dampak perubahan iklim, serta bencana alam, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan. Perlindungan sosial adaptif juga bersifat proaktif dalam mengantisipasi berbagai risiko. Hal tersebut menuntut adanya data yang akurat dan koordinasi lintas sektor agar intervensi kebijakan yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya penguatan perlindungan sosial adaptif bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator pencapaiannya dapat dilihat melalui peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan indikator penting dalam menilai tingkat perlindungan sosial bagi pekerja di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, telah memiliki akses terhadap jaminan sosial yang melindungi mereka dari berbagai risiko ketenagakerjaan, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, dan/atau saat memasuki masa pensiun.

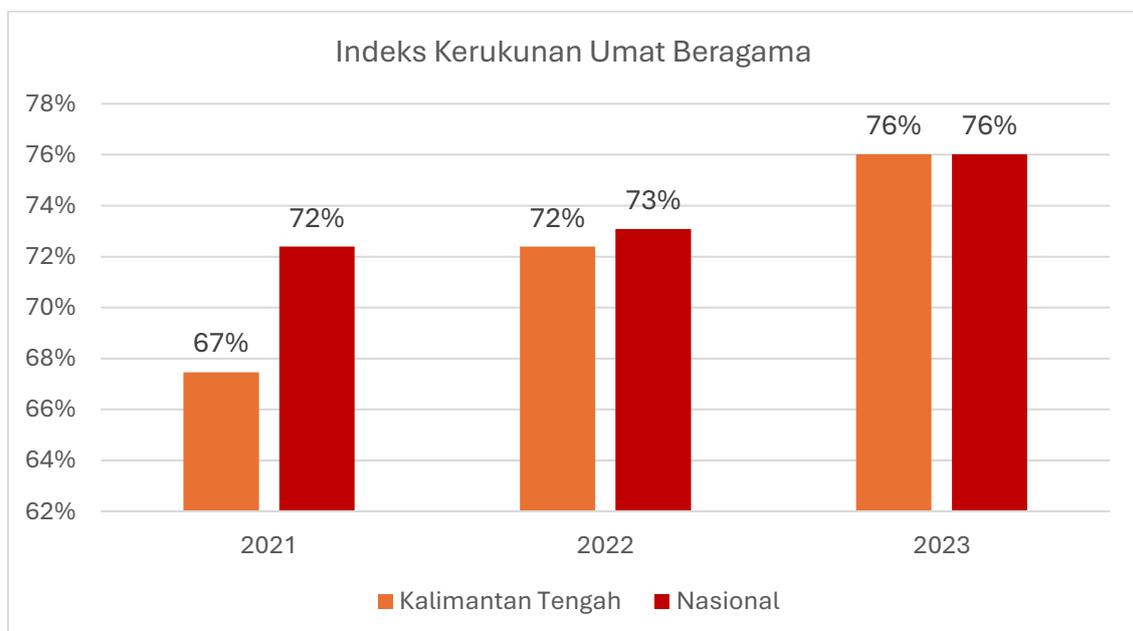
Penyediaan jaminan sosial bagi tenaga kerja berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi pekerja serta keluarganya. Semakin luas cakupan kepesertaan, semakin tinggi tingkat perlindungan yang

diberikan kepada pekerja, yang pada gilirannya dapat mendorong produktivitas dan stabilitas ekonomi.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indeks atau indikator yang mengukur upaya pembangunan daerah dalam menjaga harmoni antar umat beragama. Pengukuran indeks kerukunan umat beragama terbentuk dari 3 dimensi utama meliputi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam PBM Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006. Berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga dimensi Indeks KUB, yaitu: Pendapatan, Pendidikan, Bauran Penganut Agama, Bauran Rumah Ibadah, Habituasi Ritual di Luar Rumah Ibadah, Habituasi Perayaan Keagamaan, dan Pekerjaan. Indeks Kerukunan Umat beragama diukur oleh Balitbang Diklat Kemenag. Namun, pengukuran indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Mandalau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir diperoleh data terakhir sampai tahun 2023. Berikut capaian indeks IKB dengan perbandingan di tingkat nasional:



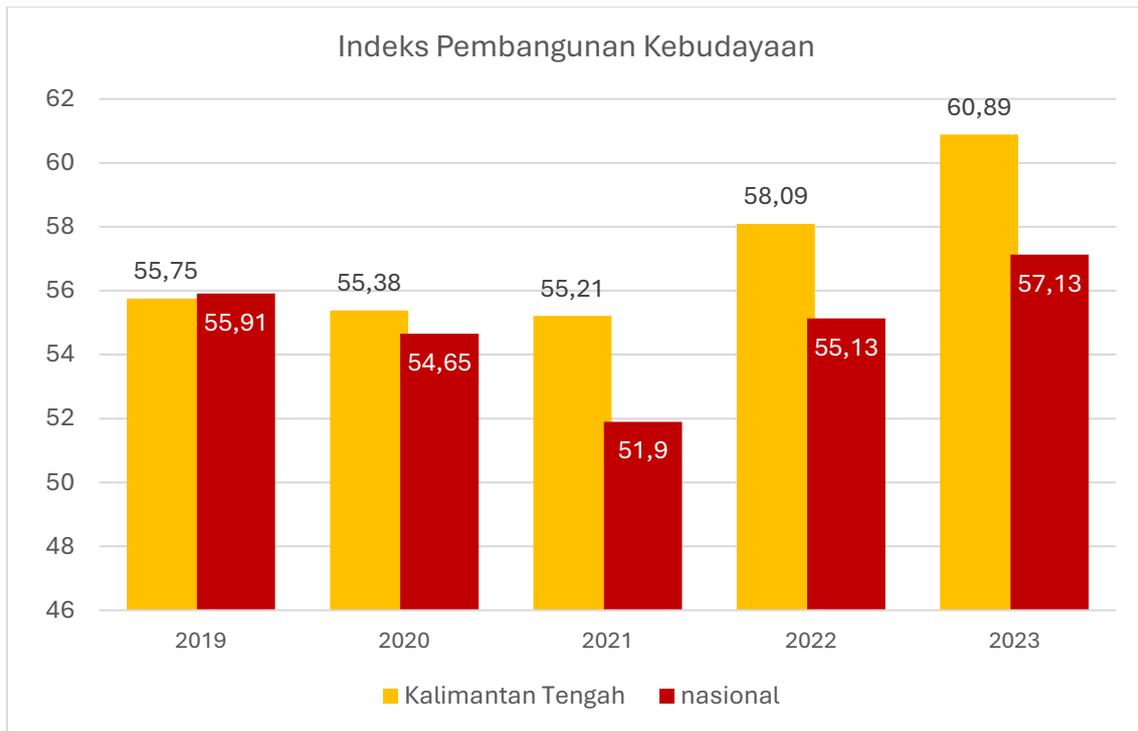
Gambar 2. 31 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Kemenag Kalimantan Tengah, 2024

Indeks KUB Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan trend yang meningkat selama periode 2021 – 2023. Peningkatan ini selaras dengan trend peningkatan yang terjadi pada indeks kerukunan umat beragama ditingkat nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah terbilang positif dan semakin baik setiap tahunnya. Meskipun demikian, capaian angka ini masih dibawah dari rata-rata capaian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi pada Kabupaten Lamandau meliputi kondisi Bauran Penganut Agama, Rumah Ibadah, perayaan keagamaan. Disamping itu, kondisi inklusifitas dan toleransi pendidikan hingga pekerjaan termasuk mempengaruhi hal tersebut. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan dan menjaga keharmonisan, inklusifitas, dan kerukunan antar umat beragama menjadi urgensi yang patut diprioritaskan.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan secara holistik yang diukur dari 7 dimensi dan 31 indikator. Adapun 7 dimensi tersebut yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial dan budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. IPK diukur oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi belum sampai kabupaten/kota. Selain itu, data terakhir yang tersedia baru sampai tahun 2023. Berikut capaian IPK Provinsi Kalimantan Tengah sebagai proksi nilai IPK di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemdikbud, 2024

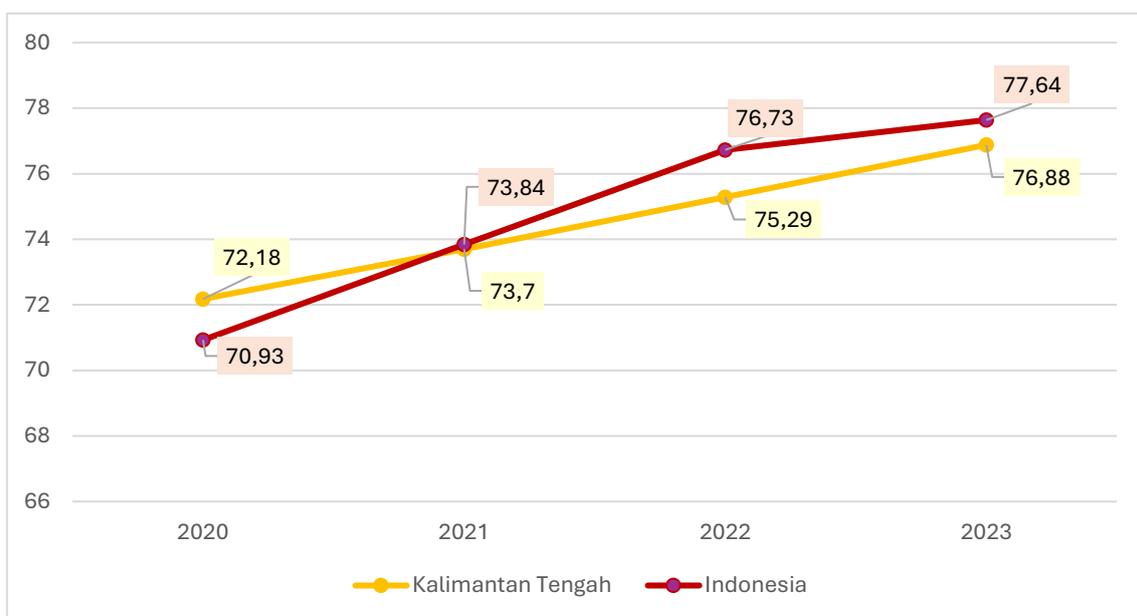
Selama periode 2019-2023, capaian IPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional mengalami tren fluktuatif. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi kebudayaan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional cukup dinamis, sehingga capaian yang diperoleh cenderung berubah setiap tahunnya. Fluktuasi capaian IPK dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal tersebut dapat dilihat dari komponen pembentuk IPK yang tidak hanya dilihat dari aspek budaya secara simbolik, melainkan dimensi lain seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, gender, dan sebagainya. Untuk itu, upaya pemajuan kebudayaan diperlukan dukungan dan kolaborasi antar berbagai aspek dan stakeholder terkait.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks kualitas keluarga (IKK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur melalui 5 dimensi yakni dimensi legalitas dan struktur ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial

psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Nilai Indeks kualitas keluarga (IKK) berkisar dari 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukkan kualitas keluarga semakin meningkat. Ada tiga kategori IKK yakni kurang responsif gender dan hak anak (<50), cukup responsif gender dan hak anak (50-75), dan responsif gender dan hak anak (>75). Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi belum sampai kabupaten/kota. Untuk itu, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Kabupaten Lamandau menggunakan proxy capaian IKK Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2. 37 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020-2024, KemenPPPA dan BPS, 2025

Selama periode 2020-2023, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah relatif berjalan baik, dalam hal ini termasuk Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2023, capaian IKK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 76,88 masuk dalam kategori responsif

gender dan hak anak (>75). Meskipun capaian pembangunan kualitas keluarga cukup positif, upaya peningkatan masih perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat perubahan sosial yang cukup dinamis dapat berpengaruh terhadap fungsi dan peran keluarga sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan pada setiap dimensi pembentuk kualitas keluarga seperti dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

Jika dibanding capaian IKK Nasional, capaian IKK Provinsi Kalimantan Tengah sempat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023, capaian IKK Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah rata-rata nasional. Dengan demikian, pertumbuhan IKK Provinsi Kalimantan Tengah cenderung lebih lambat dibanding rata-rata nasional. selama periode 2020-2023, rata-rata kenaikan indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah 2,1 persen dan Nasional 3,1 persen. Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang cukup signifikan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Lamandau

2.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan yang mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagai alat ukur yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perlindungan anak di suatu wilayah. Indeks ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan layanan perlindungan anak telah diterapkan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan anak.

IPA mencakup berbagai komponen yang mencerminkan hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. IPA mengukur capaian

perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. IPA diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai Pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (PIHA). Kluster 5 membentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan untuk Kabupaten Lamandau hanya tersedia pada tahun 2022. Berikut capaian IPA Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. 20 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lamandau dan Kalimantan Tengah Tahun 2023

No		Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Kluster 5 Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Lamandau	54,34	70,77	77,55	47,79	65,28	63,96	62,77	74,05
2	Prov. Kalimantan Tengah	46,62	73,96	69,38	27,96	78,44	60,37	55,22	80,61

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023, KemenPPPA

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lamandau sebesar 63,96. Capaian tersebut lebih tinggi 3,59 poin dibanding Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar 60,37. Meskipun begitu, capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tampak pula dari menurunnya capaian beberapa kluster, seperti kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan kluster 5 perlindungan khusus. 3 dari 5 kluster penunjang capaian IPA Kabupaten Lamandau menunjukkan capaian yang lebih unggul dibanding Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak di Kabupaten Lamandau masih lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan

Tengah. Namun demikian masih ada catatan pada dua kluster lainnya yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

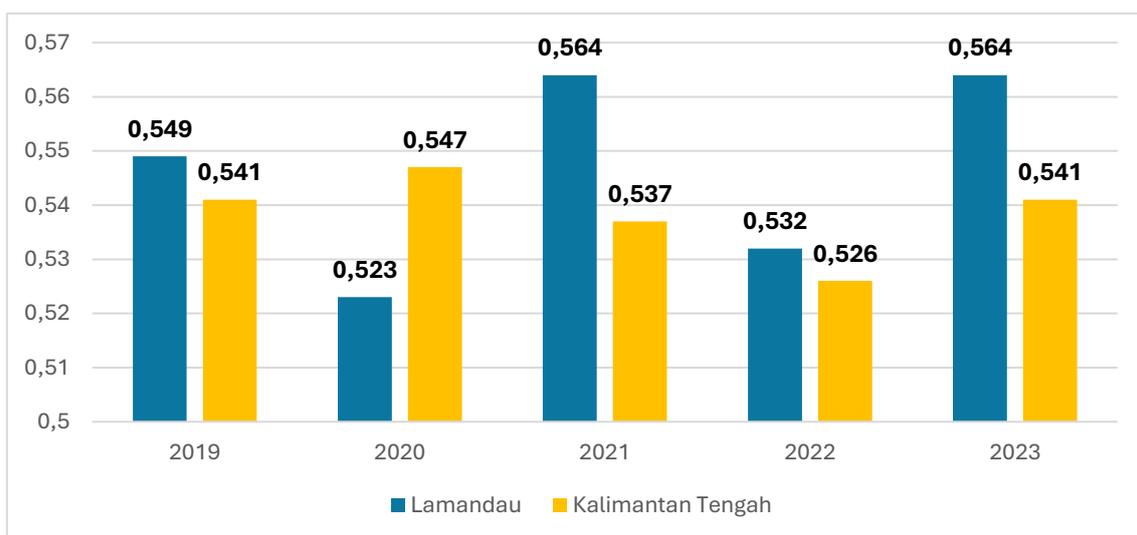
Data di atas menunjukkan bahwa terdapat satu dari lima kluster yang kurang optimal karena mendapatkan capaian kurang dari 50 poin, yakni kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memiliki capaian 47,79. Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang tidak sekolah, jumlah anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan budaya, jumlah anak yang mengikuti kursus, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, dan jumlah anak yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki capaian 83,59. Kluster tersebut diukur dari lima indikator yaitu jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, jumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua, dan angka kesiapan sekolah. Kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan memiliki capaian 75,58. Kluster 3 diukur dari 9 indikator yaitu jumlah anak yang melahirkan di fasilitas kesehatan, balita stunting, anak yang mendapatkan ASI eksklusif, anak yang terpenuhi kebutuhan kalornya, anak yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak, anak yang merokok, serta anak yang mendapat imunisasi lengkap. Kluster terakhir yakni kluster 5 perlindungan khusus memiliki capaian 80,65. Kluster tersebut diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang bekerja, rasio anak yang mengakses internet, rasio angka partisipasi sekolah, jumlah anak di bawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang terlantar.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks IKG diukur dari 3

dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke atas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian IKG Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2. 38 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lamandau dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 Selama periode 2019-2023,

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lamandau memiliki tren cukup fluktuatif. Selama periode tersebut, capaian IKG Kabupaten Lamandau selalu berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2023, capaian IKG Kabupaten Lamandau sebesar 0,564. Capaian tersebut lebih tinggi 0,023 poin dibanding Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 0,541. Namun demikian, kedua capaian tersebut tergolong cukup tinggi yakni di

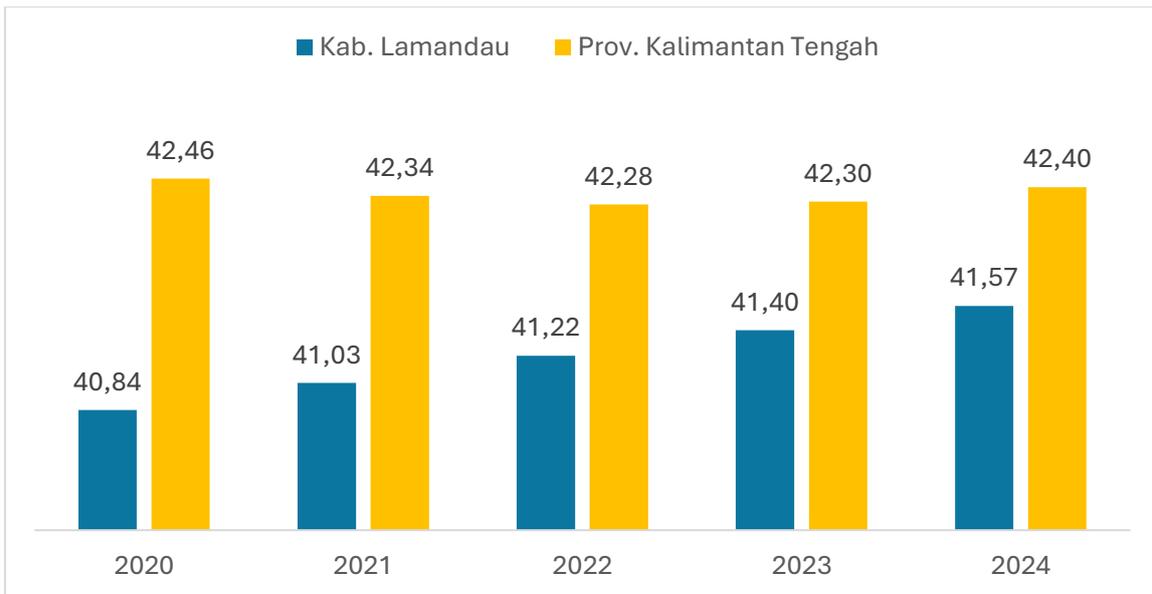
atas 0,5. Artinya, kedua daerah tersebut memiliki ketimpangan gender cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan reproduksi pada perempuan masih belum optimal. Selain itu partisipasi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, menjadi anggota legislatif, serta partisipasi dalam dunia kerja masih kurang setara.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yakni usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Lamandau selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 39 Angka Ketergantungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2024

Rasio ketergantungan di Kabupaten Lamandau mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka ketergantungan di Kabupaten Lamandau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir setiap 100 orang dengan usia produktif memiliki beban orang dengan usia non produktif yang meningkat walaupun relatif tidak signifikan. Angka ketergantungan di Kabupaten Lamandau secara konsisten selalu berada di bawah angka ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, setiap 100 orang produktif di Kabupaten Lamandau memiliki tanggungan sekitar 41 orang dengan usia non produktif.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi memiliki peran utama dalam memastikan keberlanjutan serta percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Dengan teknologi yang tepat serta penerapan inovasi yang berkelanjutan, struktur ekonomi bisa diperkuat dan daya saing pun bisa meningkat dalam jangka panjang. Iptek dan inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam menjaga produktivitas,

namun juga sebagai katalisator dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, serta membuka peluang ekonomi baru. Berikut merupakan indikator-indikator yang bisa menggambarkan kondisi iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Lamandau.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator ekonomi makro yang menghitung nilai produksi dari lapangan usaha industri pengolahan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih lanjut. Sektor industri memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan atas bahan mentah menjadi produk konsumsi final. Rasio PDRB Industri Pengolahan dihitung dengan cara menyandingkan angka PDRB lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB total. Berikut merupakan data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023:



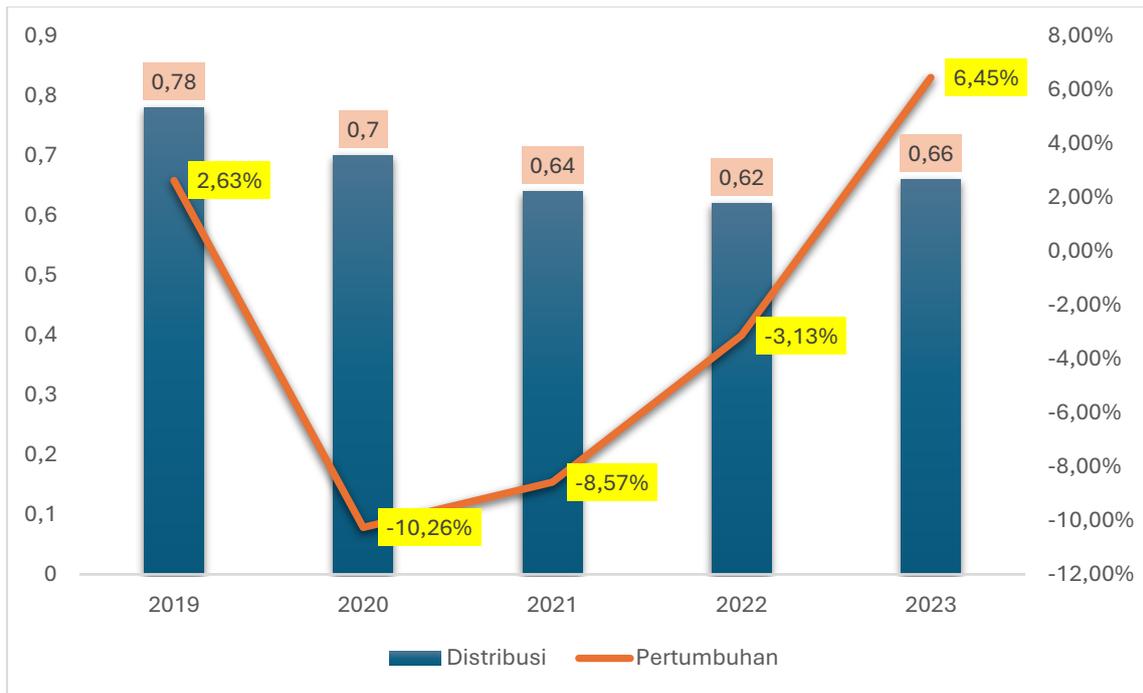
Gambar 2. 40 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang semakin meningkat di Kabupaten Lamandau pada tahun 2019 hingga 2023. Sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi kedua dalam struktur ekonomi Kabupaten Lamandau setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDRB sektor Industri Pengolahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta mendorong investasi. Perkembangan sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan bahan baku, teknologi produksi, infrastruktur pendukung, kebijakan industri, serta permintaan pasar domestik maupun global.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum merupakan salah satu komponen dalam data PDRB secara keseluruhan. Dalam perhitungannya, rasio PDRB akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan nilai produksi dalam lapangan usaha akomodasi makan dan minum dengan jumlah total dari keseluruhan PDRB. Indikator ini dapat menggambarkan produktivitas ekonomi daerah dalam sektor-sektor yang terkait seperti pariwisata. Berikut merupakan data PDRB lapangan usaha makan dan minum Kabupaten Lamandau selama tahun 2019-2023.

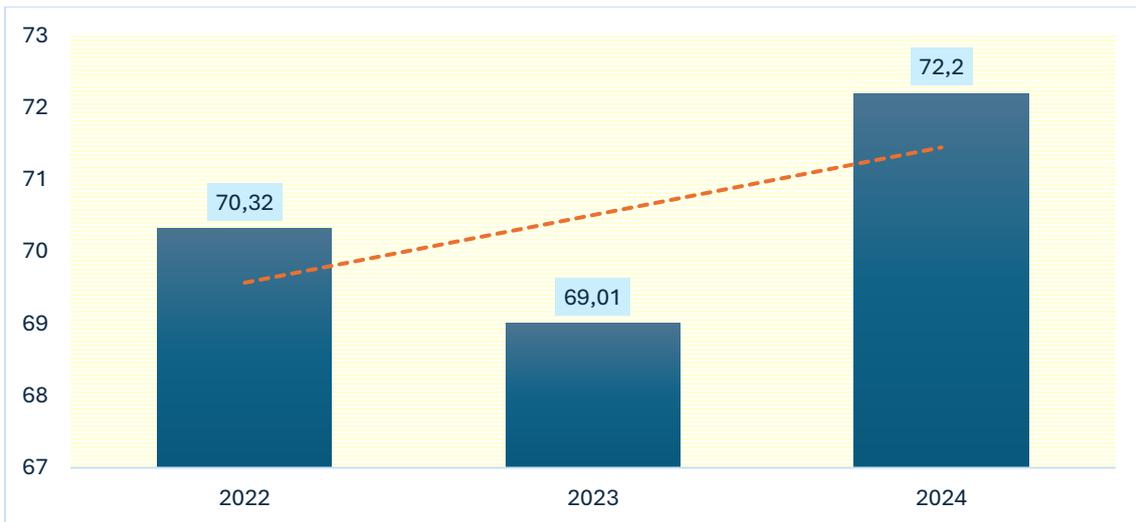


Gambar 2. 41 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang membandingkan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut capaian TPAK Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 42 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lamandau Tahun 2022-2024

Sumber: Kabupaten Lamandau dalam Angka 2025

Selama periode 2019-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lamandau mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, serta tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan TPAK juga menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk bekerja maupun mencari pekerjaan. Namun, fluktuasi yang terjadi juga bisa mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja, termasuk perubahan di sektor pertanian, industri, dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tren ini antara lain migrasi tenaga kerja, investasi di sektor produktif, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan TPAK di Kabupaten Lamandau sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan inovasi dalam suatu daerah. Inovasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ditempuh dengan cara baru atau cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses inovasi menjadi penting bagi produktivitas ekonomi daerah, dimana inovasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah secara umum ke depannya. Berikut merupakan data mengenai indeks inovasi daerah Kabupaten Lamandau selama tahun 2020-2024:

Tabel 2. 21 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lamandau	224	31,54	42,01	25,27	36,39
Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara persentase, Kabupaten Lamandau berhasil meningkatkan skor inovasi daerah sebesar 12,45 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah daerah Lamandau dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, baik dalam pelayanan publik, kebijakan, maupun pengembangan ekonomi berbasis inovasi. Namun, tren yang fluktuatif juga mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti konsistensi dalam implementasi kebijakan inovasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan untuk memastikan peningkatan inovasi dapat berlangsung secara stabil dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

PDRB Non-Tambang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, sehingga

mencerminkan kontribusi sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan ini bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi daerah tanpa pengaruh sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif akibat perubahan harga komoditas global. Dengan demikian, PDRB Non-Tambang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai daya saing dan ketahanan ekonomi suatu daerah dalam jangka panjang, terutama dalam sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Berikut adalah data distribusi PDRB non tambang di Kabupaten Lamandau.

Tabel 2. 22 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,62%	29,48%	31,86%	32,10%	35,30%
C. Industri Pengolahan	12,76%	13,38%	14,31%	15,03%	16,06%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
F. Konstruksi	12,63%	11,00%	10,74%	10,84%	11,58%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,36%	9,83%	9,14%	9,22%	9,98%
H. Transportasi dan Pergudangan	2,83%	2,92%	2,70%	2,67%	2,91%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78%	0,70%	0,64%	0,62%	0,66%
J. Informasi dan Komunikasi	1,19%	1,27%	1,29%	1,27%	1,32%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,12%	1,19%	1,20%	1,23%	1,29%
L. Real Estate	1,19%	1,22%	1,11%	1,05%	1,11%
M,N. Jasa Perusahaan	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61%	6,15%	4,80%	4,54%	4,57%
P. Jasa Pendidikan	6,22%	6,50%	5,74%	5,44%	5,56%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,26%	2,44%	2,41%	2,30%	2,51%
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,65%	0,66%	0,60%	0,57%	0,62%
Produk Domestik Regional Bruto	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

PDRB non tambang di Kabupaten Lamandau didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 31,47 persen dari tahun 2019 hingga 2023. Sektor kedua penopang perekonomian Kabupaten Lamandau terdapat pada sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 14,31 persen dari tahun 2019

hingga 2023. Sektor ketiga terdapat di sektor konstruksi. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 11,58 persen pada periode yang sama.

Faktor determinan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan PDRB non tambang di Kabupaten Lamandau adalah pembangunan sektor pertanian yang berfokus pada penerapan teknologi modern dan diversifikasi produk. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur yang terfokus pada peningkatan kualitas jalan dan perhubungan serta ketenagalistrikan. Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah yang terfokus pada formulasi kebijakan dan dukungan secara berkesinambungan. Investasi pada sektor UMKM yang terfokus pada pembangunan UMKM dan pemberian kemudahan terhadap bantuan permodalan.

2.3.4 Transformasi Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perekonomian yang optimal membutuhkan keterhubungan yang erat antara pasar domestik dan pasar global. Dalam konteks globalisasi, muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal dan domestik untuk memperluas akses pasar. Bagian ini akan menganalisis

hubungan antara perekonomian lokal dan perekonomian global dengan menggunakan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan pengeluaran yang mencerminkan nilai investasi yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi dalam bentuk pembelian barang modal dengan masa pakai lebih dari satu tahun. Dengan kata lain, PMTB berfungsi sebagai indikator tingkat pengeluaran suatu daerah dalam rangka reinvestasi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya nilai PMTB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, di mana masyarakat cenderung mengalokasikan kembali hasil produksi ekonominya untuk investasi di tahun berikutnya. Hal ini juga mencerminkan kondisi pasar yang kondusif dan keterbukaan ekonomi lokal terhadap peluang pasar yang lebih luas. Berikut adalah data mengenai PMTB Kabupaten Lamandau 2019-2023.

Tabel 2. 23 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023*
Pertumbuhan	4,77	-0,98	2,88	1,6	2,37
Distribusi	43,95	42,61	40,78	38,43	40,46

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2025

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Lamandau tahun 2019-2022 mengalami penurunan distribusi hingga pada tahun 2024 distribusi mengalami peningkatan. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 4,77 persen, namun menurun menjadi minus 0,98 pada tahun 2020. Penurunan PMTB diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19. Distribusi PTMB menunjukkan bahwa proporsi modal tetap bruto dalam PDRB juga terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan menguatnya sektor lain seperti pengeluaran pemerintah maupun konsumsi rumah tangga. Kontribusi PMTB terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 43,95 persen. Pada tahun 2022 kontribusi PMTB terhadap

PDRB berada pada titik terendah yaitu sebesar 38,43 persen. Penurunan kontribusi PMTB mengindikasikan adanya pelemahan Tingkat investasi di Kabupaten Lamandau secara umum.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur wilayah yang merata memberikan peran yang penting dalam menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Pemerataan infrastruktur lebih lanjut juga dapat mendorong akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah, yang ditandai dengan munculnya simpul-simpul perekonomian dalam suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya saing.

Menurut nilai IDSD tahun 2024, indeks daya saing daerah kabupaten Lamandau berada pada angka 3,39 dengan skor pada pilar infrastruktur sebesar 2,64. Skor pilar infrastruktu kabupaten Lamandau masih tergolong lebih kecil jika dibandingkan dengan skor pilar infrastruktur di Tingkat nasional dan provinsi. skor pilar infrastruktur di Tingkat nasional berada pada angka 2,97 dan 2,82 untuk Tingkat provinsi. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini dicapai dengan dukungan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lain.

2.3.6.1 Infrastruktur Jalan

Sektor transportasi merupakan sektor yang penting dalam proses distribusi baik barang maupun penumpang serta menunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Jalan di Kabupaten Lamandau terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten dengan total panjang 730 km. Sebagian besar jalan di Kabupaten Lamandau merupakan jalan kewenangan kabupaten yakni mencapai 75,55 persen atau sekitar 551,746 km.

Tingkat Kewenangan	2020	2021	2022	2023	2024
Negara	157,13	157,13	141,25	141,25	141,25
Provinsi	21,4	21,4	22,47	22,47	22,47
Kabupaten	551,75	551,75	551,75	551,75	551,75
Jumlah	730,28	730,28	715,47	715,47	715,47

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2025

Jalan di Kabupaten Lamandau sangat mudah mengalami kerusakan karena banyaknya kendaraan pengangkut CPO dan hasil galian yang melintas. Hal ini karena tidak adanya jalan khusus untuk lintasan kendaraan pengangkut CPO dan belum adanya jembatan timbang. Jembatan timbang menjadi infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Lamandau mengingat banyaknya kendaraan dengan beban muatan berat yang seringkali melintas. Jembatan timbang dapat difungsikan untuk menyaring kendaraan dengan beban muatan yang sesuai dengan kapasitas jalan eksisting, sehingga mencegah terjadinya kerusakan jalan. Rencana pengembangan jembatan timbang diarahkan pada Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sematu Jaya, yang merupakan akses utama keluar-masuk kendaraan baik angkutan barang maupun penumpang.

Tabel 2. 24 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022	2023
Aspal	125,46	144,41	157,82	160,584
Kerikil	393,513	358,808	345,398	367,265
Tanah	32,775	48,531	48,531	23,897
Jumlah	551,75	551,75	551,75	551,75

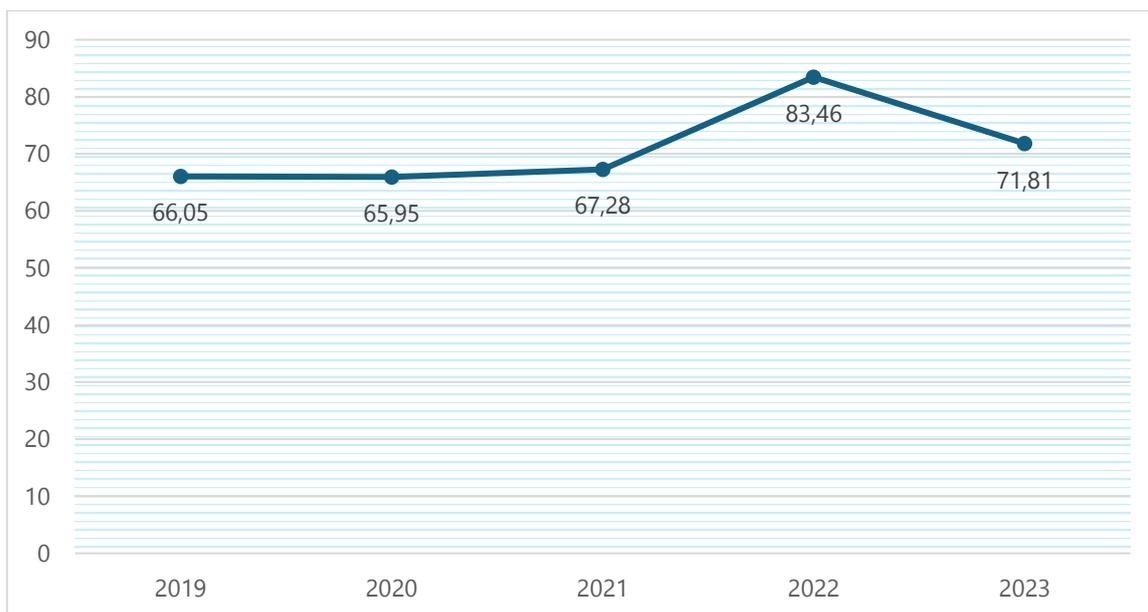
Sumber: BPS Kabupaten Lamandau, 2024

Kondisi jalan di Kabupaten Lamandau semakin mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan panjang jalan beraspal yang semakin meningkat. Namun demikian, jalan kabupaten di Kabupaten Lamandau yang telah beraspal pada tahun 2023 hanya mencapai 29,10 persen atau sepanjang 160,584 km. Panjang jalan dengan permukaan kerikil mencapai 66,56 persen, lebih banyak jika dibandingkan dengan panjang jalan yang telah diaspal. Di samping itu, masih terdapat jalan dengan permukaan tanah yakni mencapai 4,3 persen atau sekitar

23,897 km. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab permasalahan konektivitas wilayah di Kabupaten Lamandau.

2.3.6.2 Akses terhadap Sanitasi

Salah satu infrastruktur dasar permukiman yang sangat penting adalah infrastruktur sanitasi. Keberadaan sanitasi yang layak dan aman memiliki peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Akses terhadap sanitasi di Kabupaten Lamandau dapat dilihat melalui grafik berikut ini:



Gambar 2. 43 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Akses rumah tangga terhadap sanitasi cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2023, meskipun mengalami penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2023. Adapun akses sanitasi aman pada tahun 2023 baru mencapai 1,41 persen. Secara umum, akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Lamandau masih perlu untuk ditingkatkan.

2.3.6.3 Jaringan Telekomunikasi

Perluasan layanan telekomunikasi di Kabupaten Lamandau masih sangat dibutuhkan. Hingga tahun 2024, hanya Kecamatan Bulik saja yang telah terbebas dari *blankspot*. Titik *blankspot* di Kabupaten Lamandau sebesar 61,8 persen, terdapat sekitar 55 desa yang belum dapat menikmati akses telekomunikasi.

2.3.6.4 Akses terhadap Listrik

Listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk energi yang lain seperti energi mekanik, energi panas, energi cahaya, energi suara, dan berbagai bentuk energi yang lain yang dapat mempermudah aktivitas masyarakat. Akses listrik di Kabupaten Lamandau masih belum merata. Kondisi ini dapat dilihat melalui rasio elektrifikasi Kabupaten Lamandau tahun 2024 yakni sebesar 73,88 persen, sekitar 9.433 rumah tangga masih belum dapat menikmati listrik.

Tabel 2. 25 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Lamandau Tahun 2024

Kecamatan	Rasio Elektrifikasi PLN (%)	Rasio Elektrifikasi Non PLN (%)	Rasio Elektrifikasi (%)	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
Bulik	94,27	0	94,27	92,86
Sematu Jaya	86,75	0	86,75	100
Delang	53,06	0	53,06	63,64
Lamandau	33,83	7,31	41,13	63,64
Belantikan Raya	44,60	8,77	53,37	69,23
Menthobi Raya	76,87	0	76,87	81,82
Bulik Timur	47,69	4,49	52,18	66,67
Batang Kawa	0	7,72	7,72	11,11
Total	71,81	2,07	73,88	69,66

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, 2024

Layanan listrik di Kabupaten Lamandau bersumber dari layanan listrik PLN dan Non PLN. Akses listrik PLN mencapai 71,81 persen atau sekitar 25.9321 rumah tangga telah mengakses listrik PLN. Akses listrik di Kabupaten Lamandau didukung dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Namun demikian, beberapa pembangkit tenaga listrik berupa PLTS dan PLTMH banyak yang mengalami kerusakan.

Tabel 2. 26 Infrastruktur Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau

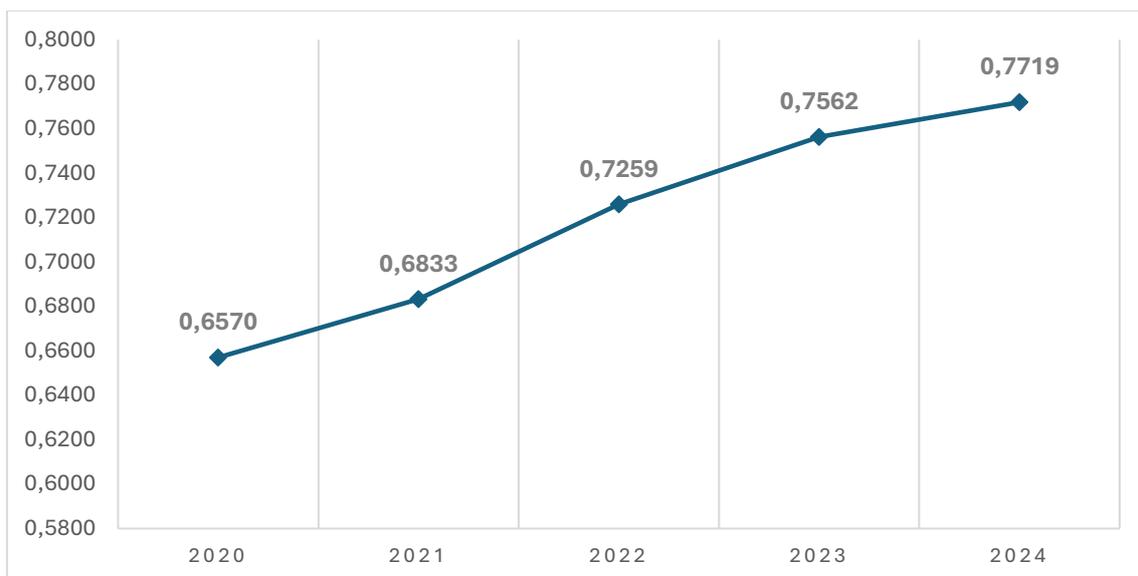
No.	Jenis Pembangkit	Jumlah	Lokasi
1.	PLTD	8	Delang, Menthobi Raya, Bulik, Lamandau
2.	PLTS	5	Belantikan Raya, Bulik Timur, Menthobi Raya
3.	PLTMH	2	Belantikan Raya, Lamandau

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau 2024-2044

Rencana pengembangan pembangkit listrik di Kabupaten Lamandau juga diarahkan pada pengembangan pembangkit listrik tenaga bioenergi melalui pemanfaatan limbah cair kelapa sawit (POME). Rencana pengembangan ini diarahkan pada Desa Belibi di Kecamatan Belantikan Raya, Kelurahan Nanga Bulik di Kecamatan Bulik, Desa Bakonsu di Kecamatan Lamandau, dan Desa Bukit Harum di Kecamatan Menthobi Raya.

2.3.6.5 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu desa. Selain itu, jumlah desa mandiri dalam suatu kabupaten juga merupakan salah satu indikator dalam menganalisis kinerja pemberdayaan desa. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 44 Indeks Desa Membangun Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020-2024

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lamandau menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam periode ini, IDM meningkat 0,1149 angka dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan desa, seperti infrastruktur, layanan dasar, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

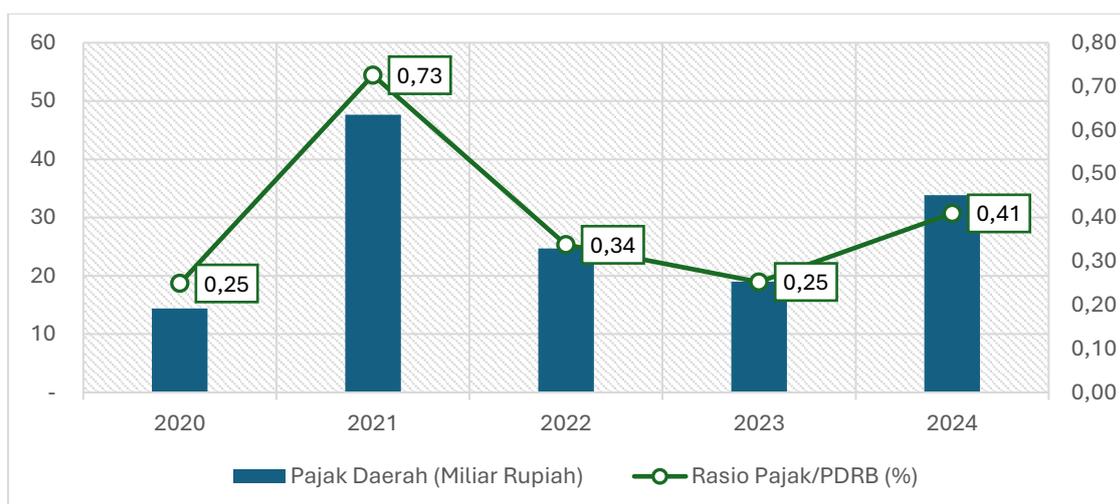
Secara keseluruhan, tren peningkatan IDM di Kabupaten Lamandau mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif dan program pembangunan desa yang dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan di wilayah pedesaan, serta menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif. Namun terdapat catatan bahwa pembangunan desa diharapkan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan serta dapat meminimalisir berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam periode perencanaan ke depan.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro menggambarkan situasi stabilitas ekonomi makro daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi stabilitas ekonomi makro diwakili oleh indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi.

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan pajak daerah. Rasio pajak dihitung dengan membandingkan total pajak daerah terhadap total PDRB.



Gambar 2. 45 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau

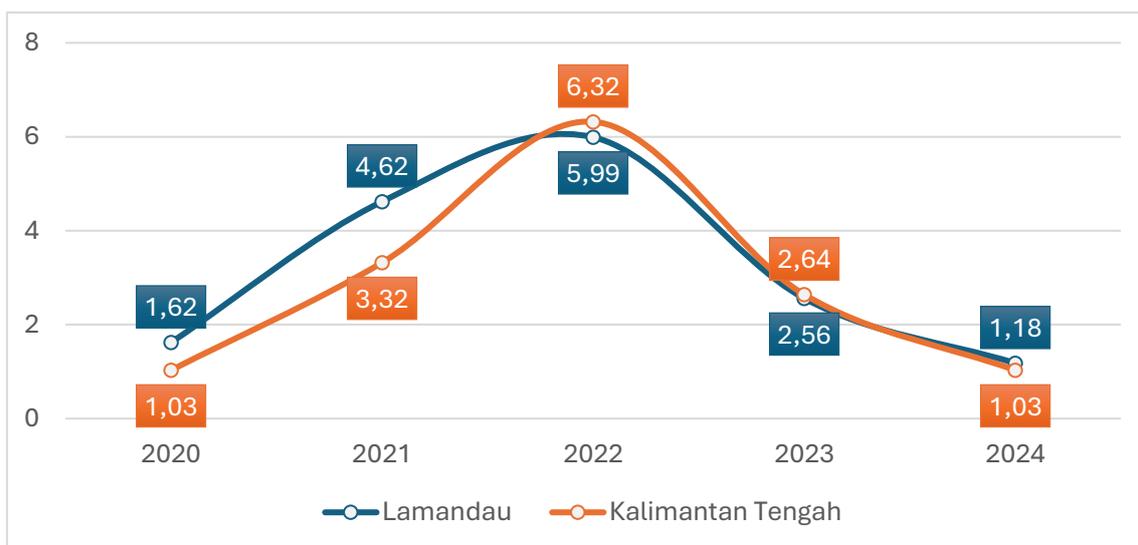
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Lamandau dan BPS, 2025

Penerimaan pajak Kabupaten Lamandau mengalami fluktuasi pada periode 2020-2024. Kondisi tersebut menyebabkan rasio pajak daerah terhadap PDRB turut mengalami fluktuasi seiring dengan peningkatan PDRB nominal Kabupaten Lamandau. Rasio pajak tertinggi tercapai pada tahun 2021 sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak dari seluruh objek pajak, khususnya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mengalami pertumbuhan hingga 623,47 persen. Meskipun sempat mengalami

penurunan, rasio pajak kembali naik pada tahun 2024 seiring dengan penerimaan pajak daerah yang kembali meningkat dibandingkan tahun 2023.

2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga komoditas barang dan jasa secara umum secara terus menerus. Inflasi digunakan sebagai indikator yang mencerminkan daya beli masyarakat dan umumnya dijaga pada tingkatan tertentu. Untuk menghitung inflasi dilakukan survei biaya hidup di sejumlah wilayah inflasi di mana Kabupaten Lamandau tidak termasuk ke dalam wilayah survei tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran pergerakan harga barang dan jasa serta daya beli masyarakat di Kabupaten Lamandau digunakan inflasi wilayah Sampit sebagai data proksi inflasi daerah.



Gambar 2. 46 Tingkat Inflasi Kabupaten Lamandau dan Kalimantan Tengah

Sumber: Diolah dari BPS Kalimantan Tengah, 2025

Secara umum, tingkat inflasi Kabupaten Lamandau menunjukkan pola yang sejalan dengan inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Inflasi tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai 5,99 persen begitu pun dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Inflasi pada tahun 2022 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa

secara umum. Pada tahun 2023 dan 2024, kenaikan harga cenderung melambat dan sedikit berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif, aspek pelayanan umum menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan adalah **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. IRB merupakan indikator makro yang mencerminkan kondisi tata kelola pemerintahan secara umum. Dalam IRB memuat komponen – komponen yang dapat mendukung terbentuknya regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif diantaranya meliputi SAKIP Daerah, Opini BPK, Indeks Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Persentase Kepatuhan Pelayanan Publik, dan Indeks Inovasi Daerah. Di samping itu terdapat indeks lainnya yaitu Indeks Reformasi Hukum, Indeks Integritas Nasional, dan Indeks Pelayanan Publik.

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pendukung bagi berbagai upaya pembangunan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan infrastruktur. Berikut ini adalah kinerja implementasi reformasi birokrasi yang mencakup indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lamandau tahun 2020-2023.

Tabel 2. 27 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
IRB	CC (50,4)	CC (51,51)	CC (54,65)	B (61,84)

Sumber: RKPD Kab. Lamandau 2024; <https://1data.menpan.go.id/>; hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023 Nomor. B/339/RB.06/2024.

IRB Kabupaten Lamandau menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi semakin baik. Meskipun demikian, kondisi tersebut perlu ditingkatkan karena masih dibutuhkan banyak perbaikan, tetapi tidak mendasar. Hal ini disebabkan oleh digitalisasi pelayanan publik belum optimal, penerapan akuntabilitas kinerja belum optimal, kemandirian keuangan daerah belum optimal, penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN belum optimal, dan ekosistem inovasi belum optimal. Komponen-komponen IRB yang belum optimal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 28 Kinerja Komponen IRB Kabupaten Lamandau

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SAKIP Daerah	60,02 (B)	60,54 (B)	60,73 (B)	B	63.20 (B)	62.05 (B)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
Indeks SPBE	N/A	N/A	N/A	2,149	2,59	2,59 (C)
Indeks Sistem Merit	n/a	n/a	n/a	n/a	106	-
Indeks Profesional	49	49	52,38	52,65	62,04	-
Indeks Inovasi Daerah	N/A	N/A	31,54	42,01	25,27	36.388
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	48,45	98,6	63,51	61,12	79,55	-

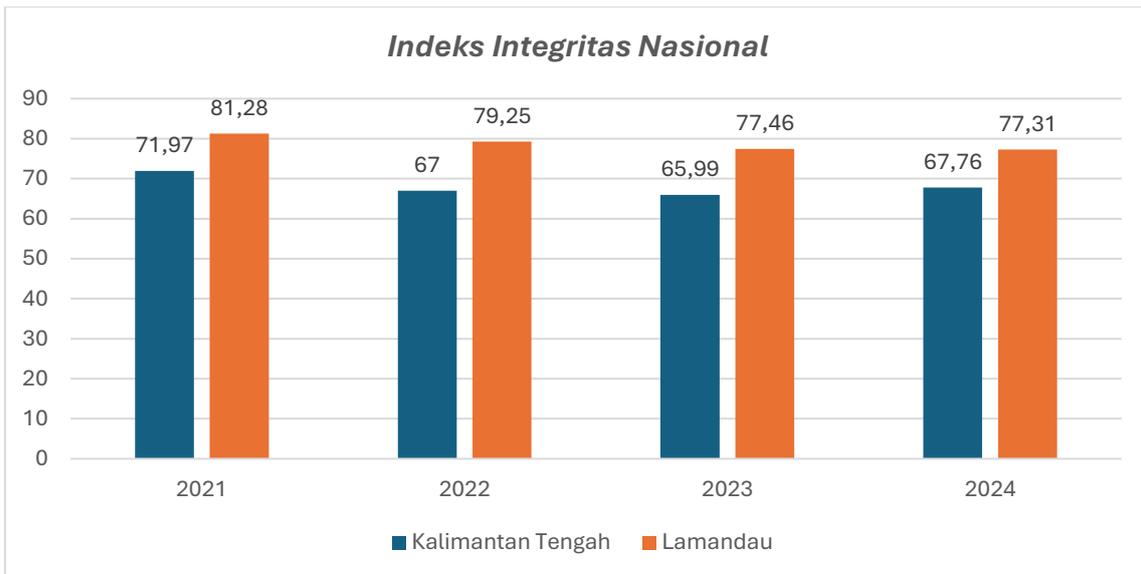
Sumber: RKPd Kab. Lamandau 2024; RPJMD Kab. Lamandau 2021-2026

Kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan optimal yang ditandai dengan opini BPK, yakni WTP selama 5 tahun terakhir. Namun, kinerja tersebut belum mampu mendorong kinerja akuntabilitas pemerintah yang ditunjukkan dengan kinerja SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Lamandau selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tetapi belum optimal karena masih berpredikat B dan nilainya masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP dilakukan baru pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, komitmen dalam

manajemen kinerja, dan pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Lebih dari itu, komponen IRB berupa pelayanan publik belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah memiliki kinerja fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini juga didukung dengan predikat Indeks Pelayanan Publik masih C pada tahun 2022. Kinerja pelayanan publik sejalan dengan kinerja pelaksanaan digitalisasi pemerintahan yang ditunjukkan indeks SPBE, yaitu 2,59 dengan predikat cukup. Di samping itu, inovasi daerah yang mendukung pelayanan public juga belum optimal yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh ekosistem inovasi belum memadai sehingga belum berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, upaya digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik harus dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.1.2 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) menjadi bagian dari aspek pelayanan umum yang turut mendukung terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Indeks integritas nasional bertujuan mengukur tingkat integritas yang digunakan untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Terdapat tiga dimensi utama sebagai komponen perhitungan dari IIN diantaranya internal, eksternal, dan eksper/ahli. Capaian IIN diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Data capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Lamandau diperoleh selama tahun 2021 – 2024. Berikut hasil capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Lamandau tahun 2021 – 2024 :



Gambar 2. 47 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2021-2024

Sumber: KPK, 2024

Capaian indeks integritas nasional Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana persentase integritas mencapai 79,25%. Kabupaten Lamandau memiliki nilai SPI tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah selama tiga tahun terakhir berturut – turut. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi penurunan selama tahun 2022 – 2024, yang mana turun sebesar 0,15 pada tahun 2023 ke tahun 2024. Kondisi penurunan ini hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi sejauhmana transparansi dan keadilan layanan diterapkan, program-program untuk menguatkan integritas karyawan, dan inovasi teknologi untuk pencegahan korupsi. Kabupaten Lamandau memiliki urgensi untuk mengoptimalkan inovasi daerah dalam segi pelayanan maupun pengelolaan ASN untuk mendorong transparansi dan integritas.

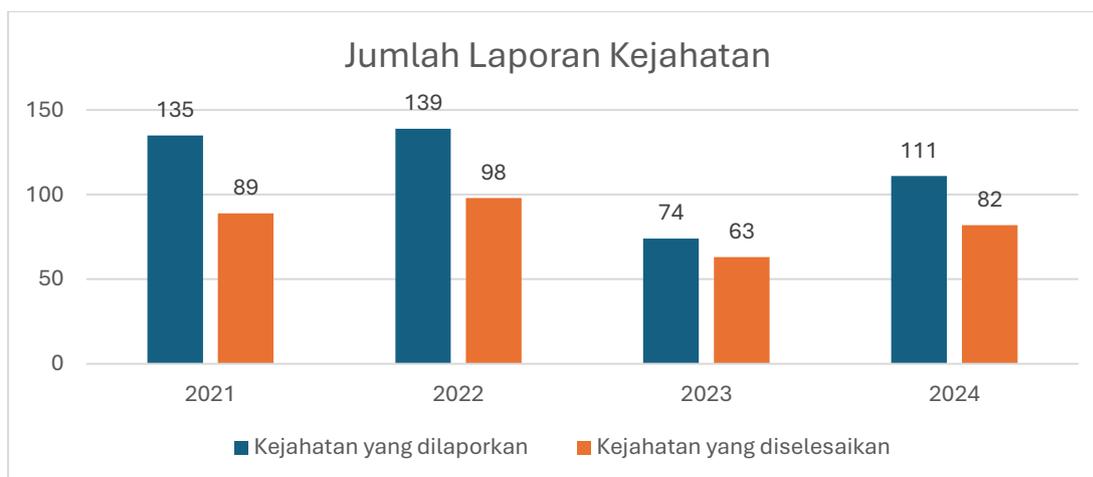
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tanggung, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan di setiap daerah dan kota di Indonesia perlu memperhatikan aspek hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang

bertanggung jawab, serta demokrasi substansial. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana kondisi suatu daerah tetap kondusif. Untuk memahami penerapan dan kondisi aspek-aspek tersebut di Kabupaten Lamandau, indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKK) serta Indeks Demokrasi dapat memotret hal tersebut.

2.4.2.1 Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) berfungsi sebagai ukuran untuk menilai kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). IPKKU disusun berdasarkan berbagai indikator dan dimensi yang bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola ketenteraman dan ketertiban umum secara transparan, efisien, serta akuntabel dalam periode tertentu. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan menangani tindak kriminal. Dalam hal tidak tersedianya data IPKKU Kabupaten Lamandau maka digunakan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan kejahatan yang diselesaikan di Kabupaten Lamandau. Berikut adalah data jumlah kejahatan yang dilaporkan dan jumlah kejahatan yang diselesaikan di Kabupaten Lamandau untuk periode 2021-2024



Gambar 2. 48 Jumlah Laporan Kejahatan

Sumber : Lamandau Dalam Angka 2025, (BPS Kabupaten Lamandau, Tahun 2025)

Jumlah kejahatan yang dilaporkan Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2021 – 2024. Jumlah angka tertinggi terdapat pada tahun 2022 kemudian menurun pada tahun 2023. Namun angka ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2024 dengan jumlah 111. Sementara itu jumlah kejahatan yang diselesaikan turut mengalami pola yang bervariasi. Tingkat penyelesaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 98 kasus tetapi turun menjadi 63 kasus pada tahun 2023, sejalan dengan turunnya jumlah kejahatan yang dilaporkan. Meskipun jumlah laporan kejahatan meningkat kembali pada tahun 2024, jumlah penyelesaian kasus juga mengalami peningkatan menjadi 82 kasus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah laporan pada tahun 2024 diikuti dengan peningkatan penyelesaian kasus, mengindikasikan adanya upaya perbaikan sistem. Namun, persentase penyelesaian kasus secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan agar lebih seimbang dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan.

2.4.2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan sistem demokrasi di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan politik, keterlibatan masyarakat dalam politik, serta penegakan supremasi hukum, telah diterapkan di Kabupaten Lamandau. Data indeks demokrasi Kalimantan Tengah diperoleh tahun 2020 – 2023. Berikut adalah data Indeks Demokrasi Kabupaten Lamandau dengan Indonesia sebagai proksi sebagai berikut untuk periode 2018-2020.

	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	74,91	73,17	79,30	77,53
Indonesia	73,66	78,12	80,41	79,51

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Tengah 2020 - 2023

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2020 – 2023. Capaian indeks demokrasi selama 2020 – 2023 rata – rata sebesar 73,17. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2021 ke 2022 naik sebesar 7%. Kemudian kembali menurun sebesar 3% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan demokrasi di Kabupaten Lamandau masih perlu dioptimalkan. Beberapa elemen yang dapat mendukung dan menguatkan kondisi ini di antaranya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

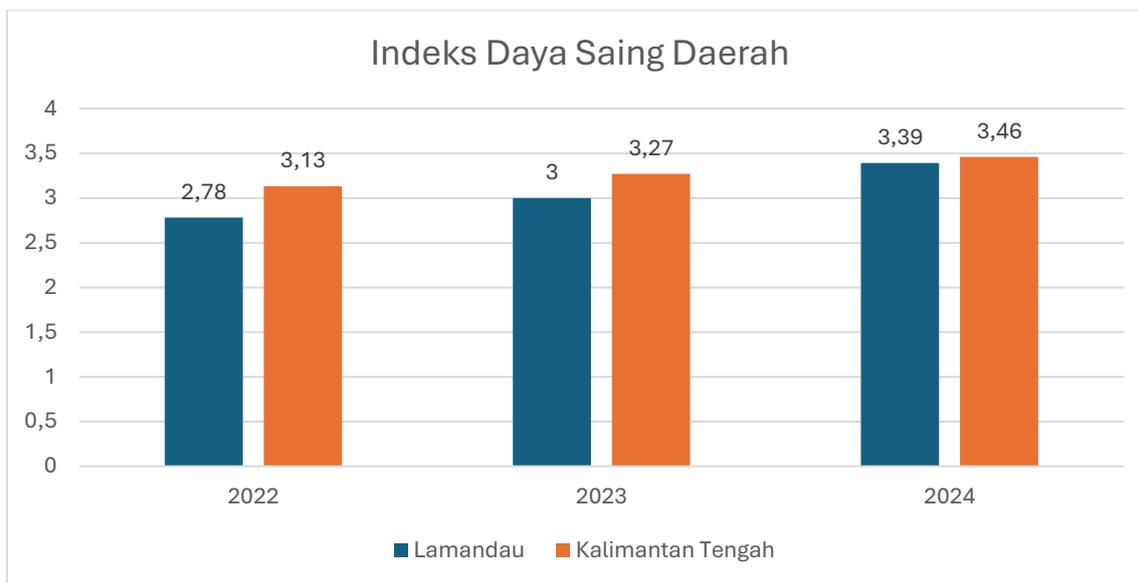
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Dalam menghadapi dinamika global dan regional yang terus berkembang, Indonesia menempatkan diplomasi dan pertahanan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas serta memperjuangkan kepentingan nasional. Diplomasi sekaligus memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Dalam rangka mewujudkan aspek ini, melihat kondisi daya saing daerah menjadi tolak ukur yang penting sebagai instrumen dalam melakukan diplomasi maupun mempertahankan keberdayaan daerah

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah menggambarkan tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. IDSD digunakan sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam bersaing dengan daerah lain. Pengukuran IDSD dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI) bekerja sama dengan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID). Indeks (IDSD) diukur dengan menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Disamping itu terdapat, 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi. Kabupaten Lamandau sebagai kota yang kaya akan budaya,

alam, dan iklim memiliki urgensi yang tinggi untuk menjaga daya saing daerah. IDSD Kabupaten Lamandau selama kurun waktu tiga tahun terakhir telah diukur. Berikut data dari IDSD Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :



Gambar 2. 49 Indeks Daya Saing Daerah per Kapita Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Indonesia Tahun 2010-2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) , 2024

Angka capaian IDSD Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif namun telah mengarah pada tren yang positif. Hal ini terlihat dengan peningkatan yang terjadi dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jika dibandingkan dengan kondisi indeks yang dimiliki di tingkat provinsi, capaian IDSD Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 masih di bawah rata – rata capaian Provinsi. Kondisi ini disebabkan terdapatnya beberapa komponen dari berbagai komponen pembentuk indeks daya saing daerah belum optimal. Iklim investasi dan iklim inovasi yang menjadi aspek krusial dari pendorong IDSD di Kabupaten Lamandau masih tergolong rendah. Indikator terendah dari IDSD diantaranya kapabilitas inovasi Kabupaten Lamandau sebesar (0,85), Indeks Pasar Produk sebesar (2,65), dan infrastruktur (2,64). Dengan demikian, berbagai faktor dan

aspek seperti inovasi, investasi, sumber daya manusia, dan ekosistem kerja menjadi aspek penting yang perlu dioptimalkan.

2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja kunci (IKK) selama lima tahun terakhir. Berikut capaian kinerja indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2023.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2023

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pada Subbab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Kabupaten Lamandau dalam lima tahun terakhir (2019-2023), dan kerangka pendanaan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lima tahun ke depan (2025-2029). Gambaran keuangan daerah bertujuan menentukan kerangka pendanaan melalui identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja dan pengeluaran daerah agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.5.1 Realisasi APBD Tahun 2019-2023

Gambaran ringkas keuangan daerah melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2019-2023. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Lamandau sehingga gambaran pengelolaan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan

belanja daerah yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2019-2023. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 3,26 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja rata-rata 3,38 persen dengan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai 9,77 persen. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2. 30 Realisasi APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

No	Uraian	REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	851.343.996.527,42	834.602.551.158,68	906.308.161.032,45	885.397.745.076,61	977.936.018.560,08
4,1	Pendapatan Asli Daerah	70.717.020.504,17	53.043.630.078,65	95.056.389.811,73	86.025.034.797,06	63.828.875.480,08
4,2	Pendapatan Transfer	757.200.534.991,70	765.023.494.500,39	775.382.825.724,72	799.372.710.279,55	914.107.143.080,00
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.426.441.031,55	16.535.426.579,64	35.868.945.496,00	-	-
5	BELANJA	787.395.635.772,64	812.922.828.856,99	850.723.585.935,95	950.855.084.399,67	969.388.233.810,15
5,1	Belanja Operasi	520.130.734.597,84	517.271.149.500,16	557.252.717.895,99	609.479.834.136,08	653.232.055.389,23
5,2	Belanja Modal	132.390.929.100,80	155.307.792.182,83	157.635.081.456,96	217.545.135.307,59	180.799.033.753,82
5,3	Belanja Tidak Terduga	82.950.146,00	11.102.874.604,00	2.185.310.300,00	1.539.737.510,00	-
5,4	Belanja Transfer	134.791.021.928,00	129.241.012.570,00	133.650.476.283,00	122.290.377.446,00	135.357.144.667,10
	Surplus/Defisit	63.948.360.754,78	21.679.722.301,69	55.584.575.096,50	-65.457.339.323,06	8.547.784.749,93
6	PEMBIAYAAN	79.083.197.616,16	135.048.374.284,20	140.541.449.320,89	185.258.041.207,39	108.932.981.884,33
6,1	Penerimaan Pembiayaan	90.358.018.016,16	143.048.374.284,20	156.728.096.585,89	196.126.041.207,39	119.800.981.884,33
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	11.274.820.400,00	8.000.000.000,00	16.186.647.265,00	10.868.000.000,00	10.868.000.000,00
	Pembiayaan Netto	79.083.197.616,16	135.048.374.284,20	140.541.449.320,89	185.258.041.207,39	108.932.981.884,33
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	143.031.558.370,94	156.728.096.585,89	196.126.024.417,39	119.800.701.884,33	117.480.766.634,26

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023

Tabel 2. 31 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

No	Uraian	PERTUMBUHAN REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,54%	-1,97%	8,59%	-2,31%	10,45%	3,26%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	-20,90%	-24,99%	79,20%	-9,50%	-25,80%	-0,40%
4,2	Pendapatan Transfer	3,01%	1,03%	1,35%	3,09%	14,35%	4,57%
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67,49%	-29,42%	116,92%			51,67%
5	BELANJA	-6,67%	3,24%	4,65%	11,77%	1,95%	2,99%
5,1	Belanja Operasi	-9,68%	-0,55%	7,73%	9,37%	7,18%	2,81%
5,2	Belanja Modal	-6,06%	17,31%	1,50%	38,01%	-16,89%	6,77%
5,3	Belanja Tidak Terduga		13285,00%	-80,32%	-29,54%		4391,71%
5,4	Belanja Transfer	6,27%	-4,12%	3,41%	-8,50%	10,69%	1,55%
	Surplus/Defisit	-1323,09%	-66,10%	156,39%	-217,76%	-113,06%	-312,72%
6	PEMBIAYAAN	-16,61%	70,77%	4,07%	31,82%	-41,20%	9,77%
6,1	Penerimaan Pembiayaan	-15,47%	58,31%	9,56%	25,14%	-38,92%	7,73%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	-6,53%	-29,05%	102,33%	-32,86%	0,00%	6,78%
	Pembiayaan Netto	-16,61%	70,77%	4,07%	31,82%	-41,20%	9,77%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	59,62%	9,58%	24,68%	-38,69%	-1,94%	10,65%

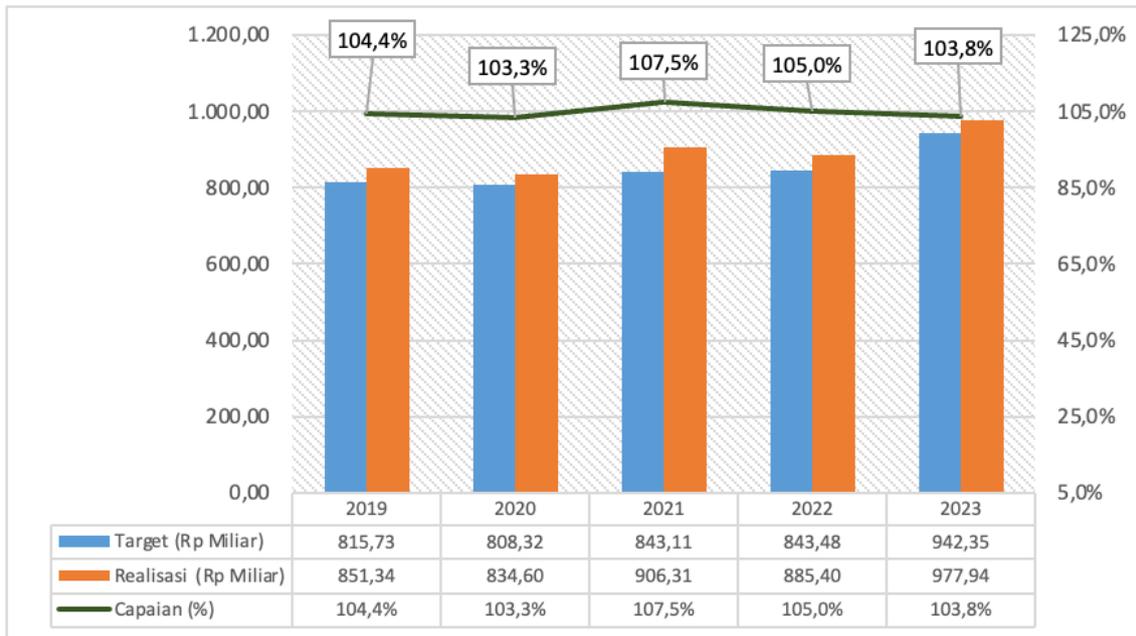
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan belanja. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 3,26 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 2,99 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pendapatan serta belanja sebesar 0,27 poin persentase. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran. Ketika belanja daerah meningkat lebih cepat daripada pendapatan, maka daerah berpotensi menghadapi defisit anggaran. Ini berarti jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah uang yang masuk, yang bisa memaksa daerah untuk mengurangi cadangan kas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Lamandau perlu mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan baru, dan merancang kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan agar pertumbuhan pendapatan dapat mengejar atau bahkan melampaui pertumbuhan belanja. Uraian mengenai kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, secara rinci dijelaskan pada sub bab bagian di bawah ini.

2.5.1.1 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan target, realisasi dan capaian pendapatan daerah

Kabupaten Lamandau tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. 50 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamandau pada periode tahun 2019-2023 memiliki tren positif dengan adanya sedikit penurunan pada tahun 2020 serta 2022, namun secara umum masih menunjukkan slope positif. Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp977,94 miliar, terutama didukung oleh pendapatan transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp834,60 miliar.

Capaian realisasi pendapatan secara rata-rata untuk Kabupaten Lamandau telah berada di atas 100 persen, hal ini menunjukkan kinerja yang baik. Capaian realisasi tertinggi sebesar 107,5 persen terjadi pada tahun 2021 hal ini didukung oleh peningkatan capaian lain-lain PAD yang sah terhadap anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Lain-lain PAD yang sah yang dianggarkan sebesar Rp25,42 miliar sedangkan realisasi mencapai Rp33,03 miliar. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 103,3 persen.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari PAD sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019–2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 32 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	46,17	70,72	(59,79)	(20,90)	153,15
2020	45,22	53,04	(2,06)	(24,99)	117,29
2021	84,74	95,06	87,37	79,20	112,18
2022	84,50	86,03	(0,28)	(9,50)	101,80
2023	81,11	63,83	(4,02)	(25,80)	78,70
Rata-rata	68,35	73,73	4,24	(0,40)	112,62

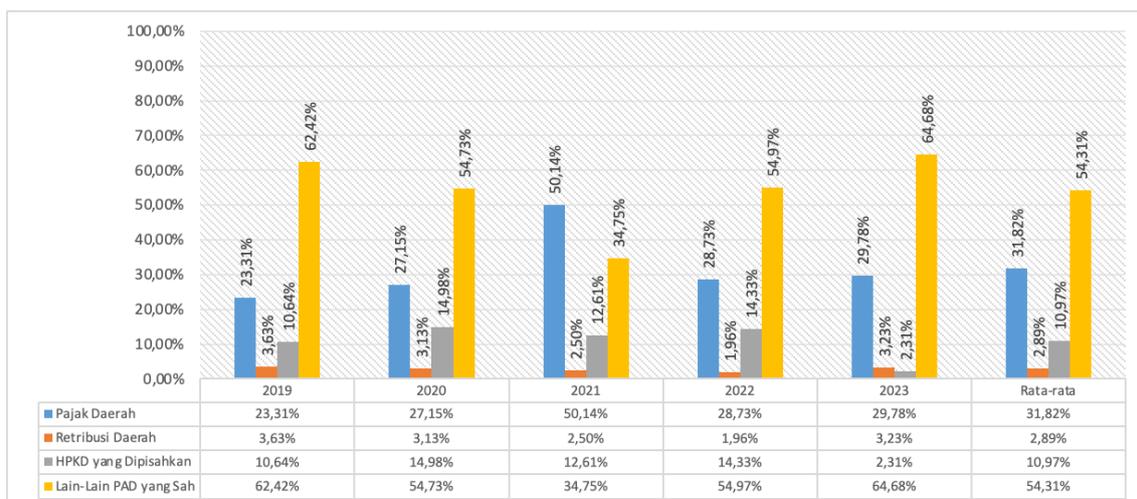
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi PAD Kabupaten Lamandau mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya yang bernilai negatif yaitu sebesar 0,40 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 112,62 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,20 persen, terutama didukung oleh pendapatan denda pajak daerah yang mengalami peningkatan sebesar 463,52 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023, pada tahun ini pendapatan asli daerah memiliki pertumbuhan sebesar negatif 25,80 persen. Penurunan PAD

pada tahun 2023 disebabkan oleh penurunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar negatif 74,74 persen serta Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 88,05 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi PAD menunjukkan realisasi PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 0,40 persen dari target PAD yang rata-rata tumbuh sebesar 4,24 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan target yang optimis, namun perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai rata-rata pertumbuhan PAD yang memiliki nilai negatif.

Terkait dengan realisasi capaian PAD, berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 51 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas diperoleh gambaran PAD di Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2019-2023 didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berikutnya yaitu Pajak daerah. Sedangkan kontribusi rata-rata dari Retribusi Daerah dan HPKD yang dipisahkan masing-masing sebesar 2,89 persen dan 10,97 persen. Lain-lain pendapatan yang sah ditopang oleh peningkatan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht), dengan pertumbuhan sebesar 233,65 persen. Tingginya kontribusi pajak mencerminkan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Lamandau. Untuk menjaga pentingnya keberlanjutan sumber pendapatan ini, maka secara periodik perlu diawasi agar tidak memberatkan sektor tertentu dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Secara rinci perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	12,52	16,48	(85,81)	(72,96)	131,65
2020	14,94	14,40	19,34	(12,62)	96,40
2021	44,83	47,66	200,03	230,88	106,31
2022	38,62	24,72	(13,85)	(48,14)	64,00
2023	46,49	19,01	20,38	(23,10)	40,89
	Rata-rata		28,02	14,81	87,85

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 14,81 persen dengan realisasi rata-rata

capaian kinerja sebesar 87,85 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 230,88 persen. Ditinjau dari besaran nilai absolut ataupun persentase pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi di dominasi oleh peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan peningkatan sebesar Rp31,91 miliar atau setara dengan peningkatan sebesar 623,47 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 dimana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang terbesar penurunan persentase pertumbuhan, dengan nilai -84,44 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pajak Daerah menunjukkan target Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 8,11 persen dari realisasi Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 6,81 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 54,31 persen pertahun terhadap PAD. Pajak Daerah ini mencakup penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perkembangan realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
Pajak Hotel	0,08	0,04	0,06	0,08	0,09	9,37	0,34
Pajak Restoran	0,90	0,83	0,93	0,83	1,00	0,69	4,35
Pajak Hiburan	0,02	0,00	0,01	0,02	0,03	59,33	0,08
Pajak Reklame	0,18	0,30	0,28	0,23	0,26	9,24	1,20

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
Pajak Penerangan Jalan	3,67	4,04	4,35	4,94	6,40	13,97	22,67
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	42,30	0,13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,77	1,30	0,94	0,54	2,50	73,17	6,21
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,63	2,76	4,01	4,82	5,30	15,97	18,23
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8,23	5,12	37,03	13,11	3,31	72,37	46,79
Jumlah	16,48	14,40	47,64	24,62	18,93	14,75	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber pendapatan terbesar dari pajak daerah dengan kontribusinya rata-rata mencapai 46,79 persen pertahun. Di peringkat kedua terdapat Pajak Penerangan Jalan sebagai penyumbang proporsi realisasi pajak, dengan proporsi sebesar 22,67 persen. Mengingat BPHTB adalah komponen utama dari pendapatan pajak daerah, pertumbuhan realisasi pajak BPHTB perlu untuk dijaga hal ini dikarenakan tren pada realisasi pajak BPHTB masih sangat fluktuatif dan memiliki ketimpangan yang cukup besar pada setiap tahunnya.

Selain pajak daerah, sumber PAD Kabupaten Lamandau yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lamandau adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	2,30	2,57	2,53	6,26	111,44
2020	1,92	1,66	(16,45)	(35,34)	86,25
2021	2,76	2,38	43,24	43,27	86,26
2022	2,17	1,69	(21,48)	(29,09)	77,90
2023	2,24	2,06	3,35	22,42	92,27
	Rata-rata		2,24	1,50	90,83

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,50 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 90,83 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 43,27 persen, terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang mengalami peningkatan sebesar 77,11 persen dari Rp536 juta pada tahun 2020 naik menjadi Rp950 juta pada tahun 2021. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 35,34 persen, terutama dipengaruhi menurunnya pertumbuhan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar minus 62,69 persen dari Rp1,11 miliar menjadi Rp414 juta pada tahun 2020.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Retribusi Daerah menunjukkan target Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 2,24 persen dari realisasi Retribusi Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 1,50 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,20 persen pertahun terhadap PAD. Retribusi ini mencakup penerimaan dari pelayanan

publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang mencakup: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,
2. Retribusi Jasa Usaha, yang mencakup: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Besarnya kontribusi retribusi mencerminkan pentingnya layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dan upaya untuk membiayai sebagian besar layanan tersebut melalui retribusi. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Juta)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
Retribusi Jasa Umum	739,84	709,11	744,51	615,76	530,41	-9,96	35,47
Retribusi Pelayanan Kesehatan	24,65	21,91	15,25	6,63	6,66	-36,74	2,14
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	79,21	81,31	58,76	33,08	31,95	-17,99	3,28
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113,10	119,02	122,57	91,05	47,50	-17,26	5,61

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Juta)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
Retribusi Pelayanan Pasar	218,33	200,33	279,48	167,97	177,76	0,94	10,14
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	304,54	286,54	251,33	287,93	234,03	-4,04	13,82
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	17,14	0,00	32,50	-20,00	0,14
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	-20,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	717,03	536,71	950,56	964,05	1.161,85	15,60	37,18
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	531,40	409,42	399,43	494,77	585,39	2,40	22,92
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,53	3,45	90,30	0,01
Retribusi Tempat Khusus Parkir	143,10	90,25	78,84	15,55	43,18	19,06	3,85
Retribusi Rumah Potong Hewan	22,51	24,52	25,06	17,62	18,69	-1,50	1,07
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13,33	6,09	25,64	27,80	39,24	86,96	0,77
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6,69	6,43	421,60	407,77	471,89	1.297,98	8,56
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.110,52	414,29	683,34	106,77	372,45	40,80	27,35
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.059,18	227,18	202,18	106,77	372,45	74,47	16,39

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Juta)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	51,34	187,11	481,16	0,00	0,00	46,32	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.567,39	1.660,10	2.378,41	1.686,58	2.064,70	1,50	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan terbesar dari retribusi daerah dengan kontribusinya rata-rata mencapai 37,18 persen dan menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 15,60 persen pertahun. Retribusi Jasa umum juga memiliki andil besar untuk menyumbang total retribusi, dengan proporsi sebesar 35,47 persen terhadap retribusi daerah. Dengan kontribusi lebih dari seperempat total retribusi yang diimbangi dengan pertumbuhan yang pesat menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor ini sangat penting bagi keuangan daerah. Pertumbuhan yang pesat dalam Retribusi Jasa Usaha bisa menjadi indikator peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lamandau, seperti pertumbuhan sektor bisnis, konstruksi, dan investasi yang berbagai izin. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem perizinan, memperbaiki layanan, dan memastikan kepatuhan untuk terus memaksimalkan pendapatan dari sumber ini.

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamandau yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Lamandau adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,97 persen pertahun terhadap PAD. Kontribusi tersebut diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lamandau yang terdiri atas PT Bank Kalteng. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang

Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	7,51	7,52	0,00	2,13	100,23
2020	7,72	7,95	2,84	5,65	102,96
2021	11,73	11,99	51,94	50,82	102,20
2022	12,33	12,33	5,13	2,87	100,00
2023	1,28	1,47	(89,63)	(88,05)	115,24
Rata-rata			(5,94)	(5,32)	104,13

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Lamandau mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan minus 5,32 persen pertahun. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 50,82 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar minus 88,05 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 104,13 persen selama kurun waktu 2019-2023. Tahun 2023 merupakan tahun dimana capaian kerja menunjukkan nilai kinerja terbaik yaitu sebesar 115. Tahun 2022 merupakan capaian kinerja terendah dibandingkan empat tahun lainnya yaitu 100 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sedikit lebih tinggi, yakni 0,95 persen dari realisasi yang rata-rata tumbuh sebesar minus 6,97 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peranan utama dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Lamandau adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar yaitu rata-rata sebesar 54,31 persen pertahun. Kontribusi tersebut diperoleh dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019–2023 .

Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	23,85	44,14	41,41	136,50	185,13
2020	20,64	29,03	(13,44)	(34,23)	140,67
2021	25,42	33,04	23,17	13,78	129,94
2022	31,39	47,29	23,46	43,16	150,67
2023	31,10	41,28	(0,91)	(12,70)	132,73
	Rata-rata		14,74	29,30	147,83

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Lamandau memperlihatkan adanya pertumbuhan yang sangat baik, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 29,30 persen. Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 147,83 persen dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 185,13 persen, sedangkan untuk capaian kinerja

terendah terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 129,94 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data lima tahun terakhir capaian kinerja Kabupaten Lamandau telah melebihi 100 persen, hal ini telah mengindikasikan capaian kinerja yang baik terhadap pendapatan. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 14,74 persen dan realisasi pertumbuhan rata-rata sebesar 29,30 persen. Ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan pendapatan meskipun dalam penyusunannya masih cenderung pesimis.

2) Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 106 Ketentuan UU 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	748,52	757,20	1,81	3,01	101,16

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	746,04	765,02	(0,33)	1,03	102,54
2021	723,32	775,38	(3,05)	1,35	107,20
2022	758,98	799,37	4,93	3,09	105,32
2023	861,24	914,11	13,47	14,35	106,14
Rata-rata		3,37	4,57	104,47	

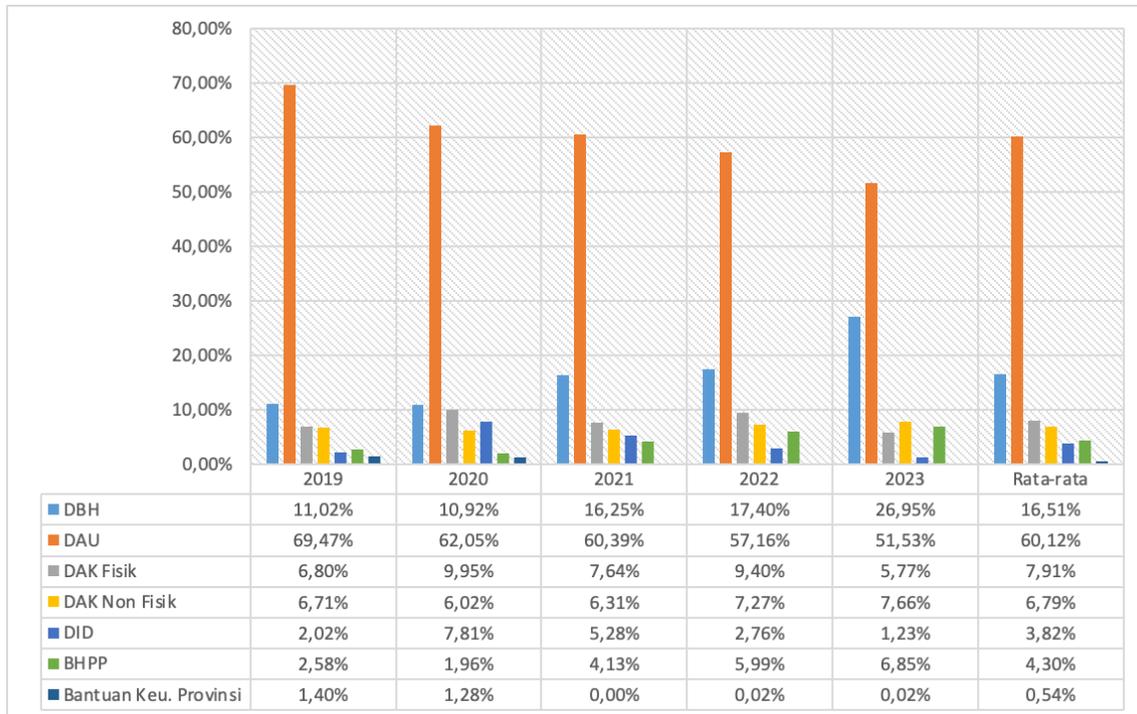
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau memiliki tren positif selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,57 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 14,35 persen, terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah pusat yang meningkat sebesar Rp101 juta. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi dengan persentase pertumbuhan realisasi sebesar 1,03 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari penurunan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang menurun sebesar minus 17,82 persen.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pendapatan transfer Kabupaten Lamandau pada lima tahun terakhir telah berada lebih dari 100 persen, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Rata-rata capaian kinerja selama periode 2019 hingga 2023 mencapai 104,47 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 107,20 persen, sedangkan realisasi capaian kinerja terendah untuk pendapatan transfer Kabupaten Lamandau terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 101,16 persen dari proyeksi anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun rincian pendapatan transfer yang terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b)

Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 52 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas diperoleh gambaran Pendapatan Transfer di Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2019-2023 didominasi oleh komponen DAU dengan rata-rata 60,12 persen pertahun. Dengan dominasi DAU, perencanaan keuangan Kabupaten Lamandau harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DAU. Hal ini juga perlu perhatian khusus karena proporsi Kontribusi DAU mencapai setengah dari penyumbang komponen pendapatan transfer. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil yang mencakup dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	62,79	75,01	15,04	27,25	119,46
2020	51,21	74,93	(18,45)	(0,11)	146,32
2021	60,68	112,86	18,49	50,63	186,00
2022	102,03	127,67	68,15	13,12	125,12
2023	195,65	228,04	91,75	78,62	116,56
Rata-rata		35,00	33,90	138,69	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Lamandau secara umum pada tahun 2019-2023 memiliki tren yang positif dengan sedikit kontraksi pada tahun 2020 dengan penurunan hanya sebesar 0,11 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 33,90 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,62 persen dengan capaian kinerja mencapai 116,56 persen, tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh pendapatan bagi hasil pajak yang bersumber dari peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dengan pertumbuhan mencapai 626% pada tahun 2023. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 0,11 persen. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terutama penurunan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang menurun sebesar 40,38 persen

namun dengan nilai absolut yang tidak begitu signifikan yaitu turun sebesar Rp21 juta.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Lamandau adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	472,67	472,67	2,26	2,26	100,00
2020	427,11	425,76	(9,64)	(9,92)	99,68
2021	419,46	419,46	(1,79)	(1,48)	100,00
2022	420,22	419,36	0,18	(0,02)	99,79
2023	425,03	435,96	1,14	3,96	102,57
Rata-rata			(1,57)	(1,04)	100,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer DAU Kabupaten Lamandau cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar minus 1,04 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,96 persen dengan capaian kinerja mencapai 102,57 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 9,92 persen dengan capaian kinerja 99,68 persen. Meskipun demikian, untuk realisasi capaian kinerja DAU Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2019-2023. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 100,41 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif sudah mendekati sesuai dengan proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi..

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan Dak Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	97,21	91,93	(1,24)	(4,07)	94,56
2020	111,75	109,57	14,95	19,19	98,05
2021	102,26	96,92	(8,49)	(11,55)	94,78
2022	129,95	122,28	27,08	26,17	94,10
2023	123,41	113,57	(5,03)	(7,12)	92,03
Rata-rata			5,45	4,52	94,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,52 persen per tahun. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 94,70 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 98,05 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2023 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima

Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan tingkat capaian sebesar 92,03 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Komponen Pendapatan Transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari DID yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	13,00	13,73	0,00	(48,17)	105,64
2020	53,61	53,61	312,41	290,38	100,00
2021	36,68	36,68	(31,58)	(31,58)	100,00
2022	8,88	20,27	(75,80)	(44,74)	228,35
2023	10,38	10,38	16,91	(48,80)	100,00
Rata-rata			55,49	41,31	126,80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,31 persen per tahun selama periode 2019-2023. Meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan transfer dana insentif daerah cukup tinggi, namun ketimpangan realisasi pertumbuhan terjadi. Dapat dilihat bahwa dalam kurun

waktu lima tahun hanya pada tahun 2020 realisasi pertumbuhan menunjukkan persentase yang positif. Disisi lain capaian kinerja menunjukkan rata-rata sebesar 126,80 persen. Kondisi ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 terdapat kasus pandemi COVID-19. Dengan ketentuan apabila terdapat sisa dana, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa dana DID tersebut untuk pendidikan (termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan), kesehatan (termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan digitalisasi pelayanan kesehatan), pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Lamandau untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lamandau, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	21,04	23,43	34,19	67,49	111,36
2020	17,06	16,54	(18,91)	(29,42)	96,93
2021	35,06	35,87	105,52	116,92	102,31
2022	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rata-rata		4,16	11,00	62,12

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Lamandau cenderung berfluktuatif

selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 11 persen pertahun. Pada tahun 2022 hingga 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah tidak lagi menerima aliran dana baik bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, ataupun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah, selama kurun waktu 2019-2023 terlihat kontribusi sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi 89,98 persen pertahun, sedangkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan masing-masing hanya 8,28 persen dan 1,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun Lamandau masih sebagian besar masih ditopang dari dana transfer. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah.



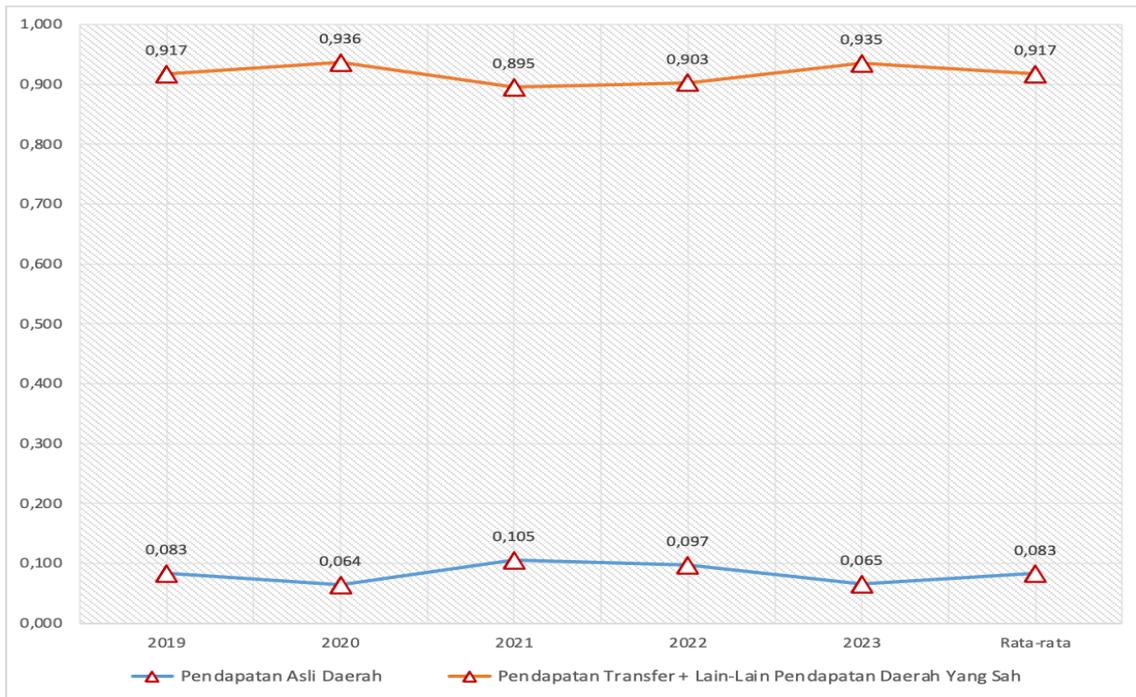
Gambar 2. 53 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Untuk melihat kemandirian Kabupaten Lamandau dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat kemandirian dan rasio

ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi "Belum Mandiri" yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$; "Menuju Kemandirian" yaitu $0,25 \leq IKF < 0,50$; "Mandiri" $0,50 \leq IKF < 0,75$; dan "Sangat Mandiri" yaitu $0,75 \leq IKF \leq 1,00$.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Lamandau 2019-2023.



Gambar 2. 54 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 derajat kemandirian Kabupaten Lamandau secara rata-rata sebesar 0,083 (atau 8,3 persen). Ini menunjukkan derajat kemandirian Kabupaten Lamandau dalam berotonomi masuk kategori “Belum Mandiri” ($0,00 \leq IKF < 0,25$;). Dilihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Lamandau terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih tinggi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata mencapai 0,917 (atau 91,7 persen) setiap tahunnya.

2.5.1.2 Capaian Kinerja Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	718,05	652,60	(10,64)	(8,96)	90,89
2020	772,05	683,68	7,52	4,76	88,55
2021	840,64	717,07	8,88	4,88	85,30
2022	905,74	828,56	7,74	15,55	91,48
2023	917,74	834,03	1,32	0,66	90,88
Rata-rata			2,97	3,38	89,42

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang cenderung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,38 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar minus 8,96 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pada Belanja Operasi serta Belanja Modal dengan masing-masing mengalami penurunan sebesar –9,68 persen dan –6,06 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 15,55 persen. Tingginya capaian realisasi ditopang oleh pertumbuhan belanja modal sebesar 38,01 persen pada tahun 2022.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,42 persen selama kurun waktu 2019-2023. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 91,48 persen dari target belanja daerah Kabupaten Lamandau yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 merupakan capaian kinerja terendah, dengan capaian sebesar 85,30 persen.

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan

belanja transfer. Selama kurun waktu 2019-2023, hanya ada tiga pos belanja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Ketiga kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2019-2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

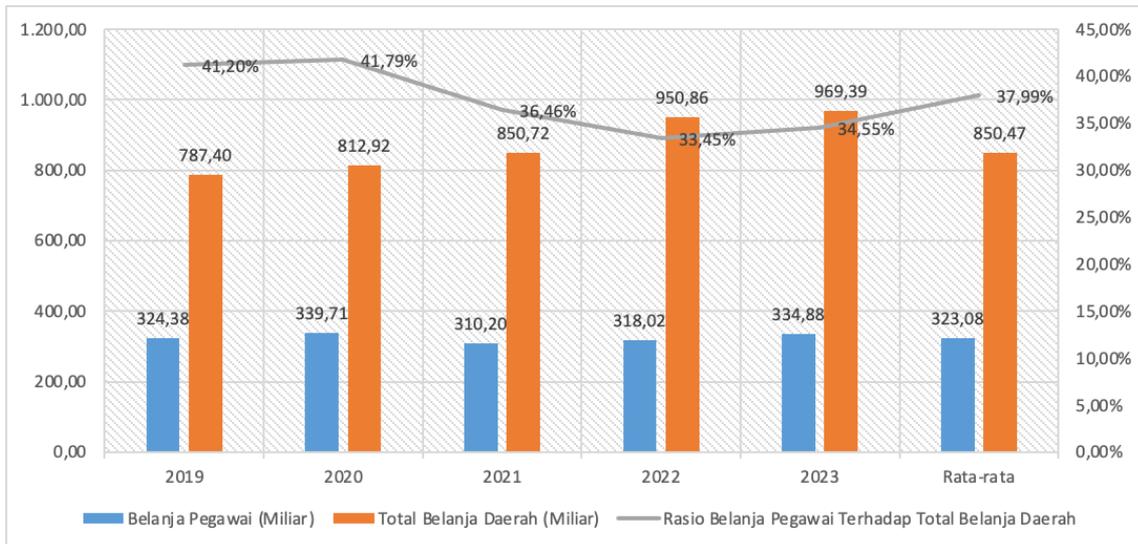
Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	576,02	520,13	(7,50)	(9,68)	90,30
2020	562,73	517,27	(2,31)	(0,55)	91,92
2021	612,18	557,25	8,79	7,73	91,03
2022	662,85	609,48	8,28	9,37	91,95
2023	721,20	653,23	8,80	7,18	90,58
Rata-rata			3,21	2,81	91,15

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar minus 9,68 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan belanja hibah sebesar –87,88 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 9,37 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi adanya kenaikan pada belanja bantuan hibah yaitu sebesar 66,40 persen pada tahun 2022. Dilihat dari rata-rata

realisasi capaian kinerja untuk Belanja Operasi Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,15 persen selama kurun waktu 2019-2023.

Khusus untuk besarnya porsi belanja pegawai perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Menurut Pasal 146 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30 persen dari total belanja. Belanja pegawai daerah yang dimaksud pada pasal tersebut tidak termasuk belanja khusus untuk tambahan penghasilan guru dan tunjangan guru yang berasal dari TKD. Berikut adalah grafik rasio Belanja Pegawai (tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru) terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Lamandau 2019-2023.



Gambar 2. 55 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan rata-rata persentase realisasi belanja pegawai Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebesar Rp323,08 miliar, dengan rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 37,99 persen. Jumlah persentase tersebut menunjukkan bahwa

proporsi belanja pegawai telah melewati ambang batas maksimal dalam alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD ini diundangkan.

2) Belanja Modal

Kategori belanja daerah berikutnya adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	141,40	132,39	(21,69)	(6,06)	93,63
2020	169,68	155,31	20,00	17,31	91,53
2021	221,06	157,64	30,29	1,50	71,31
2022	236,23	217,55	6,86	38,01	92,09
2023	191,54	180,80	(18,92)	(16,89)	94,39
Rata-rata			3,31	6,77	88,59

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,77 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar minus 16,89 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pada Belanja Modal Tanah sebesar 99,47 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 38,01 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 94,01%.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Modal Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,59 persen selama kurun waktu 2019-2023. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif baik terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat capaian sebesar 94,39 persen dari target belanja modal Kabupaten Lamandau yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 dengan capaian kinerja mencapai 71,31 persen.

3) Belanja Tidak Terduga

Kategori belanja daerah yang terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	0,64	0,08	157,36	0,00	12,99
2020	39,65	11,10	6109,33	13285,00	28,00
2021	7,39	2,19	(81,36)	(80,32)	29,57
2022	6,66	1,54	(9,88)	(29,54)	23,12
2023	5,00	0,00	(24,93)	(100,00)	0,00
Rata-rata			1230,10	2615,03	18,74

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lamandau menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 18,74 persen selama kurun waktu 2019-2023. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2615,03 persen per tahun, dengan dominasi realisasi pada tahun 2020. Pertumbuhan yang

tersebut menunjukkan lebih sedikit kejadian atau situasi darurat yang memerlukan pengeluaran tambahan. Seperti menurunnya kasus Covid-19, tidak ada bencana alam atau krisis yang signifikan.

2.5.1.3 Capaian Kinerja Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun cakupan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2019-2023 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	79,13	79,08	(16,84)	(16,61)	99,95
2020	133,93	135,05	69,26	70,77	100,83
2021	139,94	140,54	4,49	4,07	100,43
2022	185,26	185,26	32,38	31,82	100,00
2023	108,93	108,93	(41,20)	(41,20)	100,00
	Rata-rata		9,62	9,77	100,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Untuk pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 9,77 persen selama kurun waktu 2019–2023. Adapun penurunan terbesar untuk realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau terjadi pada tahun 2023 yang mencapai minus 41,20 persen. Dilihat dari target pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau juga cenderung fluktuatif secara rata-rata sebesar 9,62 persen selama kurun waktu 2019–2023 dengan pertumbuhan target serta realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai masing-masing 69,26 persen serta 70,77 persen.

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2019–2023. Secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau mencapai 88,59 persen selama kurun waktu 2019–2023. Capaian kinerja tertinggi berada pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 94,39 persen. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 71,31 persen. Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau untuk target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2019–2023 .

1) Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Selama kurun waktu 2019-2023, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 50 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	89,61	90,36	(16,43)	(15,47)	100,84
2020	143,03	143,05	59,62	58,31	100,01
2021	156,73	156,73	9,58	9,56	100,00
2022	196,13	196,13	25,14	25,14	100,00
2023	119,80	119,80	(38,92)	(38,92)	100,00
	Rata-rata		7,80	7,73	100,17

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam menyusun target serta merealisasikan penerimaan pembiayaan, hal ini dapat dilihat melalui capaian kinerja yang selalu berada pada 100 persen, dengan rata-rata capaian sebesar 100,17 persen. Rendahnya realisasi pertumbuhan pada tahun 2019, hal ini terjadi dikarenakan adanya pengembalian penyaluran DAU Rp0,24 miliar sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2023 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non fisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

2) Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019–2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 51 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	10,48	11,27	(13,26)	(6,53)	107,58
2020	9,10	8,00	(13,17)	(29,05)	87,91
2021	16,79	16,19	84,47	102,33	96,43
2022	10,87	10,87	(35,26)	(32,86)	100,00
2023	10,87	10,87	0,00	0,00	100,00
Rata-rata			4,56	6,78	98,38

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 rata-rata sebesar 6,78 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 98,38 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 107,58 persen. Sedangkan tahun 2020 merupakan capaian kinerja terendah dengan capaian kinerja 87,91 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lamandau digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau pada BUMD selama kurun waktu 2019–2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 52 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Penyertaan Modal Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	10,48	10,48	(13,26)	(13,12)	100,00
2020	9,10	8,00	(13,17)	(23,66)	87,91
2021	16,79	16,19	84,47	102,33	96,43
2022	10,87	10,87	(35,26)	(32,86)	100,00
2023	10,87	10,87	0,00	0,00	100,00
	Rata-rata		4,56	6,54	96,87

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penyertaan modal daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 rata-rata sebesar 6,54 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 96,87 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah berada pada tahun 2020.

Selain untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Lamandau dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah Kabupaten Lamandau. Adapun besarnya target pemberian pinjaman daerah Kabupaten Lamandau selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 53 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Lamandau, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pemberian Pinjaman Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tahun	Pemberian Pinjaman Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Rata-rata		0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberian pinjaman daerah.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis gambaran ringkas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2019-2023, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah untuk periode 2025-2029. Analisis ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pertimbangan utama dalam melakukan proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis tren dari data historis lima tahun terakhir untuk setiap sumber pendapatan. Selain itu, proyeksi juga mempertimbangkan pola pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di masa lalu, kondisi ekonomi makro saat ini, serta kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil proyeksi menjadi lebih realistis.

Mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro, tingkat pertumbuhan pendapatan, serta asumsi kondisi ekonomi makro yang berlaku, diproyeksikan bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah untuk periode 2025-2029 akan mencapai rata-rata sekitar 3,82 persen per tahun, meningkat dari Rp931,76 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1,11 triliun pada tahun 2029. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan transfer, dengan proyeksi pertumbuhan PAD sebesar 9,68 persen, sedangkan pendapatan transfer diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,11 persen. Hal ini menunjukkan upaya daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan kontribusi PAD. Sementara itu, berdasarkan data historis dua tahun sebelumnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak ada. Berikut adalah proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau untuk tahun 2025-2029.

Tabel 2. 54 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.552.799.638,00	129.125.115.932,94	130.074.046.054,50	135.296.739.424,84	142.797.859.950,32	9,68%
1.1	Pajak Daerah	54.212.212.731,00	75.191.266.826,77	73.270.545.748,50	75.429.740.464,23	79.633.536.492,73	11,17%
1.2	Retribusi Daerah	28.496.499.442,00	35.460.109.106,17	38.017.770.306,01	40.758.741.960,60	43.722.530.457,59	11,53%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.045.180.981,00	12.165.633.000,00	12.287.289.000,00	12.410.162.000,00	12.534.264.000,00	1,00%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.798.906.484,00	6.308.107.000,00	6.498.441.000,00	6.698.095.000,00	6.907.529.000,00	4,50%
2	PENDAPATAN TRANSFER	831.207.627.960,00	857.419.125.000,00	883.433.133.000,00	910.720.567.000,00	939.362.422.000,00	3,11%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.201.977.386,00	818.135.463.000,00	842.332.215.000,00	867.715.204.000,00	894.361.156.000,00	3,05%
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	184.203.565.000,00	197.160.542.000,00	211.005.269.000,00	225.850.648.000,00	241.769.899.000,00	7,04%
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.365.343.224,00	442.499.476.000,00	449.136.968.000,00	455.874.023.000,00	462.712.133.000,00	0,69%
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.640.356.000,00	21.156.365.000,00	21.685.274.000,00	22.227.406.000,00	22.783.091.000,00	2,50%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.922.880.162,00	72.695.952.000,00	74.513.351.000,00	76.376.185.000,00	78.285.590.000,00	2,50%
2.1.5	Dana Desa	67.069.833.000,00	68.411.230.000,00	69.779.455.000,00	71.175.044.000,00	72.598.545.000,00	2,00%
2.1.6	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.005.650.574,00	39.283.662.000,00	41.100.918.000,00	43.005.363.000,00	45.001.266.000,00	4,32%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	38.005.650.574,00	39.283.662.000,00	41.100.918.000,00	43.005.363.000,00	45.001.266.000,00	4,32%
2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL PENDAPATAN	931.760.427.598,00	986.544.240.932,94	1.013.507.179.054,50	1.046.017.306.424,84	1.082.160.281.950,32	3,82%

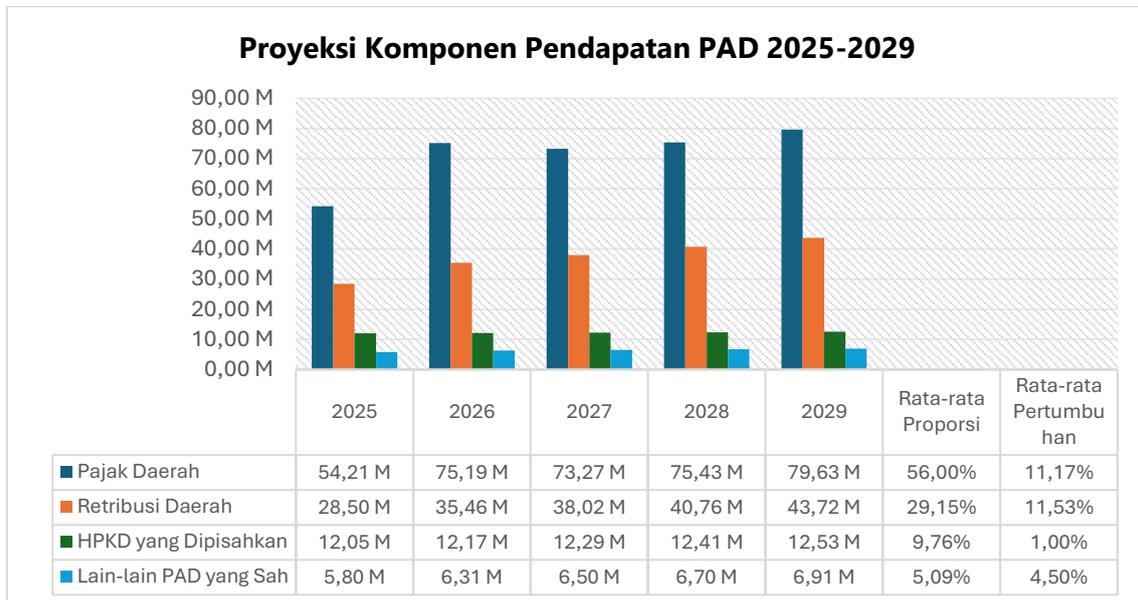
Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel proyeksi pendapatan, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai 9,68 persen per tahun selama periode 2025 hingga 2029. Nilai PAD diproyeksikan akan meningkat secara konsisten dari Rp100,55 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp142,8 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan upaya intensif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, termasuk pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Keberhasilan dalam mencapai target proyeksi ini sangat bergantung pada implementasi kebijakan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan, serta pengelolaan yang efisien dan efektif terhadap sumber-sumber PAD yang ada.

Melihat kontribusi dari masing-masing komponen PAD, Pajak Daerah diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 11,17 persen per tahun, menyumbang sekitar 56,00 persen dari total PAD. Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan besar sejak tahun 2025 dan terus meningkat hingga tahun 2029, dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,15 persen terhadap PAD. Peningkatan ini terutama didorong oleh kebijakan pemindahan pos pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari kategori Lain-lain PAD yang Sah ke kategori Retribusi Daerah.

Sementara itu, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HKPD) diproyeksikan tumbuh stabil dengan laju 1,00 persen per tahun, meningkat dari Rp12,05 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp12,53 miliar pada tahun 2029. Namun, kontribusi HKPD terhadap total PAD diperkirakan hanya sekitar 9,76 persen. Ini menunjukkan bahwa potensi kontribusi HKPD yang Dipisahkan, termasuk dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank Kalteng, serta sejumlah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Lamandau seperti PDAM Tirta Dharma, PD Bajurung Raya, dan PD BPR Sampuraga Cemerlang, terhadap total PAD tetap signifikan meskipun relatif kecil

dibandingkan komponen lainnya. Berikut adalah grafik yang menampilkan proyeksi kontribusi masing-masing komponen PAD selama periode 2025-2029.



Gambar 2. 56 Proyeksi Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Lamandau 2025-2029

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas, Pajak Daerah menjadi komponen terbesar dari PAD dengan proporsi rata-rata mencapai 56,00 persen. Ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling dominan dalam struktur PAD Kabupaten Lamandau. Pajak Daerah diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 11,17 persen per tahun, dari Rp54,21 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp79,63 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan ini dapat tercapai melalui upaya optimalisasi penerimaan pajak, yang didorong oleh peningkatan basis pajak dan peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak.

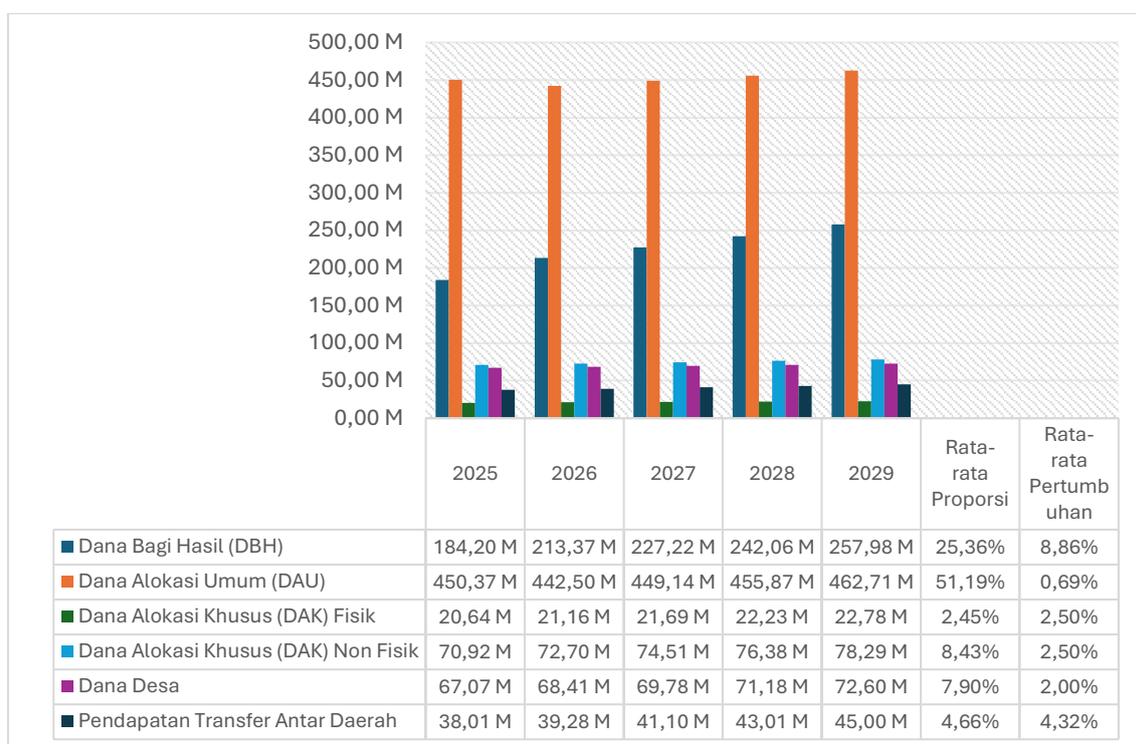
Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 29,15 persen terhadap total PAD, menjadikannya sumber pendapatan terbesar kedua setelah Pajak Daerah. Retribusi Daerah diperkirakan akan tumbuh dengan rata-rata sebesar 11,53 persen per tahun, dari Rp28,50 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp43,72 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan signifikan ini mencerminkan adanya kebijakan baru terkait retribusi daerah. Kebijakan yang diatur dalam UU

HKPD dan PP tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) menyatakan bahwa pendapatan yang diterima atas layanan BLUD, yang sebelumnya masuk dalam kategori Lain-lain PAD, kini dialihkan menjadi bagian dari penerimaan retribusi sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD. Namun, fleksibilitas dalam pemanfaatan pendapatan tersebut masih harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang BLUD.

HPKD menyumbang rata-rata sebesar 9,76 persen dari total PAD, menunjukkan bahwa kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan Pajak dan Retribusi Daerah. HPKD diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun, dari Rp12,05 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp12,53 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya potensi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau investasi daerah yang bersifat stabil dan tidak menunjukkan peningkatan yang besar. Komponen ini memiliki proporsi rata-rata sebesar 5,09 persen dari total PAD, menjadikannya kontribusi terkecil di antara komponen-komponen PAD lainnya. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,50 persen per tahun, dari Rp5,80 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp6,91 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya pendapatan dari sumber-sumber yang lebih bervariasi, meskipun tidak sebesar kontribusi dari pajak atau retribusi.

Selain penerimaan dari PAD, Pendapatan Transfer menjadi sumber utama penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer diperkirakan mencapai 2,66 persen per tahun, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp831,21 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp923,15 miliar pada tahun 2029. Meskipun laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan PAD, pendapatan transfer tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Berdasarkan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Transfer selama periode 2025-2029, struktur pendapatan transfer Kabupaten Lamandau didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Grafik

berikut ini menampilkan proyeksi kontribusi dari masing-masing komponen Transfer selama periode 2025-2029.



Gambar 2. 57 Proyeksi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Lamandau 2025-2029

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan proyeksi komponen pendapatan transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki proporsi terbesar, yaitu rata-rata 51,19 persen dari total pendapatan transfer Kabupaten Lamandau. Hal ini menegaskan bahwa DAU tetap menjadi sumber utama pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) berkontribusi rata-rata sebesar 25,36 persen terhadap total pendapatan transfer. Ini menjadikan DBH juga sebagai komponen penting dalam pendapatan transfer, dengan pertumbuhan yang cukup besar, yaitu rata-rata 8,86 persen per tahun. Nilai DBH diperkirakan meningkat dari Rp184,20 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp257,98 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan penerimaan dari sumber-sumber seperti pajak non-SDA dan pajak sumber daya alam. Sebagai daerah penghasil sawit, Kabupaten Lamandau secara langsung diuntungkan dari pendapatan DBH,

meskipun pendapatan dari DBH Sawit diproyeksikan stabil di Rp16,21 miliar dari tahun 2026 hingga 2029.

Kontribusi DAK Fisik terhadap total pendapatan transfer tergolong kecil, hanya sekitar 2,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa DAK Fisik tidak terlalu dominan dalam struktur pendapatan transfer Kabupaten Lamandau. Proyeksi pertumbuhan DAK Fisik sebesar 2,50 persen per tahun, meningkat dari Rp20,64 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp22,78 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang relatif moderat ini mencerminkan adanya alokasi anggaran yang stabil untuk proyek-proyek fisik.

Di sisi lain, DAK Non Fisik berkontribusi rata-rata sebesar 8,43 persen, menunjukkan perannya yang cukup besar dalam pendapatan transfer. Proyeksi pertumbuhan DAK Non Fisik juga sebesar 2,50 persen per tahun, serupa dengan DAK Fisik. Hal ini mencerminkan adanya alokasi dana yang stabil untuk mendukung program-program non-fisik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dana Desa memiliki proporsi rata-rata sebesar 7,90 persen dari total pendapatan transfer, yang mencerminkan komitmen yang besar terhadap pembangunan desa. Proyeksi pertumbuhan Dana Desa adalah sebesar 2,00 persen per tahun, dengan peningkatan dari Rp67,07 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp72,60 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan kesinambungan alokasi dana untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,66 persen terhadap total pendapatan transfer, yang menandakan adanya kontribusi dari kerja sama antar daerah. Komponen ini diperkirakan tumbuh sebesar 4,32 persen per tahun, dari Rp38,01 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp45,00 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan ini dapat

tercapai dengan adanya peningkatan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam struktur pendapatan bagi hasil.

Berdasarkan analisis proyeksi di atas, beberapa kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang perlu diarahkan pada:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi melalui perbaikan dan pemutakhiran database potensi pajak dan retribusi;
- d. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, *one stop service*, peningkatan efektifitas pelayanan, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana serta prasarana pada perangkat daerah penghasil;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang lebih efektif;
- g. Memperbaiki pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, pemantauan, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Kebijakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus mempertimbangkan nilai kekayaan yang dipisahkan serta manfaat

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;

- j. Meningkatkan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkontribusi bagi hasil laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k. Meningkatkan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat menghasilkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BLUD;
- l. Mengantisipasi potensi penurunan dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan di sektor lain agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari sumber yang fluktuatif; dan
- m. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten Lamandau dalam peningkatan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak; dan
- n. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lamandau meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah tidak dapat dipisahkan dari analisis pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Pengeluaran ini menjadi prioritas utama, umumnya dalam bentuk belanja dan pengeluaran periodik yang harus dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran wajib dan mengikat ini mencakup pengeluaran yang harus segera dibayar dan tidak dapat ditunda, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga utang, dan jenis belanja lainnya. Berdasarkan petunjuk dalam Lampiran Permendagri No. 86

Tahun 2017, Tabel T-B.10, pengeluaran dan belanja yang wajib, mengikat, dan menjadi prioritas utama meliputi Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan, belanja untuk penerimaan anggota dan pimpinan DPRD, serta operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah), Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil. Selain itu, terdapat juga Pengeluaran Pembiayaan, khususnya untuk pembentukan Dana Cadangan, pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal.

Berikut ini adalah proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

No	Uraian	PROYEKSI BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)					Rata-rata
		2025	2026	2027	2028	2029	Pertumbuhan
A	BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT						
1	Belanja Pegawai	377.267.029.307,00	385.970.822.000,00	394.877.662.000,00	403.992.331.000,00	413.319.734.000,00	2,31%
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	0,00%
3	Belanja Transfer	133.082.431.006,00	136.555.227.544,20	138.104.032.183,72	141.749.071.713,28	143.135.378.770,91	1,84%
	Jumlah Belanja Wajib dan Mengikat	511.407.360.313,00	523.583.949.544,20	534.039.594.183,72	546.799.302.713,28	557.513.012.770,91	2,18%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL	511.407.360.313,00	523.583.949.544,20	534.039.594.183,72	546.799.302.713,28	557.513.012.770,91	2,18%

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan, belanja wajib dan mengikat menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,18 persen per tahun, dari Rp511,40 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp557,51 miliar pada tahun 2029. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan belanja pegawai serta belanja transfer, termasuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Partai Politik, yang mencerminkan komitmen daerah dalam memenuhi kewajiban pengeluaran yang tidak dapat dihindari.

Belanja Pegawai diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 2,31 persen per tahun, dari Rp377,27 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp413,32 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan ini relatif moderat, mencerminkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak-hak pegawai seperti gaji dan tunjangan, atau adanya penambahan jumlah pegawai. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau perlu melakukan kajian terhadap struktur pegawai dan tunjangan untuk memastikan efisiensi. Hasil kajian ini dapat membantu mengurangi proporsi belanja pegawai yang sangat besar agar tidak melampaui batas maksimal alokasi belanja pegawai, yaitu 30 persen dari APBD, dengan masa penyesuaian hingga tahun 2027.

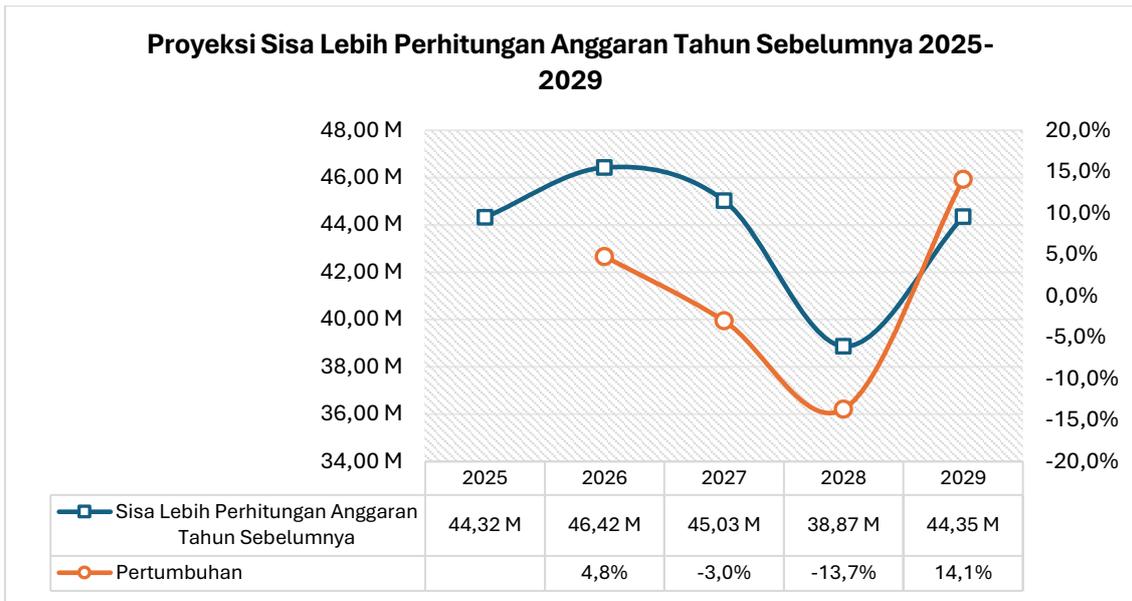
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diperkirakan akan tetap stabil pada Rp1,057 miliar dari tahun 2025 hingga 2029, menunjukkan bahwa alokasi bantuan keuangan kepada partai politik tidak akan berubah selama periode tersebut. Sebaliknya, Belanja Transfer diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 1,84 persen per tahun, dari Rp133,08 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp143,14 miliar pada tahun 2029. Meskipun pertumbuhan ini cukup lambat, namun tetap menunjukkan adanya peningkatan dalam alokasi pembagian hasil dan bantuan keuangan kepada desa, mencerminkan peningkatan pendapatan daerah kabupaten yang perlu didistribusikan kembali ke desa. Sementara itu, untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah tidak terdapat alokasi anggaran selama periode 2025-2029. Hal ini berarti pemerintah

daerah tidak berencana untuk menambah cadangan dana dan penyertaan modal daerah pada tahun-tahun tersebut.

2.5.2.3 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pertimbangan utama dalam proyeksi penerimaan pembiayaan daerah didasarkan pada analisis tren data historis dari lima tahun terakhir untuk setiap objek penerimaan pembiayaan. Selain itu, proyeksi juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah, kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, serta kebijakan defisit anggaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil proyeksi akan lebih realistis.

Dengan mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi makro, kebijakan efisiensi belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan tren Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), proyeksi laju pertumbuhan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA diperkirakan rata-rata sebesar 0,54 persen. Proyeksi ini dengan asumsi tidak akan ada perubahan signifikan dalam kebijakan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Grafik berikut menunjukkan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dari pos SiLPA untuk tahun 2025-2029 di Kabupaten Lamandau.



Gambar 2. 58 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Lamandau 2025-2029

Sumber: Olah Data 2024

Meskipun terdapat fluktuasi besar, dengan pertumbuhan positif di beberapa tahun dan negatif di tahun-tahun lainnya, rata-rata pertumbuhan tahunan hanya sebesar 0,54%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan yang dapat digunakan untuk menutup defisit atau sebagai dana cadangan. Selain itu, variabilitas ini mencerminkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, realisasi pendapatan, dan belanja.

Penurunan bertahap dalam SiLPA dapat diartikan sebagai indikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau semakin efektif dalam penyerapan anggaran, sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai (SiLPA) semakin berkurang. Hal ini bisa dianggap positif karena menunjukkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dan berkurangnya pemborosan. Namun, penurunan yang terlalu tajam juga bisa menjadi sinyal peringatan. Jika SiLPA menurun terlalu cepat tanpa adanya peningkatan signifikan dalam output atau hasil dari program-program yang didanai, hal ini bisa mengindikasikan kurangnya fleksibilitas anggaran untuk menghadapi kebutuhan mendadak atau perubahan situasi di masa depan. Oleh

karena itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu melakukan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan pembiayaan untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efisien dan efektif. Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas keuangan daerah dapat terjaga dan tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

- a. Pembiayaan: Diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran.
- b. Pendanaan APBD Defisit: Jika APBD diperkirakan mengalami defisit, pembiayaan dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang tidak akan membebani daerah.
- c. Pendanaan APBD Surplus: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- d. Penganggaran SiLPA: Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- e. Penyertaan Modal Daerah: Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.5.2.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan, belanja, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2025-2029 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Lamandau. Proyeksi total penerimaan, setelah dikurangi dengan proyeksi Belanja Pegawai, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Transfer menghasilkan angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Berikut adalah kapasitas riil kemampuan keuangan Lamandau pada Tahun 2025-2029 yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 56 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Rata-rata pertumbuhan
1	Pendapatan	931.760.427.598,00	986.544.240.932,94	1.013.507.179.054,50	1.046.017.306.424,84	1.082.160.281.950,32	3,82%
2	Pencairan cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	44.317.879.992,00	46.424.897.813,92	45.025.512.255,03	38.871.745.660,72	44.346.105.751,31	0,54%
	Total Penerimaan	976.078.307.590,00	1.032.969.138.746,86	1.058.532.691.309,54	1.084.889.052.085,55	1.126.506.387.701,63	3,66%
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	377.267.029.307,00	385.970.822.000,00	394.877.662.000,00	403.992.331.000,00	413.319.734.000,00	2,31%
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	1.057.900.000,00	0,00%
6	Belanja Transfer	133.082.431.006,00	136.555.227.544,20	138.104.032.183,72	141.749.071.713,28	143.135.378.770,91	1,84%
7	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
8	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
	Total Pengeluaran	511.407.360.313,00	523.583.949.544,20	534.039.594.183,72	546.799.302.713,28	557.513.012.770,91	2,18%
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	464.670.947.277,00	509.385.189.202,66	524.493.097.125,82	538.089.749.372,28	568.993.374.930,72	5,23%

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,23 persen per tahun, meningkat dari Rp464,67 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp568,99 miliar pada tahun 2029. Nilai ini diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran. Pertumbuhan total pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan total pengeluaran menunjukkan tren positif dalam kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang merupakan indikator baik untuk perencanaan jangka panjang. Meskipun pengeluaran tumbuh lebih lambat, pemerintah daerah perlu terus memantau pertumbuhan belanja pegawai dan belanja lainnya untuk memastikan bahwa anggaran tidak terbebani di masa depan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu waspada terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Risiko ini termasuk penurunan pendapatan dari sumber-sumber tertentu, perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, penting untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas yang paling mendesak dan strategis. Fokus utama harus tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas layanan publik.

Mengingat keterbatasan anggaran, pengalokasian anggaran harus didasarkan pada skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dengan fokus alokasi anggaran pada pendanaan prioritas pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah. Kebijakan penganggaran belanja daerah juga mempertimbangkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan. Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif, arah kebijakan belanja daerah ke depan akan diarahkan sebagai berikut:

- a. Mendesain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;

- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Belanja pembangunan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal internal daerah, tetapi juga harus memperhatikan anggaran dari sumber luar seperti APBN, kerjasama antara pemerintah dan swasta, peran *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sumber pendanaan lainnya, dengan menerapkan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Kerangka pendanaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Selain dari jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dimiliki, pendanaan juga perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat, terutama melalui Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029). Kebijakan alokasi belanja untuk program-program prioritas harus diarahkan untuk:

- a. Pengelolaan sawit berkelanjutan;
- b. Ekonomi daerah yang bernilai tambah dan berkelanjutan;
- c. Akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- d. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik;
- e. Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata; dan
- f. Ketahanan sosial dan stabilitas wilayah.

Berikut adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

Tahun Proyeksi	Prioritas I	Prioritas 2	Prioritas 3	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
2025	325.269.663.093,90	92.934.189.455,40	46.467.094.727,70	464.670.947.277,00
2026	356.569.632.441,86	101.877.037.840,53	50.938.518.920,27	509.385.189.202,66
2027	367.145.167.988,07	104.898.619.425,16	52.449.309.712,58	524.493.097.125,82
2028	376.662.824.560,59	107.617.949.874,46	53.808.974.937,23	538.089.749.372,28
2029	398.295.362.451,50	113.798.674.986,14	56.899.337.493,07	568.993.374.930,72

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

2.6 Permasalahan dan Isu strategis Daerah

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan kondisi problematis yang merupakan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamandau didasarkan pada berbagai data dan informasi yang telah disampaikan pada gambaran umum kondisi daerah. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Lamandau dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. 58 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamandau

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi ekonomi	Nilai tambah perekonomian daerah rendah	Kinerja sektor pertanian rendah	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Sarana dan prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian masih konvensional
			Bencana pertanian
			Belum optimalnya produktivitas sektor perikanan
			Diversifikasi komoditas perkebunan dan pertanian belum optimal
		Hilirisasi komoditas unggulan daerah rendah	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung industri belum memadai
			Ekosistem investasi sektor industri belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata belum optimal
			Promosi destinasi wisata kurang memadai
			Pengembangan SDM pelaku wisata belum optimal
			Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum memadai
			Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai
		Kinerja investasi di daerah belum optimal	Identifikasi potensi investasi belum optimal
			Promosi investasi belum memadai
		Kinerja ekspor barang dan jasa belum optimal	Kualitas komoditas ekspor belum bersaing
			Jaringan pemasaran ekspor belum optimal
		Konektivitas wilayah belum optimal	Banyaknya jalan dalam kondisi rusak dan belum beraspal
	Belum berkembangnya transportasi publik yang memadai		
	Kesejahteraan masyarakat belum memadai	Pemerataan pendapatan belum optimal	Kompetensi angkatan kerja rendah
			Kesempatan kerja yang layak terbatas
			Minat berwirausaha rendah
Pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, koperasi, dan bumdes belum optimal			
Kurangnya akses terhadap		Akses terhadap hunian layak masih kurang	

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		infrastruktur dasar permukiman	Masih kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak dan aman
Transformasi sosial	Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas	Kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi
			Ketersediaan sarana dan gedung pendidikan masih terbatas
			Distribusi tenaga pendidik masih belum merata
			Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
			Sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan pendidikan masih belum merata
			Manajemen dan tata kelola pendidikan masih belum optimal
			Pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal masih belum optimal
			Kesadaran masyarakat di beberapa wilayah terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas	Kebutuhan tenaga kesehatan di daerah masih belum terpenuhi
Distribusi tenaga kesehatan masih belum merata			

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan
			Sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Manajemen dan tata kelola kesehatan masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan masih belum optimal
			Kebijakan penerapan sistem kesehatan terintegrasi masih belum optimal
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan
			Pembudayaan hidup sehat dan upaya promotif-preventif masih belum optimal
			Layanan kesehatan rujukan masih belum optimal
			Masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana penunjang layanan di RS
	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial	Cakupan layanan perlindungan sosial masih terbatas pada kelompok tertentu

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Integrasi data penerima bantuan masih belum optimal
			Regulasi yang mengatur kriteria kemiskinan lokal masih belum tersedia
	Belum optimalnya kondusivitas sosial	Munculnya potensi gangguan K3 dan tindak kriminal	Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
			Langkah promotif dan preventif masih perlu ditingkatkan
		Pencegahan dini potensi kasus masih perlu ditingkatkan	
Transformasi tata kelola	Reformasi birokrasi belum berjalan optimal	Belum optimalnya profesionalitas ASN	Sistem merit baru diterapkan
			Kompetensi ASN belum optimal
		Kualitas pelayanan publik belum baik	Digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik belum memadai
			Jaringan telekomunikasi yang belum merata
			Inovasi pelayanan publik belum optimal
		Akuntabilitas kinerja belum optimal	Belum optimalnya pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah
			Ketersediaan dan pengelolaan data kinerja belum baik
	Perencanaan dan pengukuran kinerja belum berkualitas		
	Pengendalian dan evaluasi kinerja belum optimal		

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kolaborasi dengan berbagai stakeholders pembangunan, terutama dunia usaha dan dunia pendidikan belum optimal
Ketahanan ekologi	Degradasi lingkungan hidup	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Potensi kerusakan dan pencemaran pada <i>catchment area</i>
			Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal
			Belum optimalnya pengelolaan sampah terpadu
			Belum optimalnya pengelolaan limbah kelapa sawit
			Pengelolaan lumpur tinja belum optimal
			Pengawasan dan penegakan pelanggaran lingkungan hidup belum optimal
			Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Penanganan bencana belum optimal	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi bencana
			Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla belum optimal

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Lamandau dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lamandau serta berbagai isu pada level internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, selain menelaah gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagai dokumen yang memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional dan regional serta isu-isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

2.6.2.1 Isu Internasional

Identifikasi isu strategis global dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau akan menggunakan Roland Berger Trend Compendium 2050 yang dirilis oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Publikasi ini mengidentifikasi tren-tren yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia pada tahun 2050. Roland Berger mengidentifikasi 6 megatren yang akan membentuk dunia ke depannya. Megatren ini diadopsi dalam megatren rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Berikut penjabaran mengenai 6 megatren tersebut.

1) People & Society

Megatren pertama yang diidentifikasi oleh Roland Berger ialah dalam aspek *people and society* atau masyarakat. Dalam aspek ini terdapat isu-isu seperti populasi, migrasi, pendidikan dan tenaga kerja, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dalam analisis Roland Berger, aspek masyarakat menjadi fokus dari megatren itu sendiri, aspek ini mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh tren lainnya. Beberapa isu yang perlu diantisipasi dalam aspek ini adalah pertumbuhan penduduk yang berkurang yang diakibatkan oleh menurunnya tingkat kesuburan, dan mayoritas penduduk dunia dari total 9,7 miliar penduduk akan hidup di negara yang kurang berkembang. Tingkat pendidikan penduduk dunia juga

diproyeksikan akan meningkat. Terdapat tantangan dalam penegakan nilai hak-hak asasi manusia.

2) Health & Care

Megatren selanjutnya adalah aspek *health and care* atau pelayanan kesehatan. Isu-isu yang terdapat dalam aspek ini di antaranya adalah tantangan kesehatan global, pelayanan kesehatan masa depan, dan pengasuhan. Akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi satu isu krusial, terlebih bagi negara-negara berkembang. Hal ini terlihat dari data mengenai pengeluaran masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang sangat timpang antara negara berkembang dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan metode pengobatan dan teknologi kesehatan juga menjadi isu yang penting. Terakhir, proyeksi populasi yang cenderung terkonsentrasi di kelompok usia renta juga menjadi tantangan bagi kebutuhan pelayanan pengasuhan penduduk renta ke depannya.

3) Environment & Resources

Aspek selanjutnya dalam megatren yang diidentifikasi oleh Roland Berger adalah *environment and resources* atau lingkungan hidup dan sumber daya. Dalam aspek ini terdapat beberapa isu di antaranya adalah perubahan iklim dan polusi, biodiversitas dan sumber daya serta bahan mentah. Pemanasan global menjadi satu isu krusial dalam aspek ini di mana peningkatan suhu global perlu dibatasi pada rentang 1,5-2 derajat celcius melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Isu biodiversitas juga menjadi penting dan diperlukan untuk melindungi spesies-spesies yang terancam, serta isu sumber daya energi yang masih didominasi oleh energi fosil pada tahun 2050 jika tidak diintervensi dan produksi beberapa bahan mentah penting yang mendorong dependensi.

4) Technology & Innovation

Technology and innovation atau teknologi dan inovasi menjadi aspek selanjutnya yang diidentifikasi oleh Roland Berger sebagai salah satu megatren yang akan membentuk dunia. Isu-isu yang terdapat dalam aspek ini di antaranya adalah nilai teknologi, teknologi unggulan, serta manusia dan mesin. Perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan dunia ke depannya. Tantangan dalam perkembangan teknologi ke depan adalah redefinisi hubungan antara manusia dan mesin yang akan membuka peluang dan risiko tersendiri. Perkembangan teknologi-teknologi terbaru ini diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan nilai pasar sebesar 9,5 triliun USD pada tahun 2030. Tiga industri 4.0 yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang pesat adalah komunikasi 5G, *blockchain*, dan robotik. Sedangkan tiga teknologi hijau yang diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan pesat adalah hidrogen hijau, bahan bakar nabati dan kendaraan listrik. Teknologi lainnya seperti *nano-technology* dan pengeditan DNA diekspektasikan juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

5) Economics & Business

Aspek selanjutnya dalam megatren yang diidentifikasi adalah *economics and business* atau ekonomi dan bisnis. Dalam aspek ini diidentifikasi beberapa seperti perdagangan global dan rantai ekonomi, pergeseran kekuasaan, transformasi energi, dan tantangan hutang. Menurut Roland Berger, dunia saat ini sedang mengalami reorganisasi rantai pasok, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dan produksi energi yang mengarah ke energi berkelanjutan. Kondisi-kondisi ini diperparah dengan keadaan tingginya nilai hutang beberapa negara di dunia akibat beberapa peristiwa seperti Pandemi Covid-19 maupun perang di Ukraina yang membuat kondisi ekonomi akan semakin menantang untuk kedepannya.

6) Politics & Government

Aspek *politics and government* atau politik dan pemerintahan menjadi aspek megatren selanjutnya yang diidentifikasi oleh Roland Berger. Dalam aspek ini terdapat beberapa isu yakni risiko-risiko global, geopolitik, dan masa depan demokrasi. Tantangan yang semakin bersifat global ini diiringi dengan kondisi geopolitik yang memanas akibat munculnya gerakan-gerakan otokratik yang mengancam tatanan demokrasi. Roland Berger memandang kondisi geopolitik global semakin mengarah ke konfrontasi dan perdagangan dunia yang semakin terpolarisasi dengan blok ekonomi.

2.6.2.2 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Isu strategis di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dibagi menjadi lima isu besar, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Kategori isu ini harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Berikut adalah rincian dari isu strategis nasional di dalam RPJMN tahun 2025-2029.

1) Isu Strategis Transformasi Sosial

Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit

dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah.

Adapun perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

2) Isu Strategis Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah dalam rangka keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (*supply*) seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (*Research, Development, and Demonstration*) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun dari sisi permintaan (*demand*).

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai tambah di beberapa subsektor industri padat karya pun relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Indonesia masih berada pada era Industrial Revolution 2.0. Di sisi lain, perkembangan teknologi industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja industri.

Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal.

Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi tinggi untuk implementasinya.

Percepatan digitalisasi dihadapkan pada tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif. Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi lebih jauh untuk optimalisasinya.

Selain itu, rendahnya akses hunian layak dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan *urban sprawl* berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

3) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan. Ruang lingkup tata kelola dalam RPJMN 2025-2029 meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat.

Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrument untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral. Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya praktikpraktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi

persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi tata kelola. Pada akhirnya, persoalan-persoalan tersebut menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4) Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam rangka menjamin kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi dan teknologi informasi menjadi ancaman sekaligus peluang dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.

Dalam bidang politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan antarnegara, disrupti rantai pasok global, dan tren *global economic decoupling*. Kondisi eksternal diiringi dengan belum terselesaikannya perundingan batas wilayah negara serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5 tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku bunga acuan higher for longer, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya kualitas Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Transfer ke Daerah, serta imbal hasil obligasi yang relatif masih tinggi dibanding negara sekawasan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal.

Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan non bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

5) Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, Indonesia dihadapkan pada isu penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan

sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada 2028.

Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

2.6.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

Penelaahan terhadap isu strategis jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka menengah di level provinsi dengan kebijakan jangka menengah di Kabupaten Lamandau. Berikut adalah isu strategis jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2029.

1) Tata kelola pemerintah daerah yang buruk

Tata kelola pemerintah daerah yang buruk dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi anggaran, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan

2) Rendahnya kualitas dan daya saing SDM

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

3) Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur

Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur dapat menghambat mobilitas orang dan barang, meningkatkan biaya logistik, dan menghambat akses ke pasar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan kunci untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, serta memastikan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan.

4) Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan ketahanan pangan. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan.

5) Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan

Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan dapat mengancam ketahanan daerah dan stabilitas sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan infrastruktur yang tidak memadai. Meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi, dan meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan.

6) Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antar zona pembangunan

Pembangunan yang tidak merata antar daerah dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan menghambat pembangunan nasional. Membangun daerah yang tertinggal dan mempersempit ketimpangan antar daerah merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di daerah-daerah tertinggal, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

7) Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan SDA

Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam dapat menyebabkan nilai tambah yang rendah dan ketergantungan pada ekspor bahan baku. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Meningkatkan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor industri hilir, meningkatkan riset dan pengembangan teknologi, dan meningkatkan akses ke pasar internasional.

8) Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan

Inovasi dan teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi merupakan hal yang penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, meningkatkan akses ke internet dan teknologi digital, dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi.

2.6.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Lamandau

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kabupaten Lamandau. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, isu regional, hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan dan observasi lapangan, serta penelaahan KLHS RPJPD. Berikut merupakan isu strategis jangka panjang Kabupaten Lamandau periode 2025-2045.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Beberapa hal yang turut berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia adalah pemenuhan layanan bidang pendidikan, dan kesehatan. Bidang tersebut akan turut mempengaruhi aspek lain seperti kualitas tenaga kerja dan kondisi kehidupan sosial masyarakat di daerah.

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi SDM di suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan. Capaian IPM Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 6,32 poin selama sepuluh tahun terakhir. Beberapa komponen IPM seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH)) di Kabupaten Lamandau masih belum optimal. Upaya pemerataan dan peningkata kualitas pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Lamandau di masa yang akan datang.

Aspek perlindungan sosial juga perlu diperhatikan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter selain pendidikan dan kesehatan. Aspek perlindungan sosial menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial, serta pemberdayaan bagi individu/kelompok rentan. Perlindungan sosial didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, perempuan, dan pemuda. Beberapa permasalahan sosial seperti

kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, pemenuhan hak anak yang belum optimal, serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran menjadi fokus utama pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

2) Pembangunan Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif adalah salah satu isu strategis yang akan direspon oleh Kabupaten Lamandau pada periode perencanaan jangka panjang pada tahun 2025 hingga 2045. *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa ekonomi inklusif memiliki tiga pilar, yaitu 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2) pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan 3) pilar perluasan akses dan kesempatan.

Pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Lamandau dapat ditingkatkan dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian. Produksi kelapa sawit dan berbagai komoditas lainnya harus ditingkakan secara berkesinambungan. Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan juga menjadi perhatian utama yang harus diintervensi dengan kebijakan yang baik. Dukungan pengembangan dan pemerataan infrastruktur kewilayahan harus dibangun secara berkesinambungan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat dijalankan dengan intervensi yang sifatnya multidimensional. Pemerataan pendapatan dapat ditingkatkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah yang bekerja di berbagai sektor seperti pertanian dan usaha mikro. Penurunan kemiskinan dapat dijalankan dengan berbagai intervensi di rumpun ekonomi seperti perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan

produktivitas tenaga kerja, serta berbagai intervensi non-ekonomi dari berbagai rumpun seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dengan berbagai rincian kebijakan yang lebih mikro dan tepat sasaran.

Pilar perluasan akses dan kesempatan dapat dijalankan dengan cara penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Penurunan pengangguran dapat meningkatkan kesempatan masyarakat Kabupaten Lamandau untuk bekereja di sektor ekonomi unggulan dan potensial. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dijalankan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan ekonomi Kabupaten Lamandau.

3) Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Isu mengenai kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis yang sangat krusial dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Isu lingkungan hidup berkaitan dengan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai kegiatan ekonomi yang semakin beragam, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Lebih dari itu, pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lamandau juga mengalami tantangan. Kondisi ini tercermin melalui adanya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, pemanfaatan dan pengelolaan limbah sawit yang belum optimal, adanya kerusakan pada kawasan tangkapan air, dan pencemaran sungai yang juga merupakan sumber air di Kabupaten Lamandau.

Pemerataan kualitas infrastruktur wilayah juga menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Hingga saat ini Kabupaten Lamandau masih dihadapkan pada permasalahan konektivitas wilayah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya jalan rusak di Kabupaten Lamandau. Di samping itu sebagian besar jalan di Kabupaten Lamandau masih berupa perkerasan kerikil dan tanah, jalan

beraspal hanya mencapai 28,60 persen dari total panjang jalan kabupaten atau sepanjang 157,82 km. Lebih dari itu, transportasi publik di Kabupaten Lamandau juga belum berkembang. Selain infrastruktur transportasi, infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Lamandau juga masih belum optimal. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga berakses air minum mencapai 78,54 persen, sedangkan persentase rumah tangga berakses sanitasi mencapai 71,81 persen. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur wilayah di Kabupaten Lamandau masih perlu untuk ditingkatkan.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu penting untuk 20 tahun ke depan. Saat ini, setiap entitas negara dalam hal ini birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Birokrasi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat melalui implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berdampak, sehingga prinsip-prinsip *good governance* harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja di bidang tata kelola memiliki tren positif pada periode sebelumnya, karena nilai reformasi birokrasi selalu meningkat. Meskipun demikian, beberapa komponen reformasi birokrasi perlu adanya perbaikan dan peningkatan, seperti profesionalitas ASN dan sistem merit, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan inovasi daerah untuk pelayanan publik. Peningkatan profesionalitas ASN dan sistem merit dalam rangka penguatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, serta respon atas kebijakan reformasi birokrasi aktual. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah sehingga mampu menciptakan manajemen kinerja yang baik melalui berkaitan kinerja organisasi dengan individu dan memperkuat *crosscutting* antar perangkat daerah. Penguatan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam rangka memperkuat transparansi dan tertib administrasi karena saat ini banyak wilayah yang masih blankspot dan memiliki jaringan internet lemah sehingga membuat penyelenggaraan pemerintahan kurang efektif.

Proses digitalisasi pelayanan publik merupakan instrumen dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat terutama daerah dengan kondisi geografisnya luas, sehingga digitalisasi merupakan cara terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan. Selain digitalisasi, penguatan inovasi pelayanan pemerintah penting dilakukan sehingga layanan publik diakses secara cepat dan mudah oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lamandau juga harus mampu memperkuat kolaborasi dengan *stakeholders* lain seperti pihak swasta mengingat banyak perusahaan yang beroperasi di sana. Dengan adanya kolaborasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.6.2.5 Telaah RTRW Kabupaten Lamandau

Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau dikategorisasi dalam bentuk potensi, permasalahan, dan urgensi penanganan yang ditinjau dari kondisi struktur ruang yang berupa sistem pusat pelayanan dan orde kota, sistem perwilayahan pembangunan, sistem permukiman perdesaan dan perkotaan, serta sistem prasarana wilayah. Berikut ini merupakan rincian isu strategis Kabupaten Lamandau:

1) Potensi

Kabupaten Lamandau memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi-potensi ini berkaitan dengan pengaturan tata ruang di wilayah tersebut, meliputi:

- a) Terdapat *event* nasional di Kabupaten Lamandau yaitu Festival Babukung yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus;

- b) Kabupaten Lamandau memiliki potensi pariwisata berbasis alam dan budaya yang luar biasa, dengan beragam objek wisata yang menawarkan pesona sejarah, pesona kota air, keelokan alam, dan keunikannya dalam hal arsitektur.
- c) Tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Lamandau juga tidak kalah menarik dengan tarian tradisional yang terkenal di Pulau Jawa dan Pulau Bali;
- d) Kabupaten Lamandau memiliki kekayaan alam baik hutan tropis daerah pedalaman yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata;
- e) Terdapat potensi untuk diversifikasi produk wisata dan minat khusus yang mengandalkan sumber daya alam (hutan tropis dan sungai), seperti wisata petualangan tracking dan wisata olahraga arung jeram;
- f) Industri kreatif dengan karakter lokalitas khas yang dapat dikembangkan dan menjadi kerajinan tangan yang khas Kabupaten Lamandau seperti rotan sebagai salah satu bahan dasar untuk berbagai keperluan rumah tangga;
- g) Terdapat desa-desa yang mempertahankan nilai budaya tradisional dapat menjadi bekal potensial sebagai aset pengembangan desa wisata;
- h) Sudah tersedia Rumah Kreatif UKM Lamandau beralamat di Jl. Melati RT. 05 Nanga Bulik yang merupakan salah satu program unggulan;
- i) Terdapat kegiatan pertambangan bijih besi (KPC) yang sudah melalui mekanisme perizinan yang berlaku, namun demikian kegiatan pertambangan merupakan kewenangan provinsi;
- j) Kelurahan Nanga Bulik dari sistem perkotaan provinsi ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada Kabupaten Lamandau;

- k) Terdapat rencana pengembangan jalur kereta api yang akan menghubungkan Kabupaten Lamandau dengan wilayah sekitarnya;
- l) Terdapat rencana Bandar Udara Guci yang tertuang dalam RTRWN, RTR Pulau Kalimantan, dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Bandar Udara Guci berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memudahkan akses mendorong investasi, hingga meningkatkan konektivitas yang berkontribusi pada perkembangan kawasan sekitarnya;
- m) Terdapat rencana dan pengembangan Terminal Tipe A di Simpang Sepaku untuk melayani Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
- n) Terdapat rencana pengembangan kawasan transmigrasi berupa 6 (enam) kawasan, dengan operasional 1 (satu) kawasan yang sudah mulai masa pembangunan dan penempatan;
- o) Produktivitas perkebunan tertinggi di Kabupaten Lamandau adalah komoditas Kelapa Sawit. Hal ini mendorong potensi peningkatan ekonomi melalui produksi minyak kelapa sawit, peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap ekspor, dan pendapatan bagi petani dan industri terkait; dan
- p) Terdapat rencana pengembangan perkebunan kopi di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Delang.

2) Permasalahan

Di samping memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan, Kabupaten Lamandau juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, antara lain:

- a) Batas administrasi wilayah Kabupaten Lamandau masih belum final;
- b) Progres pembangunan Bandar Udara Guci di Desa Guci telah terhambat karena tergantung pada inisiatif dari pemerintah pusat, padahal sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah

menyediakan lahan seluas 128 ha, yang mencakup landasan pacu dan terminal;

- c) Terhambatnya pembangunan jalur kereta api dan stasiun sejak lama;
- d) Belum terealisasinya pembangunan Terminal Tipe A di Simpang Sepaku dan Terminal Tipe C di setiap Kecamatan;
- e) Belum meratanya jaringan listrik dan telekomunikasi di seluruh kawasan permukiman pada Kabupaten Lamandau;
- f) Masih rendahnya konektivitas wilayah dan aksesibilitas terhadap sumber pertumbuhan ekonomi;
- g) Masih terdapat penduduk miskin dengan jumlah penduduk sekitar 2.780 jiwa;
- h) Tidak optimalnya Pasar Induk dan Pasar Rakyat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;
- i) Setiap tahun, banjir terjadi sebagai akibat dari berkurangnya area penyangga di daerah hulu sungai. Pada tahun 2020, tercatat sebagai tahun dengan banjir paling parah dalam dekade terakhir, yang melanda 53 desa di 8 kecamatan. Banjir ini disebabkan oleh hujan yang sangat intens serta aliran air dari wilayah hulu sungai Arut;
- j) Kondisi jalan dengan rusak ringan rusak berat;
- k) Belum optimalnya upaya penghijauan kembali. Kegiatan reboisasi terakhir dilakukan pada tahun 2008;
- l) Masih rendahnya lahan pertanian yang dialiri oleh irigasi;
- m) Maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit;
- n) Alih fungsi lahan dari hutan hujan tropis menjadi perkebunan;
- o) Hutan Lamandau terancam memiliki komoditas yang homogen yaitu Kelapa Sawit. Hal ini akan merusak sistem penyangga air dan

menyebabkan wilayah Kabupaten rentan terhadap bencana banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, hingga bencana lainnya;

- p) Kecamatan Delang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata alam melalui SK Bupati, sudah dilakukan pembangunan fisik fasilitas wisata alam dan infrastruktur pendukungnya berupa jalan, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya. Namun pengadaan telekomunikasi hanya secara fisik, belum dilengkapi jaringannya, sehingga, masih tidak ada sinyal di daerah setempat;
- q) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamandau masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah;
- r) Kuantitas air baku belum memadai dan belum maksimalnya cakupan layanan sanitasi;
- s) Ketersediaan sarana prasarana lalu lintas masih belum memadai;
- t) Kurang optimalnya pembinaan sejarah lokal;
- u) Masih rendahnya layanan kepengurusan izin lokasi karena tidak mengikuti perkembangan masyarakat;
- v) Maraknya kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara berlebihan;
- w) Teknik konservasi tanah dan air belum optimal;
- x) Produksi sampah terus meningkat; dan
- y) Pengembangan destinasi wisata belum optimal. Objek-objek wisata banyak yang terbengkalai pembangunannya.

3) Urgensi penanganan

Berdasarkan potensi dan permasalahan diatas, maka urgensi penanganan utama yang perlu ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian batas administrasi wilayah Kabupaten Lamandau;

- b) Mempercepat pembangunan Bandar Udara Guci sebagai kunci konektivitas dan pengembangan ekonomi;
- c) Pembangunan jalur kereta api, Terminal Tipe A di Simpang Sepaku, dan Terminal Tipe C di beberapa kecamatan untuk peningkatan aksesibilitas wilayah;
- d) Pengembangan infrastruktur listrik dan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas;
- e) Menyusun rencana tindakan konkret untuk mengatasi masalah banjir, perbaikan jalan rusak, dan peningkatan infrastruktur lainnya guna meningkatkan konektivitas dan keamanan wilayah;
- f) Melakukan program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- g) Mengoptimalkan lokasi Pasar Induk dan Pasar Rakyat di Nanga Bulik serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu;
- h) Menyusun kebijakan lingkungan yang ketat untuk melindungi hutan dan ekosistem alam, serta mendorong program konservasi tanah dan air;
- i) Mengembangkan potensi desa-desa yang mempertahankan nilai budaya tradisional sebagai destinasi wisata, dan mendukung industri kreatif lokal seperti kerajinan tangan dari bahan lokal;
- j) Mengembangkan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk perkebunan dan pertanian, untuk menghindari alih fungsi lahan yang merugikan;

- k) Menyusun program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku serta cakupan layanan sanitasi guna meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- l) Mengimplementasikan kebijakan dan strategi multi-tahun untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
- m) Merancang rencana rehabilitasi dan pengembangan objek wisata untuk meningkatkan daya tarik pariwisata.

Hasil identifikasi isu strategis kewilayahan tersebut menjadi pertimbangan yang sangat mendasar dalam penentuan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2044 adalah Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai Daerah yang Berdaya Saing dengan Mengintegrasikan Sektor Pertanian, Pariwisata, dan Permukiman yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan serta Tangguh Terhadap Bencana. Tujuan tersebut keumudian dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk kebijakan dan strategi sebagai berikut:

No.	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan sektor berdaya saing	Membangkitkan pertumbuhan sektor pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan), pariwisata, dan industri sebagai landasan ekonomi yang memperkuat daya saing kabupaten
		Memberikan prioritas pada pengembangan kawasan ekonomi berdasarkan keunggulan lokal
		Menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan tujuan pertumbuhan ekonomi
		Menciptakan lingkungan investasi yang mendukung
		Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang untuk kegiatan ekonomi

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>Mendorong pengembangan industri sektor primer basis yang bersumber dari lokalitas</p> <p>Memfasilitasi pembentukan kluster industri sektor primer basis yang fokus pada karakteristik lokalitas</p>
2.	Peningkatan integrasi sektor pertanian, pariwisata, dan permukiman	<p>Mendorong kerjasama antara sektor pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan), pariwisata, dan permukiman untuk membentuk lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan potensi sektor pertanian dan perkebunan dengan fokus pada komoditas lokal unggulan</p> <p>Merancang strategi pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan alam dan budaya</p> <p>Mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan</p> <p>Mengembangkan paket wisata yang menggabungkan pengalaman pertanian, wisata alam dan kehidupan permukiman lokal</p>
3.	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas	<p>Meningkatkan jaringan transportasi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan konektivitas wilayah</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memantau dan meningkatkan efisiensi transportasi</p> <p>Memperbaiki dan meningkatkan sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman, industri, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah</p> <p>Meningkatkan prasarana lingkungan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan jaringan pengelolaan air limbah</p> <p>Memperkuat sistem pemantauan dan pemeliharaan prasarana lingkungan di setiap kawasan permukiman</p> <p>Mengembangkan sistem angkutan umum massal pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalan</p>

No.	Kebijakan	Strategi
		<p>provinsi untuk meningkatkan ketersediaan transportasi publik</p> <p>Melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi melalui koridor jalan tol untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi</p> <p>Meningkatkan pelayanan terminal penumpang pada Kawasan Perkotaan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna transportasi publik</p> <p>Meningkatkan sumber daya energi pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, tenaga surya, dan sumber energi alternatif lainnya</p> <p>Menggalakkan inovasi dan investasi dalam pengembangan energi terbarukan</p> <p>Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah</p> <p>Meningkatkan prasarana sistem pengendali banjir untuk mengurangi risiko banjir</p> <p>Memperkuat infrastruktur jaringan air baku untuk memastikan ketersediaan air yang memadai di seluruh wilayah</p>
4.	Pengembangan sumber daya alam berkelanjutan yang berketahanan terhadap bencana	<p>Memastikan pemenuhan RTH publik sebesar 30% dari kawasan perkotaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem</p> <p>Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan</p> <p>Menerapkan praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan</p> <p>Menetapkan regulasi yang memastikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam penggunaan ruang</p> <p>Meningkatkan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai, danau, dan bendungan sebagai bagian integral dari ekosistem</p>

No.	Kebijakan	Strategi
		Mempertahankan fungsi hutan sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan
		Meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya sebagai warisan lokal
		Mengendalikan pengembangan permukiman dan kegiatan budi daya di kawasan yang memiliki potensi bencana alam

Sumber: RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2044.

2.6.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lamandau

Secara keseluruhan, terdapat 241 indikator dan 169 sasaran untuk pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 241 indikator yang ada di Indonesia, terdapat 211 indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau. Adapun pada bagian ini, dilakukan perbandingan antara capaian dari setiap indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau dengan target capaian indikator yang tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2024 untuk mengetahui tingkat ketercapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau dan menentukan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan demi mewujudkan TPB di wilayah.

Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD disebutkan bahwa penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu: indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta indikator TPB yang tidak/belum ada data.

Adapun secara keseluruhan di Kabupaten Lamandau terdapat 75 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 44 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 17 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan 77 indikator yang tidak ada data. Capaian indikator TPB yang relevan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Lampiran I. Berikut tabel rangkuman capaian TPB Kabupaten Lamandau tahun 2019-2023.

Capaian indikator TPB di Kabupaten Lamandau pada 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dimana terdapat beberapa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, namun kemudian kembali meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya penurunan capaian TPB pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga terjadi pada indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target dimana dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah indikator ini mengalami penurunan, kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

Secara rinci, indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta tidak/belum ada data dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 59 Rangkuman Capaian TPB di Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023

No	TPB	SS	SB	BB	TAD
1	Tanpa Kemiskinan	6	9	3	6
2	Tanpa Kelaparan	6	2	0	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	8	4	9
4	Pendidikan berkualitas	6	5	1	1
5	Kesetaraan Gender	4	1	4	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	2	0	15

No	TPB	SS	SB	BB	TAD
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	6	0	8
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7	1	0	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	0	0	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	2	2	2	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	0	0	4
13	Penanganan dan Perubahan Iklim	1	0	1	0
15	Ekosistem Daratan	3	0	0	1
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	9	4	0	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	4	0	5
	Total	75	44	15	77

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029

Isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau diperoleh melalui telaah isu pada KLHS RPJPN Tahun 2025 - 2045, Rencana Strategis dinas, LAKIP dinas, Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau, P Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2018, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2018, D3TLH Kabupaten Lamandau Tahun 2019, hasil wawancara, konsultasi publik 1, serta capaian TPB (indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta tidak/belum ada data).

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) dimana identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dapat dilihat dari 10 muatan yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (Kapasitas D3TLH)

2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (Dampak LH)
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; (Kinerja JE)
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana)
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; (Status SDA)
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati)
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (Adaptasi PI)
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; (Kemiskinan)
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (Kesehatan)
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. (Hukum tradisional).

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau, muatan yang digunakan dalam melihat keterkaitan isu pembangunan berkelanjutan tidak ditemukan dalam konteks hukum tradisional sehingga dari 10 muatan di atas, yang digunakan untuk penilaian hanya poin 1 sampai dengan 9. Unsur-unsur tersebut dinilai terhadap isu pembangunan berkelanjutan paling strategis untuk memperoleh isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dinilai isu prioritas jika pada penilaian isu pembangunan paling strategis yaitu "strategis" atau "cukup strategis" dan memiliki jumlah nilai sedang dan tinggi pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan prioritas, sedangkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis dinilai bukan isu prioritas jika pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yaitu "cukup strategis" dan memiliki jumlah nilai rendah pada penilaian isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

Isu yang menjadi isu pembangunan berkelanjutan prioritas di dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau adalah isu yang memiliki penilaian akhir paling strategis, yaitu:

1. Penurunan kualitas air
2. Tingginya kerawanan bencana
3. Terjadinya alih fungsi lahan
4. Degradasi lingkungan
5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah
6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
7. Masih terdapat kemiskinan
8. Rendahnya kualitas pelayanan publik

2.6.3 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Lamandau

Identifikasi isu strategis Kabupaten Lamandau difokuskan pada kondisi berupa permasalahan maupun potensi yang perlu segera direspon dengan tepat untuk mendorong percepatan pembangunan. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan merujuk berbagai data dan hasil telaah dokumen rencana pembangunan.

Tabel 2. 60 Matriks Isu Strategis Kabupaten Lamandau

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Pertanian dan Perkebunan 2. Daya tarik wisata budaya dan alam	1. Nilai tambah perekonomian daerah rendah 2. Kesejahteraan masyarakat belum memadai 3. Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal 4. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan 5. Belum optimalnya kondusivitas sosial 6. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal 7. Degradasi lingkungan hidup	1. Penurunan kualitas air 2. Tingginya kerawanan bencana 3. Terjadinya alih fungsi lahan 4. Degradasi lingkungan 5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah 6. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 7. Masih terdapat kemiskinan 8. Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. People & Society 2. Economics & Business 3. Technology & Innovation 4. Environment & Resources 5. Politics & Government	1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia 2. Aging population negara maju 3. Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global 4. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral 5. Transisi energi untuk mendorong pemerataan	1. Tata kelola pemerintah daerah yang buruk 2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM 3. Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur 4. Degradasi lingkungan 5. Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan 6. Belum optimalnya pembangunan daerah pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antar zona pembangunan 7. Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan SDA 8. Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan	1. Pengelolaan Sawit Berkelanjutan 2. Ekonomi Daerah yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan 3. Akses dan Kualitas Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan 4. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik 5. Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Merata 6. Ketahanan Sosial dan Stabilitas Wilayah

Secara lebih rinci penjelasan mengenai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lamandau selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

2.6.3.1 Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lamandau. Produksi kelapa sawit pada tahun 2023 tercatat mencapai 791.258,75 ton, dengan rincian 86 persen di antaranya bersumber dari PBS dan 14 persen bersumber dari kebun rakyat. Meskipun keberadaan kelapa sawit memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat, keberadaan kelapa sawit juga berpotensi mengancam keanekaragaman hayati dan mengganggu keberlanjutan ekologi apabila tidak dikelola dengan bijaksana.

Pengembangan sawit di Kabupaten Lamandau dihadapkan pada permasalahan dan tantangan berupa maraknya alih fungsi lahan sawah dan hutan hujan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan komoditas yang semakin homogen yakni kelapa sawit. Hal ini berpotensi merusak sistem penyangga air dan menyebabkan wilayah kabupaten semakin rentan terhadap bencana banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, hingga bencana lainnya.

Pengelolaan sawit berkelanjutan menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Lamandau. Di masa mendatang, pengelolaan sawit tidak hanya difokuskan pada nilai ekonomi saja melainkan harus dapat memperhatikan kelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan seperti mendorong pengembangan industri kelapa sawit berbasis *zero waste*. Hal ini karena berbagai limbah yang dihasilkan dari kelapa sawit dapat diolah untuk bahan bakar, pakan ternak, pupuk, bahan industri, biogas, bahkan listrik. Selain itu, pengembangan kelapa sawit perlu memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegakan pengendalian tata ruang menjadi agenda penting dalam mendorong terwujudnya pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

2.6.3.2 Ekonomi Daerah yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Perekonomian Kabupaten Lamandau terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun cenderung berfluktuasi. Perekonomian daerah tumbuh 4,07 persen per tahun mendorong PDRB daerah ke angka 4,28 triliun rupiah berdasar harga konstan atau 7,52 triliun rupiah berdasar harga berlaku pada tahun 2023. Namun demikian, laju pertumbuhan yang positif belum mampu mengubah posisi Kabupaten Lamandau sebagai daerah dengan nilai PDRB terendah ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau baru dapat berkontribusi sebesar 3,60 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh Kabupaten Lamandau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Lamandau memiliki potensi di sejumlah sektor seperti sektor pertanian dan industri pengolahan karena keberadaan tanaman kelapa sawit serta potensi akan produk turunan dari sawit itu sendiri. Namun, produktivitas dan hilirisasi produk sawit masih belum berjalan optimal dikarenakan pengelolaannya yang belum berkelanjutan sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih rendah dan berisiko merusak lingkungan. Padahal, pengelolaan sawit yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan memastikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain masalah produktivitas kelapa sawit, persoalan lain yang turut memerlukan perhatian adalah hilirisasi produk sawit yang belum berjalan optimal. Hingga saat ini, hasil olahan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau baru sampai pada *Crude Palm Oil* (CPO), padahal seluruh bagian buah kelapa sawit dapat diolah dan masih dapat diturunkan menjadi produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan digunakan dalam industri kosmetik, sabun, cokelat, dan biodiesel.

Keberadaan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan Kabupaten Lamandau menjadi sumber pendapatan bagi mayoritas penduduk. Sejumlah

penduduk juga melakukan alih komoditas dari tanaman pangan dan hortikultura ke komoditas kelapa sawit. Pekerja di bidang peternakan dan perikanan juga beralih profesi menjadi pekerja di bidang perkebunan sawit baik sebagai petani maupun tenaga kerja di perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap komoditas kelapa sawit meskipun belum dapat menjanjikan sumber penghidupan yang layak. Pada tahun 2022, tercatat terdapat 3.639 orang yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian dan 2.433 orang pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Angka tersebut menunjukkan sejumlah pekerja belum mendapatkan sumber pendapatan yang layak.

2.6.3.3 Akses dan Kualitas Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat dan produktif. Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri merupakan subyek sekaligus obyek dalam proses pembangunan di suatu daerah. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan secara umum. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Lamandau menunjukkan tren yang meningkat. IPM mengalami peningkatan 2,82 poin dari tahun 2019-2023. Namun, capaian tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, IPM Lamandau mencapai 73,44 dan Kalimantan Tengah 73,73.

Secara operasional, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan melalui pemenuhan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Dalam pelayanan pendidikan, Kabupaten Lamandau masih menghadapi beberapa tantangan di antaranya jumlah dan sebaran guru belum optimal, sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas, pengelolaan sekolah PAUD masih kurang, serta akses menuju layanan pendidikan

masih perlu dioptimalkan. Di sisi lain, masih terdapat angka putus sekolah karena lebih tertarik bekerja di industri sawit, sehingga berpengaruh terhadap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk itu, dibutuhkan terobosan layanan pendidikan yang berkualitas serta mampu meningkatkan partisipasi pendidikan pada semua jenjang.

Selain pendidikan, upaya pembangunan kesehatan yang berkualitas turut menjadi hal penting guna membangun manusia yang sehat dan produktif. Pembangunan kesehatan Kabupaten Lamandau masih memiliki tantangan di antaranya belum optimalnya layanan kesehatan primer dan rujukan, masih terbatasnya sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai, 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas belum terpenuhi, ketersediaan dokter spesialis dan sub spesialis masih terbatas, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal, serta akses menuju layanan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masih perlu ditingkatkan. Pembangunan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor terutama untuk menurunkan kejadian kasus yang cukup tinggi seperti stunting, TBC, hipertensi, AKI, AKB, dan sebagainya. Dalam pembangunan kesehatan perlu memperhatikan komponen sistem kesehatan di antaranya peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan, SDM kesehatan, pembiayaan kesehatan, ketahanan kesehatan, teknologi kesehatan, dan tata kelola kesehatan.

2.6.3.4 Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik menjadi isu strategis untuk 5 tahun ke depan. Implementasi reformasi birokrasi masih menuai tantangan besar, meskipun kinerja reformasi birokrasi berjalan cukup baik. Kinerja penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Dari predikat CC dengan nilai 54,62 selama 2020 hingga 2022 menjadi predikat B dengan nilai 61,84 pada tahun 2023. Hal yang penting untuk diselesaikan selama satu periode ke depan untuk meningkatkan

reformasi birokrasi, yaitu akuntabilitas kinerja, penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN, pelayanan publik dan digitalisasi. Akuntabilitas kinerja belum optimal yang ditandai dengan nilai SAKIP Daerah masih berpredikat B selama 5 tahun terakhir. Penerapan sistem merit masih rendah karena baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga membuat profesionalitas ASN juga rendah. Kondisi ini harus segera diselesaikan agar implementasi birokrasi lebih efektif.

Digitalisasi penting untuk digalakkan di sektor pelayanan publik. Saat ini, pelayanan publik belum berjalan baik karena proses digitalisasi layanan belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan predikat SPBE yang masih cukup. Di samping itu, masih terdapat beberapa wilayah *blankspot* sehingga membuat penyelenggaraan pelayanan publik tidak efektif dan efisien dan akses terhadap layanan yang masih sulit. Selain memperkuat digitalisasi dengan penyediaan jaringan internet yang terjangkau dan berkualitas serta dukungan infrastruktur TIK yang memadai, peningkatan inovasi dalam pelayanan publik juga perlu ditingkatkan. Inovasi daerah dalam pelayanan publik penting untuk dilakukan mengingat kondisi geografis Kabupaten Lamandau yang cukup sulit sehingga membuat akses masyarakat terhadap layanan publik belum optimal. Oleh karena itu, inovasi menjadi strategi yang tepat untuk memudahkan akses terhadap pelayanan publik. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik difokuskan pada peningkatan ekosistem inovasi daerah, seperti kebijakan, kelembagaan, budaya, dan kemitraan.

2.6.3.5 Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Merata

Kabupaten Lamandau memiliki tantangan besar untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Lamandau meliputi beberapa aspek penting, seperti jaringan jalan, air bersih dan sanitasi, transportasi, telekomunikasi, energi, dan fasilitas publik. Hingga saat ini Kabupaten Lamandau masih dihadapkan pada permasalahan konektivitas wilayah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya

jalan rusak di Kabupaten Lamandau. Di samping itu sebagian besar jalan di Kabupaten Lamandau masih berupa perkerasan kerikil dan tanah, jalan beraspal hanya mencapai 28,60 persen dari total panjang jalan kabupaten atau sepanjang 157,82 km. Lebih dari itu, transportasi publik di Kabupaten Lamandau juga belum berkembang. Selain infrastruktur transportasi, infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Lamandau juga masih belum optimal. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga berakses air minum mencapai 78,54 persen, sedangkan persentase rumah tangga berakses sanitasi mencapai 71,81 persen.

Pemerataan infrastruktur wilayah di Kabupaten Lamandau masih perlu untuk ditingkatkan. Kualitas jalan yang baik dan pengembangan transportasi umum yang efisien akan mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, akses internet dan energi juga sangat penting. Penyediaan akses internet yang cepat dan merata di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di daerah pedesaan, sangat penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian peningkatan jaringan listrik perlu untuk memastikan bahwa semua desa dan komunitas memiliki akses terhadap listrik yang handal, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau sumber energi terbarukan lainnya. Oleh karena itu, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong perekonomian, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

2.6.3.6 Ketahanan Sosial dan Stabilitas Wilayah

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu wilayah yang menjadi jalur perlintasan Trans Kalimantan yang menghubungkan antar provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Letak geografis Kabupaten Lamandau yang cukup strategis sebagai wilayah perlintasan menjadi sebuah kondisi yang perlu direspon dan diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan alur

masuk dan keluar barang yang melewati Kabupaten Lamandau. Sejauh ini, isu terkait perlintasan narkoba menjadi satu poin penting yang perlu direspon, mengingat fenomena narkoba merupakan fenomena yang multidimensi, berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan mulai dari keluarga, kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.

Upaya untuk menjaga ketahanan sosial di Kabupaten Lamandau perlu menjadi fokus dan perhatian dari pemerintah daerah. Pencegahan peredaran narkoba sebagai isu krusial di Kabupaten Lamandau menjadi titik pijak penting bagi efektivitas dan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Upaya pencegahan dapat dilakukan mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga hingga pemangku kepentingan di level daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial dan stabilitas wilayah di Kabupaten Lamandau, penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama menjadi hal yang perlu untuk terus dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Daerah

Visi adalah pernyataan umum yang menggambarkan kondisi ideal suatu daerah yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil dari proses pembangunan selama lima tahun. Penyusunan visi RPJMD berpedoman pada visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun Visi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 adalah:

VISI RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025-2029:

“Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan”



MAJU

Daerah yang berkembang dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Kemajuan ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.



UNGGUL

Terbentuknya SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki kompetensi di berbagai bidang. Dibutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.



SEJAHTERA

Kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Dibutuhkan Pengembangan usaha lokal, investasi dalam sektor produktif, serta program bantuan sosial tepat sasaran.



BERKEADILAN

Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh manfaat pembangunan, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk dalam aspek aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur.



BERKELANJUTAN

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Setiap aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun infrastruktur, dapat berjalan secara harmonis dan berkesinambungan.

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju: Kata Maju dimaknai sebagai sebuah kondisi dimana Kabupaten Lamandau menjadi daerah yang berkembang dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Kemajuan ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi dari daerah pedesaan hingga perkotaan menjadi faktor penting dalam mendorong

pemerataan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan

Unggul: Kata unggul dimaknai sebagai sebuah kondisi untuk mendukung pencapaian Lamandau maju, mengingat kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Kabupaten Lamandau menargetkan terbentuknya SDM yang unggul, berkualitas, dan memiliki kompetensi di berbagai bidang. Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup aspek budaya, kesehatan fisik dan mental, serta kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, masyarakat Kabupaten Lamandau dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan daerah

Sejahtera: Kata sejahtera berarti menggambarkan sebuah kondisi kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha lokal, investasi dalam sektor produktif, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran, Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Berkeadilan: Prinsip keadilan dalam pembangunan menekankan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh manfaat pembangunan, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan. Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk dalam aspek aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur. Dengan pemerataan pembangunan, masyarakat di daerah terpencil maupun perkotaan dapat menikmati fasilitas dan layanan yang setara, sehingga meningkatkan kualitas

hidup secara menyeluruh. Pembangunan yang adil juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.

Berkelanjutan: Prinsip berkelanjutan adalah suatu kondisi di mana proses pembangunan yang telah berjalan dengan baik terus dilanjutkan dan ditingkatkan guna menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diharapkan setiap aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun infrastruktur, dapat berjalan secara harmonis dan berkesinambungan.

3.1.2 Misi Daerah

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan"*, terdapat 6 (enam) Misi yang akan dilaksanakan.

- Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan *e-governance* dan *good governance*
- Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing
- Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

- Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan
- Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya
- Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Berikut penjelasan pada masing-masing Misi:

Misi 1: meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, unggul, dan dinamis dengan mengedepankan *e-government* dan *good governance*

Agenda pembangunan tata kelola pemerintahan Kabupaten Lamandau menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, unggul, dan dinamis sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Profesionalisme aparatur pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sistem merit, peningkatan kompetensi ASN, dan menerapkan sistem kerja yang berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang unggul, prinsip *good governance* menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Lamandau dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu, penerapan e-government menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara transparan dan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, Kabupaten Lamandau dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih unggul dan dapat mewujudkan visi daerah.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing

Misi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi. Misi ini juga memiliki fokus pada aspek keluarga, pemuda, gender, dan anak. Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan berdaya saing, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Lamandau dapat diawali dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini melalui institusi pendidikan dan program sosial, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat bertujuan untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan global serta mampu bersaing di dunia kerja dan usaha. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki kualitas pendidikan formal dan non-formal, meningkatkan layanan kesehatan yang bermutu dan merata, menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi. Penguatan Kerjasama lintas sektor menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Lamandau. Terciptanya SDM yang

berkualitas, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ketiga menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lamandau. Transformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dengan memanfaatkan sektor unggulan, seperti perkebunan, perikanan, pertanian, industri, dan pariwisata. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil.

Salah satu strategi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi ini adalah dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui penerapan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pengembangan industri berbasis sumber daya lokal juga harus diperkuat agar dapat menciptakan nilai tambah bagi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sektor pariwisata juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kabupaten Lamandau memiliki potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Dengan mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan, sektor ini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pelestarian lingkungan dan budaya daerah.

Secara keseluruhan, transformasi ekonomi ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Lamandau. Dengan mengoptimalkan potensi daerah dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan

Misi kelima ini menjadi fondasi yang sangat vital dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan terutama untuk memperlancar konektivitas wilayah hingga ke kawasan pedesaan sehingga mendorong integrasi antara kawasan pedesaan dan perkotaan yang semakin kuat. Aksesibilitas wilayah yang semakin merata dan berkualitas akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, aksesibilitas wilayah akan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta menekan disparitas harga kebutuhan pokok, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten.

Lebih dari itu, akses infrastruktur dasar yang semakin merata seperti air minum dan sanitasi yang layak akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat menjadi lebih sehat. Adanya lingkungan yang sehat dan nyaman diharapkan dapat memicu peningkatan produktivitas masyarakat di dalam berbagai bidang. Dengan demikian pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki arti penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, melainkan juga

mendorong terwujudnya transformasi pembangunan Kabupaten Lamandau di berbagai bidang.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya

Kabupaten Lamandau menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pembangunan SDM ini tidak hanya berkaitan secara individu, melainkan juga dalam kelompok kolektif, yakni pada kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya. Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan budaya lokal.

Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan pembangunan tatanan sosial yang harmonis sebagai kebutuhan mendesak guna menciptakan lingkungan yang damai dan berkeadaban. Masyarakat Kabupaten Lamandau dikenal kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Hal itu menjadikan Kabupaten Lamandau memiliki modal sosial yang kuat untuk mewujudkan kehidupan bersama yang dilandasi nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan saling menghormati.

Nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga menjadi sumber etika sosial yang mengajarkan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Pada sisi lain, budaya lokal yang diwariskan turun-temurun turut memperkaya praktik kehidupan sehari-hari dalam bentuk tradisi gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. Namun, di tengah arus globalisasi dan tantangan modernitas, integrasi antara nilai-nilai agama, sosial, dan budaya sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari intoleransi, konflik sosial,

hingga lunturnya identitas budaya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati, dan berbudaya menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial dan membangun masa depan bersama yang inklusif.

Peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya dapat dilakukan melalui penerapan pendidikan karakter, dialog lintas budaya dan agama, serta pelestarian kearifan lokal. Masyarakat dapat didorong untuk tumbuh dalam semangat kebersamaan yang menghargai perbedaan. Harapannya Kabupaten Lamandau tidak hanya mampu merawat warisan kebudayaan dan keimanan, tetapi juga menanamkan fondasi yang kokoh bagi pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

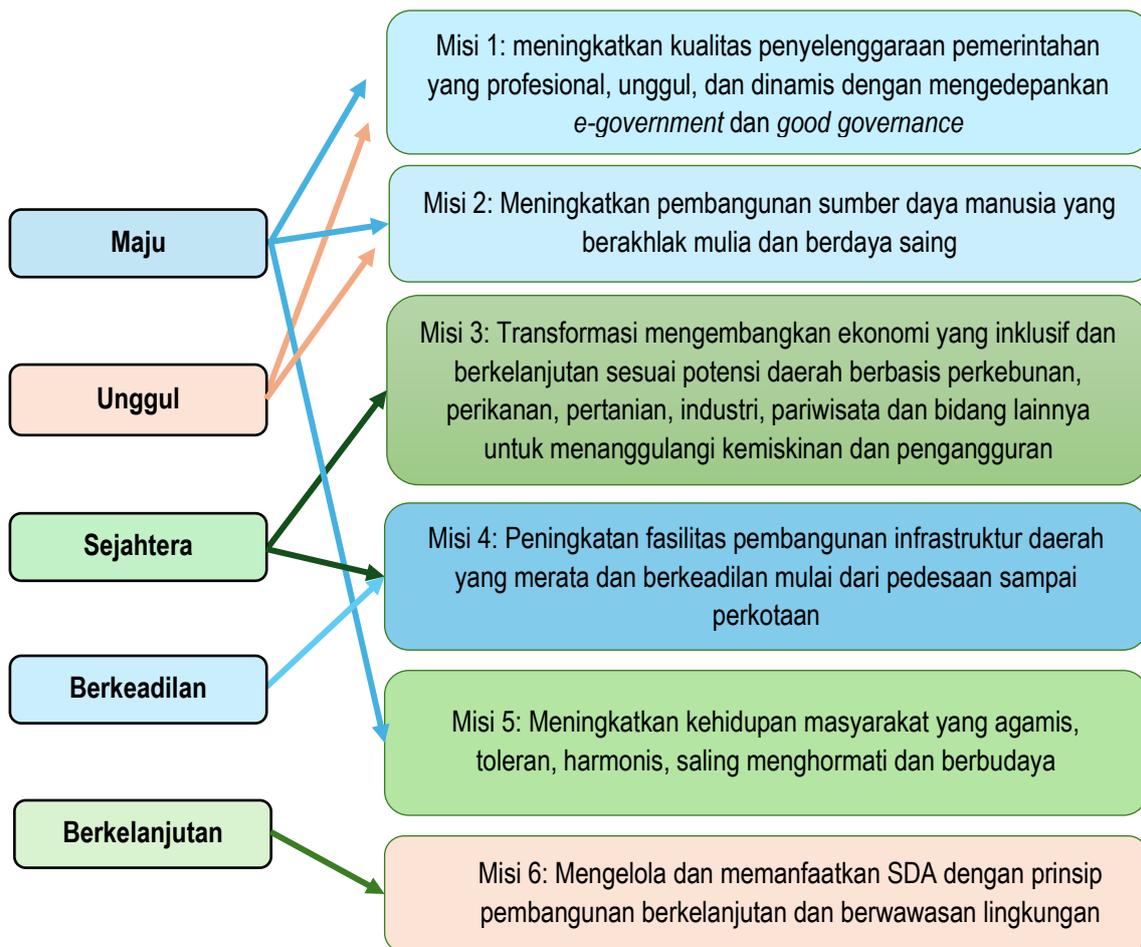
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam yang diarahkan guna dapat dikelola dengan prinsip prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi fokus pelaksanaan misi ini. Implementasi misi ini diharapkan memberikan dampak yang positif dalam lima tahun ke depan, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Mengelola dan memanfaatkan SDA dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan potensi SDA secara menyeluruh, melaksanakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi SDA yang merusak lingkungan. Kemudian prinsip pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya untuk dapat mengintegrasikan prinsip berkelanjutan

dalam setiap sektor pembangunan, pengembangan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berdaya saing, serta mendorong investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berwawasan lingkungan dimaknai untuk menjaga bahwa segala aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan adalah memperkuat regulasi dan pemantauan lingkungan, rehabilitasi, serta edukasi terhadap masyarakat. Dengan demikian Misi ini diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menjadikan Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang maju secara ekonomi namun tetap lestari secara ekologis, melindungi ekosistem hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan khas, dan menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

Enam misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang tertuang dalam rumusan visi, sehingga dapat mendukung terwujudnya pencapaian dan target Pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan antara visi dan misi dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:



Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa setiap misi yang dirumuskan memiliki keterkaitan dengan setiap kata kunci yang terdapat pada Visi RPJMD Kabupaten Lamandau. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergitas antara kondisi yang ingin dicapai dengan cara yang akan dilakukan. Selain itu, visi dan misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 juga dirumuskan dengan memerhatikan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Penbandingan Visi dan Misi RPJMD Lamandau, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	RPJM Nasional 2025-2029
<p>Visi: Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai NKRI Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045</p>	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan</p>	<p>Visi: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045</p>
<p>Misi 5: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045</p>	<p>Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan <i>e-governance</i> dan <i>good governance</i></p>	<p>Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</p>
<p>Misi 2: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat</p>	<p>Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing</p>	<p>Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial, generasi Z) dan penyandang disabilitas</p>
<p>Misi 4: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial</p>		

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	RPJM Nasional 2025-2029
<p>Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal</p>	<p>Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> <p>Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p>
<p>Misi 3: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan</p>	<p>Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan</p>	<p>Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>
<p>Misi 5: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk</p>	<p>Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis,</p>	<p>Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia</p>

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029	RPJM Nasional 2025-2029
mewujudkan visi Indonesia Maju 2045	saling menghormati dan berbudaya	Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomis syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Setiap tujuan disertai dengan sasaran yang merinci kondisi spesifik yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Berikut ini merupakan perumusan tujuan, sasaran, serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Lamandau untuk periode 2025-2029.

Tabel 3. 2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)
Visi: "Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan"			
Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan e-governance dan good governance	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau	Indeks Pelayanan Publik
Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) Prevalensi Stunting
Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)		
Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
		Meningkatnya daya saing pertumbuhan ekonomi	PDRB Per Kapita
			Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi
			Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya stabilitas ekonomi	Tingkat Inflasi
		Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Indeks Gini		
			Indeks Infrastruktur Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Visi: "Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang Maju, Unggul, sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan"			
Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kecamatan yang terhubung jaringan jalan mantap
		Meningkatnya kelayakhunian	Rasio permukiman layak huni
Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)/ Indeks Harmoni Daerah
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ketahanan ekologi		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Indeks Kualitas Air

3.3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

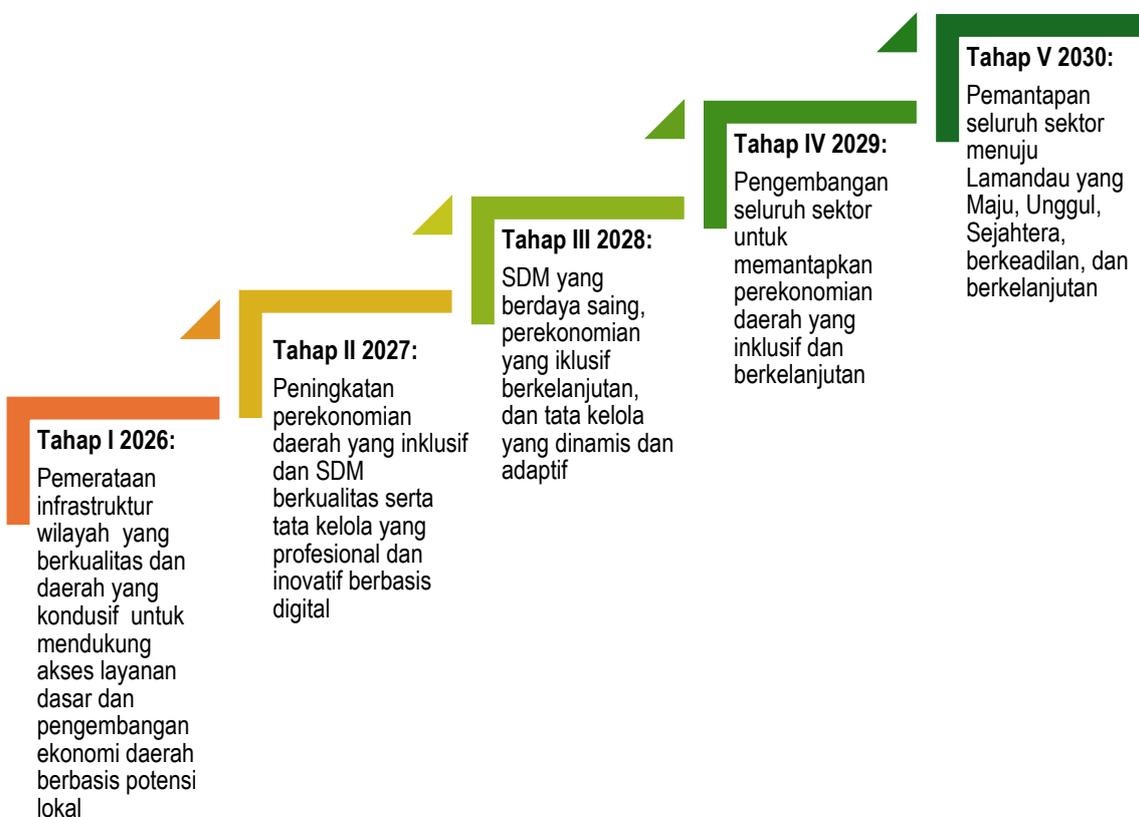
Bagian ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan. Secara garis besar, sub bab ini mencakup tiga aspek yaitu penahapan pembangunan RPJMD, arah kebijakan, dan program prioritas daerah.

3.3.1 Tahapan Pembangunan RPJMD

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi

sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan sendiri merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Perumusan tahapan pembangunan ini berpedoman atau mengacu pada pada visi, misi, dan prioritas kepala daerah tahun 2025-2029 dan juga RPJPD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2045 tahap pertama, yaitu “peningkatan fondasi transformasi pembangunan”. Adapun tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamandau periode 2025-2029, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

3.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
<p>Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan <i>e-governance</i> dan <i>good governance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan profesionalitas dan integritas ASN melalui implementasi sistem merit 2. Digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik 3. Kualitas pelayanan publik yang terjangkau, mudah, dan terintegrasi 4. Peningkatan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi 5. Peningkatan kualitas kebijakan yang adaptif
<p>Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan institusi keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang (narkoba, miras, pernikahan dini) serta penguatan karakter generasi muda 2. Pengembangan kabupaten layak anak (KLA) melalui pemenuhan hak anak (akses sekolah, pengembangan diri) dan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran 3. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender 4. Peningkatan partisipasi perempuan pada sektor publik (pendidikan dan dunia kerja), serta perlindungan perempuan dari kekerasan 5. Peningkatan kemitraan dalam mencegah perilaku berisiko pada masyarakat (potensi peredaran narkoba)

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
<p>Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk dan pemasaran produk pertanian, Perkebunan, perikanan, industri 2. Peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan ekonomi kreatif 3. Peningkatan stabilitas harga barang 4. Peningkatan link & match antara tenaga kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja 5. Penurunan ketimpangan pendapatan Peningkatan perlindungan sosial 6. Peningkatan pengadopsian riset dan inovasi secara berkesinambungan.
<p>Misi 4: Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta perbaikan gizi lainnya 2. Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas 3. Peningkatan ketersediaan dokter spesialis dan sub spesialis di rumah sakit 4. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan 5. Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai 6. Peningkatan promosi kesehatan melalui eliminasi perilaku BABS, perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular 7. Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang memadai 8. Peningkatan jumlah dan distribusi guru yang merata 9. Peningkatan kualitas guru 10. Fasilitasi akses pendidikan bagi siswa putus sekolah dan ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi
<p>Misi 5: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan 2. Peningkatan akses dan kualitas transportasi umum

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perluasan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan aman 4. Fasilitasi pemerataan layanan ketenagalistrikan 5. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni 6. Fasilitasi pemerataan layanan jaringan telekomunikasi
<p>Misi 6: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan karakter dan agama melalui integrasi nilai moral, etika, dan agama dalam kurikulum pendidikan 2. Penguatan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman melalui dialog lintas agama dan pengembangan festival budaya dan seni daerah 3. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung peraturan anti diskriminasi 4. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dalam menjaga keharmonisan sosial 5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan keberagaman
<p>Misi 7: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA berkelanjutan 2. Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim 4. Pengelolaan sampah terintegrasi berbasis hulu hilir 5. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan Pengurangan risiko dan dampak bencana

3.3.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik. Rumusan program prioritas pembangunan ini perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dalam aspek politik, program prioritas mencakup program unggulan yang selaras dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih. Program ini juga merupakan janji politik yang harus direalisasikan dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan. Dalam aspek teknokratik, program prioritas ini disusun berdasarkan analisis terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi daerah. Dengan demikian, program ini diharapkan memiliki relevansi yang kuat dan mampu menyelesaikan tantangan yang ada. Berikut merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029.

3.3.3.1 Program Prioritas Daerah

Tabel 3. 4 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan e-governance dan good governance	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah		Nilai SAKIP			
			Meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN berbasis sistem merit	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	Meningkatkan Kualitas dan Optimalisasi SDM ASN dalam Pengelolaan Pemerintah yang Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Penataan dan penempatan ASN secara transparan untuk mendorong terciptanya stabilitas pemerintahan sesuai bidang keilmuan, agar secara profesional dilakukan dengan optimal	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				Indeks Sistem Merit			
		Nilai MCP					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau	Indeks Pelayanan Publik				
Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Indeks inovasi daerah		Jaminan pengembangan karir ASN dalam	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						rangka meningkatkan motivasi pegawai	
						Pengembangan, pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Penerapan Program E- governance	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
						Penerapan good governance secara optimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang adil	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			
				Harapan Lama Sekolah (HLS)			
		Meningkatnya mutu layanan pendidikan disemua jenjang	Skor Literasi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Penyamarataan mutu dan kualitas pendidikan formal dan non formal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Skor Numerasi				Pemberian layanan dan fasilitas pendidikan bagi disabilitas dan pra sekolah
	Pengembangan pendidikan berbasis potensi daerah						

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi akselerasi pembangunan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang memadai	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
						Peningkatan pendidikan berkarakter	
						Mendorong dan meningkatkan jumlah sertifikasi guru	
						Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sesuaikan dengan kemampuan daerah	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pelatihan, workshop dan sejenisnya	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (PNS dan Non PNS)	
						Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu	
						Fasilitasi akselerasi pembangunan pendidikan tinggi (politeknik) sesuai kemampuan daerah	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen	
					Program Prioritas	Rincian Program		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)				
				Prevalensi Stunting				
			Meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan layanan kesehatan	Digitalisasi layanan kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional				Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai Desa
				Penambahan alat kesehatan RSUD dan Puskesmas				
				Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi ibu dan anak				

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penurunan angka stunting	
						Pencegahan penyakit menular	
						Peningkatan sanitasi lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
						Modernisasi RSUD Lamandau menjadi rumah sakit rujukan tertentu	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
						Peningkatan status akreditasi RSUD dan Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lamandau	
						Penambahan tenaga medis seperti dokter spesialis, tenaga bidan dan perawat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitas pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga medis	
						Peningkatan insentif tenaga medis	
		Meningkatnya kualitas keluarga		Indeks Kualitas Keluarga (IKK)			
			Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pelindungan Anak (IPA)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Perlindungan anak dari tindak kekerasan dan penelantaran	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
						Pemenuhan hak anak (akses sekolah, pengembangan diri)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Meningkatnya kualitas	Indeks Pembangunan Pemuda/		Pengembangan minat dan bakat pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pembangunan pemuda	persentase pemuda pelopor		<p>Menciptakan calon enterprenuer muda diberbagai sektor usaha</p> <p>Gerakan pemuda pemudi membangun Kabupaten Lamandau, gerakan milenial, Gen Z dan Post Gen Z anti narkoba dan menciptakan komunitas-komunitas penunjang kegiatan kepemudaan</p> <p>Fasilitasi sport center yang repressentatif sebagai tempat meningkatkan</p>	<p>KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</p>

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bakat dan minat bidang olahraga	
			Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
						Pelatihan dan peningkatan keterampilan perempuan	
						Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga	
						Peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender	
						Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi	Meningkatnya daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif	Meningkatnya daya saing pertumbuhan ekonomi		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)			
				PDRB Per Kapita			
				Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi			
				Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				Kontribusi PDRB industri	Percepatan Peningkatan	Pengembangan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
kemiskinan dan pengangguran			Meningkatnya kontribusi sektor industri	pengolahan (%) / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMDes	PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi PDRB perdagangan (%)	Perluasan jaringan pasar	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen	
					Program Prioritas	Rincian Program		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya pembentukan modal tetap bruto	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Investasi Optimalisasi potensi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
							Penguatan ekosistem investasi hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
								PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan daya tarik destinasi wisata	
						Peningkatan promosi destinasi wisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
						Peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
						Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
						Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif	MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (%)	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Meningkatnya stabilitas ekonomi		Tingkat Inflasi			
			Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Perkembangan Harga	Perluasan jaringan pasar	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Menurunnya kemiskinan		Tingkat Kemiskinan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian (%)	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian ,perkebunan,perikanan, hasil	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
						Peningkatan kapasitas SDM pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
						Pengelolaan sawit berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
						Hilirisasi komoditas sawit berbasis ekonomi sirkular	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
						Pengembangan pertanian modern berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Diversifikasi komoditas pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Penuntasan kemiskinan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Peningkatan minat wirausaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Persentase penurunan penduduk miskin	Penuntasan kemiskinan	Peningkatan perlindungan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat		Indeks Gini			
			Meningkatnya kinerja koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi berkualitas/ sehat / aktif	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMDes	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil / Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
						Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMDes	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah			Indeks Infrastruktur Daerah			
		Meningkatnya konektivitas wilayah		Persentase kecamatan yang terhubung jaringan jalan mantap			
		Kualitas infrastruktur wilayah yang merata		Persentase jalan dalam kondisi mantap	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan sesuai kewenangan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Perawatan jalan dan jembatan di Kabupaten Lamandau			
				Percepatan akses dan konektivitas antar desa/kelurahan dan			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kecamatan di Kabupaten Lamandau	
						Fasilitasi percepatan pembangunan bandara	
						Penataan drainase yang menjadi kewenangan kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Meningkatnya kelayakhunian		Rasio permukiman layak huni			
			Meningkatnya akses elektrifikasi	Persentase rumah tangga mendapatkan akses listrik		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan baru yang merata mulai dari pedesaan sampai perkotaan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya akses terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak		Pembangunan waduk/ embung air baru untuk mengatasi permasalahan salah satunya yaitu banjir Optimalisasi fungsi PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
						Optimalisasi fungsi PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
						Akses jaringan telekomunikasi yang merata	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
						Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi	
						Perluasan jaringan internet	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Desa, Kecamatan (Ibu Kota Kecamatan) dan Kabupaten	Integrasi antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten: Penataan jalur distribusi barang dan jasa demi menjamin ketersediaan barang dan stabilitas harga	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
						Pemerataan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	
Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya	Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)/ Indeks Harmoni Daerah			
		Meningkatnya pemajuan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kebudayaan daerah	Meningaktanya pelestarian kebudayaan	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya	Pengembangan pusat budaya di beberapa kecamatan/kelurahan/desa	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
						Penelitian dan pengembangan budaya	
						Penguatan budaya melalui sektor pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Meningkatnya kohesivitas sosial	Angka konflik sosial		Harmonisasi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Lamandau	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
					Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin untuk menciptakan keharmonisan dan saling menghormati		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Menumbuhkan Sikap Toleransi Agar Tercipta Kerukunan Umat beragama	
						Harmonisasi antar suku dan etnis	
						Menumbuhkan Sikap Toleransi Agar Tercipta Kerukunan antar etnis dan suku	
Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ketahanan ekologi			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan			
				Indeks Kualitas Air			
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase titik pantau lingkungan yang memenuhi baku mutu	Pengelolaan dan Memanfaatkan SDA Dengan Prinsip Pembangunan	Pemanfaatan SDA: Pembangunan SDA berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	aspek pembangunan berkelanjutan	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		Komitmen para pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
						Pengawasan terhadap AMDAL bagi industri dan sektor lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
						Menjaga kelestarian dan kebersihan Sungai, hutan dan alam	
						Pengelolaan limbah industri bersih dan ramah lingkungan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana			
			Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana	Indeks Ketahanan Daerah		Optimalisasi mitigasi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
						Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (pemanfaatan dan pengembangan potensi alam sebagai sumber energi seperti sungai, angin, air terjun dan panas) sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
						Perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
					Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengembangkan energi terbarukan	
						Peningkatan koordinasi dengan pemerintahan pusat dan Provinsi terkait potensi dan hasil pertambangan di Kabupaten Lamandau	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
						Pemanfaatan sumberdaya alam secara arif dan bijak alam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi perlu keterlibatan masyarakat	

**3.3.3.2 Penandingan Program Prioritas Daerah dengan Nomenklatur Program
Keppmendagri 900.1.15.5/3406 Tahun 2024**

**Tabel 3. 5 Penandingan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nomenklatur
Program Keppmendagri 900.1.15.5/3406 Tahun 2024**

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan e-governance dan good governance	Meningkatkan Kaulitas dan Optimalisasi SDM ASN dalam Pengelolaan Pemerintah yang Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Penataan dan penempatan ASN secara transparan untuk mendorong terciptanya stabilitas pemerintahan sesuai bidang keilmuan, agar secara profesional dilakukan dengan optimal	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jaminan pengembangan karir ASN dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Pengembangan, pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Penerapan Program E-governance	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Penerapan good governance secara optimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang adil	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Penyamarataan mutu dan kualitas pendidikan formal dan non formal	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Pemberian layanan dan fasilitas pendidikan bagi disabilitas dan pra sekolah	
		Pengembangan pendidikan berbasis potensi daerah	
		Fasilitasi akselerasi pembangunan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang memadai	
		Peningkatan pendidikan berkarakter	

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Mendorong dan meningkatkan jumlah sertifikasi guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Fasilitasi para guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sesuaikan dengan kemampuan daerah	
		Fasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pelatihan, workshop dan sejenisnya	
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (PNS dan Non PNS)	
		Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu	
	Fasilitasi akselerasi pembangunan pendidikan tinggi (politeknik) sesuai kemampuan daerah		
	Peningkatan layanan kesehatan	Digitalisasi layanan kesehatan untuk mempermudah dan mempercepat proses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
		Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai Desa	
		Penambahan alat kesehatan RSUD dan Puskemas	
		Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi ibu dan anak	
		Penurunan angka stunting	
		Pencegahan penyakit menular	
		Peningkatan sanitasi lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		Modernisasi RSUD Lamandau menjadi rumah sakit rujukan tertentu	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen	
	Program Prioritas	Rincian Program		
(1)	(2)	(3)	(4)	
		Peningkatan status akreditasi RSUD dan Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lamandau	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Penambahan tenaga medis seperti dokter spesialis, tenaga bidan dan perawat		
		Fasilitas pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga medis		
		Peningkatan insentif tenaga medis		
	Peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan kualitas pemuda		Perlindungan anak dari tindak kekerasan dan penelantaran	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Pemenuhan hak anak (akses sekolah, pengembangan diri)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Pengembangan minat dan bakat pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Menciptakan calon enterprenuer muda diberbagai sektor usaha	
			Gerakan pemuda pemudi membangun Kabupaten Lamandau, gerakan milenial, Gen Z dan Post Gen Z anti narkoba dan menciptakan komunitas-komunitas penunjang kegiatan kepemudaan	
			Fasilitasi sport center yang repressentatif sebagai tempat meningkatkan bakat dan minat bidang olahraga	
			Pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Pelatihan dan peningkatan keterampilan perempuan	
			Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga	
			Peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik	

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender	
		Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Misi 3: Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMDes	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Peningkatan Investasi Optimalisasi potensi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Penguatan ekosistem investasi hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		Pengembangan daya tarik destinasi wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Peningkatan promosi destinasi wisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		Peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN		

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
			PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian ,perkebunan,perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Peningkatan kapasitas SDM pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Hilirisasi komoditas sawit berbasis ekonomi sirkular	
		Pengelolaan sawit berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		Pengembangan pertanian modern berkelanjutan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Diversifikasi komoditas pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui IKM, UMKM, Koperasi, dan BUMDes	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Penguatan UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	Perluasan jaringan pasar	Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen	
	Program Prioritas	Rincian Program		
(1)	(2)	(3)	(4)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
		Peningkatan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil pertambangan dan sektor lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Peningkatan minat wirausaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Peningkatan perlindungan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	Misi 4: Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan sesuai kewenangan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Perawatan jalan dan jembatan di Kabupaten Lamandau	
Percepatan akses dan konektivitas antar desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Lamandau				
Fasilitasi percepatan pembangunan bandara				
Penataan drainase yang menjadi kewenangan kabupaten			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
			SISTEM DRAINASE
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan baru yang merata mulai dari pedesaan sampai perkotaan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Pembangunan waduk/ embung air baru untuk mengatasi permasalahan salah satunya yaitu banjir Optimalisasi fungsi PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Optimalisasi fungsi PDAM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Akses jaringan telekomunikasi yang merata	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi	
		Perluasan jaringan internet	
	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Desa, Kecamatan (Ibu Kota Kecamatan) dan Kabupaten	Integrasi antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten: Penataan jalur distribusi barang dan jasa demi menjamin ketersediaan barang dan stabilitas harga	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Pemerataan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	
	Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya	Pengembangan pusat budaya di beberapa kecamatan/kelurahan/desa
Penelitian dan pengembangan budaya			
Penguatan budaya melalui sektor pariwisata			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Harmonisasi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Lamandau			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pertemuan tokoh lintas agama secara rutin untuk menciptakan keharmonisan dan saling menghormati</p> <p>Menumbuhkan Sikap Toleransi Agar Tercipta Kerukunan Umat beragama</p> <p>Harmonisasi antar suku dan etnis</p> <p>Menumbuhkan Sikap Toleransi Agar Tercipta Kerukunan antar etnis dan suku</p>	<p>NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS</p> <p>PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p>
Misi 6: Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan dan Memanfaatkan SDA Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Pemanfaatan SDA: Pembangunan SDA berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		Komitmen para pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Pengawasan terhadap AMDAL bagi industri dan sektor lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Menjaga kelestarian dan kebersihan Sungai, hutan dan alam	
		Pengelolaan limbah industri bersih dan ramah lingkungan	
		Optimalisasi mitigasi bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan (pemanfaatan dan pengembangan potensi alam sebagai sumber energi seperti sungai, angin, air terjun dan panas) sesuai	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Misi	Program Prioritas Daerah		Program Kepmen
	Program Prioritas	Rincian Program	
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamandau	
		Perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan energi terbarukan	
		Peningkatan koordinasi dengan pemerintahan pusat dan Provinsi terkait potensi dan hasil pertambangan di Kabupaten Lamandau	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Pemanfaatan sumberdaya alam secara arif dan bijak dalam perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi perlu keterlibatan masyarakat	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 4. 1 Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
x			Non Urusan																			
x	x	x	Non Urusan																			
X	X	X	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Persen														Seluruh OPD		
					Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Persen																Sekretariat Daerah
					Persentase fasilitasi layanan kedinasan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah sesuai standar	Persen																
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																			
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen													
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	Skor													Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen													
1	1	5	Program pengendalian dan perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen													Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
1	1	6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen													Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1	2	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka													Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen														
1	2	3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen												Dinas Kesehatan
1	2	4	Program sediaan farmasi, kesehatan alat dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen												Dinas Kesehatan
1	2	5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen												Dinas Kesehatan
1	2	7	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen												Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																
1	0302	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
			Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen														
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen														
1	0303	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Antar Wilayah	Persen														Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	0304	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persen															
1	0305	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen															Dinas Pekerjaan Umum
1	0306	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persen															Dinas Pekerjaan Umum
1	0307	Pengembangan Permukiman	Persen															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	038	Program Penataan Bangunan Gedung	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
1	039	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
1	030	Program Penyelenggaraan Jalan	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
1	031	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
1	032	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen														Dinas Pekerjaan Umum
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman															
1	042	Program Pengembangan perumahan	Persen														Dinas Perumahan, dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Huni															
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen														
1	043	Program Kawasan Permukiman	Persen														Dinas Perumahan, dan Permukiman
1	044	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%														Dinas Perumahan, dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
																	Dinas Perumahan, dan Permukiman
1	045	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persen														Dinas Perumahan, dan Permukiman
1	046	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen														Dinas Perumahan, dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Sarana dan Utilitas Umum PSU																
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen													Satpol PP
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen													
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen													
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen													
1	05	03	Penanggulangan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	Persen													BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Bencana															
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen														
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen														
1	054	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen														BPBD
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen														
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	06	Pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen													Dinas Sosial
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan	Persen													Dinas Sosial
			Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen													Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Persen															
1	0 6	0 3	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar														
			Persen															
1	0 6	0 4	Rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan														Dinas Sosial
			Persen															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Dasarnya di Dalam Panti															
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen														
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen														
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Draft Kepmendagri IKK Dasarnya di Dalam Panti	Persen														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	0 6	0 5	Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen													Dinas Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen													Dinas Sosial
1	0 6	0 6	Penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi	Persen													Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	0 6 7	0 7	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen													Dinas Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
2	0 7	7	Urusan Tenaga Kerja															
2	0 7	0 2	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen													Dinas Ketenagakerjaan
2	0 7	0 3	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktivitasnya	Persen													Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	0 7 4	0	Penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen													Dinas Ketenagakerjaan
2	0 7 5	0	Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Angka													Dinas Ketenagakerjaan
			Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Angka													
2	0 8		Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak															
2	0 8 2	0	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen													Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen														
2	0803	Program Perlindungan Perempuan	Persen														
2	0804	Peningkatan Kualitas Keluarga	Angka														
2	0805	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Angka														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	086	Program pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Skor															
2	087	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	Persen															
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Skor															Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
2	092	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen															Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	093	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor															Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	0	0	Penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	0	0	Pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	1	0	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan															
			Pengelolaan Izin Lokasi	-														
2	1	0	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang	Persen													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	104	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Diselesaikan Tepat Waktu	Persen													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	105	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaiannya	Persen													
2	106	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	107	Penetapan Tanah Ulayat	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	108	Pengelolaan Tanah Kosong	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	110	Program Penatagunaan Tanah	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	112	Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Angka														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	113	Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	104	Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	105	Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	106	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	107	Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persen														Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.1.01.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1.5	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen														Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Beracun (Limbah B3)															
2	106	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
2	107	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Persen														Dinas Lingkungan Hidup
2	108	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persen														Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	1	0	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen												Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	0	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen												Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka												Dinas Lingkungan Hidup
2	1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2	1	2	2	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen															
2	1 2 3	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen														
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen														
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen														
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	1 2	4	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen													
2	1 2	5	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen													
2	1 4		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	1 4	0 2	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Tahun													
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Tahun													
2	1 4	0 3	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen													Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
2	1 4	4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
2	1 5	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan															
2	1 5	0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	Persen												Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	1 5 3	Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	Angka														Dinas Perhubungan
2	1 5 4	Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengendalian KKOP	Persen														Dinas Perhubungan
2	1 5 5	Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persen														Dinas Perhubungan
2	1 6	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika																
2	1 6 2	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Daerah	Persen														Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6 3	Program aplikasi informatika	Indeks SPBE	Persen														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	1		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah															
2	1	0	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1	0	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1	0	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1	0	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1	0	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	1 7 7	0	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
				Pertumbuhan Wirausaha	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1 7 8	0	Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1 7 9	0	Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
2	1 8		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															
2	1 8 2	0	Pengembangan iklim penanaman modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%													Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.1.08.3	Promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%														Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2.1.08.4	Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%														Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2.1.08.5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%														Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2.1.08.6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%														Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
2.1.08.7	Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	%														Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	19	Usuran Pemerintahan Bidang kepemudaan dan Olahraga																
2	1902	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Angka														Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1903	Program pengembangan daya saing kepemudaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%														Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	1904	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%														Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	20	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik																
2	202	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka														Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian																
2	212	Program penelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%														Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Ditetapkan															
2	2 2 0 6	Pengelolaan Permuseuman	Persen														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2 1 0	Perfilman Nasional	Persen														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 3	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
2	2 3 2	Program pembinaan perpustakaan	Nilai														Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 3 3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen														Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Persen														Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2 4	Usuran pemerintahan bidang kearsipan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	2	2	Program Pengelolaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka													Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	3	Perindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen													Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	4	Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen													Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	2	5	Akreditasi dan Sertifikasi	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Persen													Dinas Perpustakaan dan Arsip
3			Usuran Pemerintahan Pilihan															
3	2	5	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	2 5	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Nilai													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Nilai													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	Ha													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 5	Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Angka													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 6	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	2 6 2	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6 3	Pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2 6 5	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	2 7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
3	2 7 2	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Peningkatan Produksi Hortikultura	%													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 7	0 3	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha												Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 7	0 4	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%												Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	%													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		(Nomor Kontrol Veteriner)															
3	2 7	0 5	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%												Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%												Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	2 7	0 6	Perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%												Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	2 7 7	Penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%														Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%														Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	3 0	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																
3	3 0	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%														Dinas Perdagangan
3	3 0 3	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	304	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%														
3	30	Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Nilai														
3	306	Standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%														
3	30	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%														
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
3	312	Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%														Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	3 1 3	Pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%															
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%														Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian	
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4	1	Sekretariat Daerah																	
		Program Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	Persen															Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen															Sekretariat Daerah
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Skor															Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Program Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen															Sekretariat Daerah	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen																Sekretariat Daerah
4	1	3	Program perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen														Sekretariat Daerah
	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor																Sekretariat Daerah
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen																Sekretariat Daerah
4	2		Sekretariat DPRD																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5	2	Pembangunan Manusia																
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%															
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%															
5	2	Keuangan																
5	2	2	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%													Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pelayanan Publik															
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%														
		Persentase Penurunan SILPA	%														
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%														
5	2	3	Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%												
5	2	4	Program Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%												
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%														
5	3	Kepegawaian															
5	3	2	Program Kepegawaian daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%												Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%												
				Persentase peningkatan penempatan jabatan sesuai kompetensinya	%												
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%												
5	4	Pendidikan dan Pelatihan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Program pengembangan SDM	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%														Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%														
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%														
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%														
5	5	Penelitian dan Pengembangan																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Kebijakan Pembangunan Daerah															
		Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%														
5	5	Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%													
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi	%														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7		Intern Pemerintah (SPIP)																
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai															
7		Unsur Kewilayahan																
7	1	Kecamatan																
7	1	2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%													
7	1	3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%													Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase RT berdaya	%															
7	1	4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%													
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%													
8		Unsur Pemerintahan Umum																
8	0 1	Kesatuan Bangsa dan Politik																
8	0 1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%													Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2025		2026		2027		2028		2029				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	0103	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%														
8	0104	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%														
8	0105	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2025		2026		2027		2028		2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8	0106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																
		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan																
		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%															

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai								
2	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Nilai								
3	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai								
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai								

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai								
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)/ Indeks Harmoni Daerah	Nilai								
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai								
8	PDRB Per Kapita	Juta rupiah								
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen								
10	Tingkat Inflasi	Persen								
11	Tingkat Kemiskinan	Persen								
12	Indeks Gini	Nilai								
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai								

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamandau

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai								
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%								
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita								
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%								
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH								
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT								
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg								
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT								
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%								
10	Indeks Risiko Bencana	poin								
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin								
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%								
13	Rasio Penduduk	%								
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%								
2	Tingkat Kemiskinan	%								
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta								
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%								
5	Indeks Gini	angka								
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka								
7	Usia Harapan Hidup	tahun								
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks								
9	Prevalensi Stunting	%								
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun								
11	Harapan Lama Sekolah	tahun								
12	Angka Literasi/Numerasi	%								
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks								
14	Indeks Literasi Digital	angka								
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%								
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor								
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka								
18	Indeks Perlindungan Anak	angka								
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100								
20	Indeks Ketimpangan	poin								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Gender									
21	Indeks Pembangunan Pemuda									
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%								
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%								
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%								
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%								
5	Rasio Kewirausahaan	%								
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%								
7	Indeks Inovasi Daerah	skor								
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/ Jiwa								
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor								
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%								
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10								
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB								
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB								
14	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur									
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Persentase Desa Mandiri	%								
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%								
18	Tingkat Inflasi	%								
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum									
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin								
3	Indeks Pelayanan Publik	angka								
4	Indeks Integritas Nasional	angka								
5	Persentase Penegakan Perda	%								
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%								
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%								
8	Indeks Rasa Aman	angka								
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka								
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai								
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen								
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen								
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen								
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen								
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen								
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen								
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen								
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen								
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen								
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen								
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen								
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	skrining kesehatan sesuai standar									
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen								
2.1 1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen								
2.1 2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen								
2.1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen								
2.1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen								
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen								
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen								
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen								
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen								
3.6	Rasio kepatuhan IMB	Persen								
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen								
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen								
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen								
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen								
4.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen								
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen								
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen								
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen								
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen								
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen								
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen								
1.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen								
1.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen								
1.5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen								
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen								
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen								
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen								
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen								
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
4.1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah								
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen								
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka								
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen								
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen								
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.1	Persentase perekaman KTP elektronik	Persen								
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen								
6.3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen								
6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen								
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen								
7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen								
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen								
8.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka								
8.3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen								
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen								
8.5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen								
8.6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen								
8.8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen								
8.9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen								
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
9.1	Rasio konektivitas	Angka								
9.2	Kinerja lalu lintas	Persen								
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
10.1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen								
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen								
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen								
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen								
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen								
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	organisasi sosial kemasyarakatan									
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen								
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
14.1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen								
14.2	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen								
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen								
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka								
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka								
16.3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen								
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen								
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen								
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pertanggungjawaban									
17.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen								
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
18.1	Rasio cagar budaya yang lestari	Nilai								
C	Urusan Pemerintahan Pilihan									
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
1.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Angka								
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata									
2.1	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara	Persen								
2.2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	Persen								
2.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen								
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
3.1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun									
	Tanaman Pangan	Angka								
	Tanaman Perkebunan	Angka								
	Tanaman Hortikultura	Angka								
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)									
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen								
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen								
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen								
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen								
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen								
D	Urusan Penunjang Pemerintahan									
1	Sekretariat Daerah									
1.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen								
1.2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen								
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen								
2	Sekretariat Dewan									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak								
2.2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak								
2.3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak								
3	Perencanaan									
3.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak								
3.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak								
3.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak								
3.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah	Ada/Tidak								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ditetapkan dengan PERDA									
3.5	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen								
3.6	Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen								
3.7	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen								
4	Keuangan									
4.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen								
4.2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen								
4.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen								
4.4	Opini Laporan Keuangan	Predikat								
4.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen								
4.6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen								
4.7	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen								
4.8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen								
4.9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen								
4.10	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen								

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Kepegawaian									
5.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen								
5.2	Rasio pegawai fungsional	Persen								
5.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen								
5.4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun								
5.5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen								
5.6	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen								
6	Penelitian dan Pengembangan									
6.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen								
6.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen								
6.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen								
6.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen								
7	Pengawasan									
7.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat								
7.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat								

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan visi besar pembangunan Kabupaten Lamandau ke depan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan perencanaan yang sistematis dan berbasis data. Penyusunannya dilakukan melalui riset mendalam dengan metode pengumpulan data yang beragam, seperti observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, serta teknik pengumpulan data lainnya.

Analisis terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya dilakukan dengan metode yang terukur, sehingga dapat menghasilkan rumusan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lamandau. Rumusan ini menjadi dasar dalam menetapkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Untuk memastikan kesinambungan dan keterkaitan antara permasalahan dan intervensi kebijakan yang akan dilakukan, penyusunan RPJMD menggunakan metode *cascading* perencanaan jangka menengah. Keberhasilan implementasi RPJMD ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025–2029 berperan sebagai pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang lebih terperinci. Oleh karena itu, setiap indikator yang tercantum dalam RPJMD harus

diawasi dan diimplementasikan secara optimal agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup, semoga RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025–2029 ini dapat menjadi panduan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan dokumen ini mampu menjadi pendorong utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau pada masa depan.



Pemerintah
Kabupaten Lamandau

Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamandau

Tahun 2025 - 2029